

"Chance never knock at your door twice. Kesempatan datangnya hanya sekali, jika dia datang, segera ambil dan kerjakan sekarang juga."

#Sandiaga Uno

SANDIAGA UNO

MENTERI PALING KERJA

DIMULAI DARI
KALTARA UNTUK
SELAMATKAN DUNIA

SUMSEL
KEROYOKAN CAPAI
VAKSINASI 70%

ANGGARAN DAERAH
JANGAN BIARKAN
MENGANGGUR



Rp75.000,-



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000

**INFO
PASANG
IKLAN**
KIKI IBRAHIM
+62 818 931 562

*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

► **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN
PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

► **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET
SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

► **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH
DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

► **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON
UNTUK PARA PELANGGAN**

PENDIRI

Waherman St. Mangkuto, H. Zainuddin

DIREKTUR / PEMIMPIN UMUM

Usman Rizal

PEMIMPIN REDAKSI

Gunawan Effendi

REDAKTUR PELAKSANA

Rio Taufiq Adam

REDAKTUR

Raden Mohd Solehin, Andyanto,

Aprilia Rahapit, Rahmad R,

Rusdiyono, Benni Martha Daya, Yuliani

REPORTER

Desi Wulandari, Anugrah Dany, Rifky Ilmi,

Pras Budi Presetya,

Ahmad Yani, Yuni Watiana,

Mario Ananta, Khoirur Rozi, Rahmad KR, Iwan

Fals, Heni Elsa Wulandari, Dedy Sagita, Nina

Iskandar, Jifran, Dian Taresa

(Kalimantan Tengah), Zaki (Kalimantan

Timur), Basri (Kalimantan Utara), Rizky

Ananda (Nusa Tenggara Barat), Abu Bakar

Usman (Kepulauan Bangka Belitung)

EDITOR & GRAFIS

Al Amin

TATA LETAK

Sujatmiko

MEDIA SOSIAL

Haidir Ali

KEUANGAN

Dra Nurhamida

SEKRETARIS REDAKSI

Ega Tri Agustin

PENGEMBANGAN BISNIS

Kiki Ibrahim

RM Solehin

DISTRIBUSI

Abdul Muchtar

BANK ACCOUNT

A/N : PT. Wahana Multimedia

BCA : No Rek : 553-041-4321

KCP Olistta Jakarta Timur

DESEMBER

Penghujung tahun menyapa kita. Bulan demi bulan telah berlalu sepanjang 2021. Dinamika kehidupan berlanjut meskipun sebagian ada yang karut-marut. Sebagian lagi malah lebih cemerlang.

Kita tampaknya akan semakin terbiasa dengan resolusi tahun baru, tradisi yang memiliki sejarah panjang sejak masa sebelum masehi hingga kini terus berlanjut di dunia barat yang sekuler. Apa resolusi untuk 2022?

Di lingkup pribadi, kita dapat memiliki agenda masing-masing untuk 2022. Demikian selanjutnya di lingkungan keluarga, juga meluas ke wilayah jelajah kita di ruang publik: pendidikan, pekerjaan, maupun kegiatan lain yang melibatkan masyarakat luas di kabupaten-kota, hingga provinsi dan yang berskala nasional.

Semakin luas wilayah jelajah, akan semakin rumit persoalan atau masalah yang menjadi tantangan. Ada kondisi persaingan hingga permusuhan bahkan konflik yang mungkin berdarah-darah. Namun tetap ada kemungkinan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan seluas mungkin. Batasnya adalah langit Desember 2021 yang akan beralih ke Januari 2022.

Nah, langit Desember 2022 di Indonesia menunjukkan tanda-tanda yang beragam. Teknologi penginderaan satelit yang tampilannya terjangkau di genggam tangan memungkinkan kita mengenali tanda-tanda itu.

Katakan saja siklus cuaca harian yang pada Desember menunjukkan lebih banyak awan berpotensi hujan. Juga deru hembusan angin yang lebih kencang. Kita yang berpijak di bumi akan menerima curahan air lebih banyak dari musim kemarau. Kepulan dan debu muntahan gunung berapi yang meletus terekam pula.

Kita yang berpijak di bumi akan terdampak oleh gejala cuaca dan musim, juga iklim. Namun, tanggapan terhadap gejala itu akan beragam. Dengan berbagai alasan. Boleh jadi perbedaan agenda antarpribadi, maupun antarlembaga menjadi penyebabnya. Potensi persaingan, gesekan di tataran gagasan maupun tindakan akan manifest di berbagai ranah kehidupan. Ekonomi dan politik tak mungkin steril dari dampak itu.

Di Jakarta, dekat kantor kami, urusan sumur resapan merupakan contoh manifestasi dampak tanda-tanda langit di ranah politik dan ekonomi. Di lingkup yang lebih luas, kita dapat menyimak Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang belum lama ini mendapat pengesahan DPR.

Jadi, resolusi 2022, yang sejatinya merupakan perencanaan, menjadi sangat relevan pada Desember ini. Sedangkan resolusi Info Indonesia untuk 2022 adalah tetap mendampingi Anda semua, para pemangku kepentingan. Seraya menyelipkan doa dan harapan, semoga 2022 akan lebih baik dibandingkan dengan tahun ini. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:

Jalan MPR III No. 5B, Kelurahan Cilandak Barat,

Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan (12430)

Telp / Fax : 021-278 123 97

Twitter : @Infoindonesia

Facebook : infoindonesia.id

Instagram : @infoindonesia.id

Email : redaksi@infoindonesia.id

DAFTAR ISI

EDISI
BULAN
DESEMBER
2021



6 INFO UTAMA

Satu tahun Sandiaga Salahuddin Uno menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam kurun waktu itu, banyak pekerjaan penting diselesaikannya. Dengan performa yang apik, dia mampu membawa Kemenparekraf masuk dalam empat besar kementerian yang kinerjanya memuaskan publik.



22 INFO SUMSEL

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada tenaga kesehatan dan berbagai pihak yang telah berkontribusi dan berjuang menangani COVID-19 di Bumi Sriwijaya.



36 INFO SUMATERA UTARA

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengklaim penyerapan anggaran hingga November 2021 mencapai 72,9 persen. Angka tersebut menjadikan Sumut sebagai provinsi dengan serapan anggaran tertinggi secara nasional.



48 INFO SOSOK

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) berupaya melakukan percepatan reformasi birokrasi pemerintah.



70 INFO SPORT

2021 menjadi tahun kebangkitan olahraga nasional. Beragam event olahraga skala nasional hingga internasional mampu dilaksanakan dengan baik, meski dunia masih dilanda pandemi COVID-19.



88 INFO KHUSUS

Undang-Undang baru lagi. Pemerintah menyebutnya sebagai reformasi struktural di bidang desentralisasi fiskal. Ringkas saja sebenarnya: perombakan besar-besaran terkait anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten maupun kota.

84

INFO SELEBRITI

Julukan artis terkaya memang layak disandang oleh sejumlah selebriti di Indonesia. Bagaimana tidak, jumlah harta kekayaan mereka mencapai ratusan miliar rupiah. Tentunya, untuk mendapatkan semua itu memerlukan kerja keras yang tak sedikit.



SANDIAGA UNO MENTERI PALING KERJA

Satu tahun Sandiaga Sala-
huddin Uno menjabat Men-
teri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif. Dalam kurun waktu
itu, banyak pekerjaan pent-
ing diselesaikannya. Den-
gan performa yang apik,
dia mampu membawa Kem-
enparekraf masuk dalam
empat besar kementerian
yang kinerjanya memuas-
kan publik.

Beban Sandi sejak dilan-
tik sebagai Menparekraf
pada 23 Desember 2020
lalu sangat berat. Dia
harus bisa membangkit-
kan industri pariwisata yang terpuruk
akibat pandemi COVID-19.

Tugasnya tak main-main. Tak seka-
dar jalan-jalan menghadiri kegiatan di
daerah saja. Tapi juga harus mampu
membangkitkan semangat pelaku pa-
riwisata di Tanah Air yang hancur gara-
gara wabah virus Corona.

Maka wajar lembaga survei Indika-
tor Politik Indonesia memposisikan
Sandiaga Uno di peringkat keempat
sebagai menteri yang kinerjanya
cukup memuaskan masyarakat. Dia
berada di bawah Tri Rismaha-
rini di posisi pertama, lalu Menteri
Keuangan Sri Mulyani, dan ketiga
di atas Sandi sedikit terdapat
Prabowo Subianto, pa-
sangannya saat maju
Pilpres 2019 silam.

D e n g a n
raihan 9,2 persen,
nilai Sandi sama
dengan Prabowo.
Hanya beda sedikit
saja, tingkat kepuasan
publik terhadap keduanya.
Survei yang digelar pada
periode 2-6 November 2021
melibatkan 2.020 responden
berusia di atas 17 tahun den-
gan rincian sampel ba-
sis 1.220 orang dan
oversample 800

responden, menunjukkan kinerja Sandi
yang tak bisa dianggap sepele.

Dengan raihan tersebut, maka wajar
nama pria yang lahir di Rumbai, Pekan-
baru, Riau pada 28 Juni 1969 itu masuk
dalam bursa capres dan cawapres
2024. Dia bahkan disebut sebagai
salah satu yang terkuat.

Indikator Politik Indonesia mencatat
nama Menparekraf dan politikus Gerin-
dra, Sandiaga Uno sebagai calon wakil
presiden dengan elektabilitas tertinggi.
Responden yang memilih Sandiaga
mencapai angka 20,4 persen.

impin. Pilihan Presiden Joko Widodo
terbukti tepat, dengan memberikannya
amanah sebagai Menparekraf, meng-
gantian Wishnutama.

Bahkan beberapa hari setelah dilan-
tik, Menteri Koordinator Maritim dan In-
vestasi Luhut Binsar Pandjaitan meya-
kini bahwa mantan Wakil Gubernur DKI
Jakarta itu mampu meraih prestasi di
Kemenparekraf. "Saya kira dia (Sandi)
bisa bikin prestasi yang bagus di Ke-
menparekraf," kata Luhut saat bertemu
dengan Sandi dalam rapat koordinasi
di Bali pada 27 Desember 2020 lalu.

mengeyampingkan persaingan politik.

Dia bahkan mampu bekerja sebagai
pembantu Presiden, dengan tujuan
yang selaras dan berkoordinasi secara
terstruktur dengan kementerian lain-
nya. Ya, sejak awal Sandi memang me-
nekankan koordinasi dan komunikasi
untuk bisa membangkitkan pariwisata.

Di bawah koordinasi Luhut sebagai
Menko Marves, Sandi diminta untuk
langsung bekerja, menyolidkan tim
membangkitkan pariwisata di tengah
pandemi COVID-19.

Selain itu, Luhut juga meminta San-



"Top of mind 30 nama, itu Sandi itu
sebagai cawapres paling tinggi di mata
publik," ujar Direktur Eksekutif Indikator
Politik Indonesia Burhanuddin Muhta-
di saat pemaparan survei, Minggu
(5/12/2021).

Hasil dari lembaga survei tersebut
sebenarnya menggambarkan kapasi-
tas dan kapabilitas Sandi sebagai pem-

Lalu apa yang membuat Sandi se-
bagai menteri yang paling banyak kerja
di 2021 ini? Tentu saja karena pandemi
COVID-19 yang mengharuskannya
berkoordinasi dengan banyak pihak
agar sektor pariwisata segera pulih.
Walau pada 2019 sebagai pesaing
Jokowi, latar belakang ayah tiga orang
anak ini sebagai pebisnis, mampu

diaga untuk fokus pada lima destinasi
super prioritas yang telah ditetapkan
pemerintah yakni Danau Toba, Li-
kupang, Borobudur, Mandalika, dan
Labuan Bajo. Sandi mengatakan,
segala aspek harus disiapkan untuk
berbenah, dengan memprioritaskan
aspek kesehatan sebagaimana diin-
struksikan Presiden Joko Widodo.



PENGHARGAAN YANG DIRAIH SANDIAGA UNO DAN KEMENPAREKRAF TAHUN INI

- ▲ Menteri Terpopuler di Media Digital (Anugerah Humas Indonesia)
- ▲ Kementerian Terpopuler di Media Digital (Anugerah Humas Indonesia)
- ▲ Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik III (Ketiga) Tahun 2021 Kategori Kementerian yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- ▲ TOP Government Public Relations (GPR) Award 2021
- ▲ Gold Winner sub kategori Website, Media Sosial, dan E-Magazine (Public Relations Indonesia Awards 2021)
- ▲ Silver Winner sub kategori Media Sosial, Bronze Winner untuk Sub Kategori Media Cetak (Public Relations Indonesia Awards 2021)
- ▲ Kategori Terpopuler di Media Cetak 2020 (Public Relations Indonesia Awards 2021)
- ▲ Badan Publik Informatif (Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021)
- ▲ Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas hasil opini laporan keuangan tahun 2020

"Maka berbenah harus disiapkan secara detail, mulai dari kuliner, fashion, kriya atau kerajinan tangan, tari-tarian, dan lainnya," papar Sandi.

Penerapan CHSE atau K4, yakni Cleanliness (Kebersihan), Healthy

(Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan) menjadi program andalan Sandi, agar pariwisata bisa bangkit. Penerapan CHSE ini termasuk ke dalam strategi adaptasi.

Salah satu dari tiga platform yang diusung Sandi dalam percepatan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Selain adaptasi, strategi lainnya adalah inovasi dan kolaborasi.

"CHSE ini adalah sebuah vaksin daya tahan dan daya bangkit bagi pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi sebelum vaksin ada, kita punya vaksin pariwisata untuk mendorong pelaku usaha. Jadi tugas kita untuk mensosialisasikan sertifikasi CHSE ke depannya," ujar Sandi.

Sandi juga mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk tidak hanya bergerak cepat, tetapi gas penuh (gaspol) untuk pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif jangka panjang. Karena pandemi ini berdampak kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Kita mendata ada 30 juta pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terpuruk, mulai dari informal, hingga pelaku usaha mikro dan besar sangat terdampak dan harus segera dibantu," kata Sandi. Pemulihan jangka panjang, imbuh eks Wakil Gubernur DKI Jakarta itu bisa dilakukan dengan



menumbuhkan penyediaan atau supply yang meliputi persiapan destinasi wisata, membangun infrastruktur, menciptakan dan membangun daya tarik, monitoring protokol CHSE di setiap destinasi wisata, peningkatan kualitas SDM, serta peningkatan kualitas dan kuantitas produk ekonomi kreatif.

Sedangkan pertumbuhan permintaan dapat dilakukan dengan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan, memperluas konektivitas wisatawan, pemberian insentif atau paket wisata, optimalisasi kegiatan MICE

(meeting, incentive, conferencing, and exhibition) di destinasi wisata, pemberian intensif peningkatan daya beli produk lokal dan penciptaan lapangan kerja serta hibah pariwisata melalui transfer daerah untuk hotel, restoran, dan pemda.

Melalui semua langkah tersebut, Sandi mengaku optimistis dapat membangkitkan geliat pariwisata dan ekonomi kreatif nusantara. Optimisme bertambah



pada keyakinan akan dilibatkannya seluruh pihak, mulai dari pelaku usaha, media, komunitas, hingga semua unsur pemangku kepentingan.

"Urut pesimis saya sudah putus. Saya optimistis sekali dapat membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif lewat kerja sama semua pihak," kata eks cawapres dalam Pilpres 2019 tersebut.

Rasa tak mudah menyerah dari Sandi itu, yang menjadi bensin bagi jajaran di bawahnya untuk bekerja. Maka tak heran banyak yang diraih Kemenparekraf pada tahun ini.

Sandi mengaku, prestasi yang diraih tersebut merupakan hasil kerja keras, seluruh pegawai Kemenparekraf yang terus melakukan komunikasi interaktif dengan masyarakat, serta berupaya adaptif dan inovatif.

"Penghargaan ini menjadi bagian dari langkah kami ke depan untuk terus adaptif dan inovatif," kata Sandiaga. ●

Pelajaran yang Didapatkan Sandi di Setiap Perjalanan MENIKMATI KEBESARAN TUHAN

Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, memang tugas Sandiaga Uno untuk mengetahui setiap potensi destinasi wisata di Tanah Air. Setiap kali kunjungan kerja, banyak cerita dan kisah serta pengalaman baru. Namun yang terpenting, dalam setiap perjalanan tersebut, satu pelajaran penting yang didupatkannya adalah menikmati kebesaran Tuhan.

Rasa syukur itu dirasakan Sandi saat berkunjung ke Gorontalo pada 7 November 2021 lalu. Saat itu, dia berkesempatan untuk bisa bercengkrama dengan Hiu Paus, yang merupakan salah satu daya tarik wisatawan untuk mendatangi provinsi hasil pemekaran dari Sulawesi Utara tersebut.

Wisata Hiu Paus itu terletak di Teluk Tomini, Pantai Botubarani, Kabupaten Bone Bolango. Hewan laut yang memiliki nama latin *rhincodon typus*

ini kerap muncul di pantai yang menghadap perairan Teluk Tomini. Biasanya hiu pemakan plankton ini muncul ke permukaan untuk mencari makan pada pagi hari dan sore hari.

Keberadaan Hiu Paus ini juga membuat Sandi, tertarik untuk "bercengkrama" dengan ikan yang dapat tumbuh hingga ukuran 20 meter dan berat enam ton ini. Di sela-sela kesibukannya setiap kunjungan kerja, ada satu hal yang pernah dilewatkan, yakni olahraga pagi.



Nah, pada Minggu pagi yang 7 November 2021 lalu, Sandi berniat bersama rombongan bertolak ke Pantai Leato untuk berolahraga pagi. Dari sana, Menparekraf Sandiaga beserta rombongan berlari sejauh 3,2 kilometer menuju Pantai Botubarani.

Sepanjang perjalanan, Sandiaga beserta rombongan disugahi pemandangan hamparan laut biru yang luas dihiasi dengan langit biru nan cerah. Setibanya di Botubarani, rombongan kemudian melakukan pemanasan dan persiapan sebelum terjun ke air untuk snorkeling.

Ditemani petugas dari Pangkalan TNI AL Gorontalo, Sandiaga menumpangi perahu karet yang telah disiapkan untuk terjun ke laut. Tak perlu menunggu lama, Sandiaga bertemu dengan gerombolan hiu paus berjumlah enam ekor.

"Kita melihat keagungan Yang Maha Kuasa bahwa ada sekelompok Hiu Paus berjumlah enam ekor hadir di sini," kata Sandiaga dengan penuh rasa kagum usai snorkeling.

Sandiaga menekankan, wisata ini perlu dinikmati dan dikembangkan dengan menerapkan konsep 3S. Yaitu spirituality, serenity, dan sustainability.

"Spirituality, menghargai kebesaran Allah dengan makhluk-Nya yang perlu kita jaga kelestariannya. S yang kedua adalah serenity, dengan kesunyian, dengan ketenangan, dengan kearifan itu yang harus kita jaga, dan S yang terakhir sustainability, keberlanjutan lingkungan," katanya.

Sandiaga mengungkapkan konsep 3S ini harus dihadirkan di Wisata Hiu Paus Botubarani. Tujuannya agar destinasi wisata ini tetap terjaga keasriannya.

"Komitmennya tadi saya sampaikan bahwa Teluk Tomini ini secara alami menjadi biota yang keberagamannya sangat luas. Jadi komitmen kita di pemerintah pusat dan daerah adalah pariwisata yang berkelanjutan lingkungan, oleh karena itu ini harus dijaga," ungkap Sandiaga.

Konsep pariwisata berkelanjutan ini, lanjut Sandiaga, sesuai dengan pergeseran tren pariwisata dunia. "Dengan terpilihnya Indonesia sebagai Presidensi G20, (tren) pariwisata ini bergerak. Dari yang tadinya berbasis

kuantitas menjadi berbasis kualitas," jelasnya.

Sehingga, dengan adanya pergeseran ini, diharapkan lapangan kerja akan semakin terbuka bagi masyarakat

Gorontalo, khususnya di Bone Bolango. "Kesejahteraan (masyarakat) akan semakin baik khususnya di Kabupaten Bone Bolango, dan di Botubarani," ujar Sandiaga. •





FOTO-FOTO: REPRO

BERJUANG MENGEMBALIKAN DEVISA NEGARA, SEKALIGUS MENAIKKAN BERKALI-KALI LIPAT

Pariwisata selama beberapa tahun terakhir, selalu menjadi penyumbang terbesar devisa negara. Pada 2019 misalnya, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) pariwisata mencapai USD17,6 miliar, atau setara 4,9 persen. Namun, tahun lalu pencapaiannya anjlok, USD3,2 miliar.

Anjloknya pendapatan dari sektor pariwisata menjadi tugas berat yang dipanggul Sandiaga Salahuddin Uno. Lulusan George Washington University ini pun langsung membuat Kerangka Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nasional (RENSTRA) 2020-2024, untuk membantunya mengembalikan devisa negara sekaligus menaikkannya berkali-kali lipat.

"Program-program tersebut bertujuan meningkatkan kontribusi pariwisata, dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional, yang

berbasis kualitas pengalaman pariwisata, pariwisata berbasis ekonomi kreatif, dan nilai tambah ekonomi kreatif," kata Sandiaga.

Sandiaga menyebut ada lima subprogram yang dilaksanakan oleh Kemenparekraf berdasarkan ketiga basis ini. Kelima subprogram itu adalah pengembangan destinasi pariwisata dan produk kreatif, pengembangan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan kreativitas.

terang ayah tiga orang anak ini.

Beberapa program yang menyesuaikan dengan arahan Presiden ini, antara lain dukungan industri pariwisata untuk tenaga kesehatan, program BaLaSa (Bahan Pokok & Lauk Siap Saji), gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Aman), pembuatan konten, gerakan dan ajakan masyarakat, pelaksanaan event virtual, webinar, dan bantuan modal bisnis melalui kebijakan fiskal dan moneter melalui relaksasi pajak dan lain sebagainya.

Hingga saat ini, Kemenparekraf terus berupaya meningkatkan keseimbangan penyediaan dan permintaan di sektor parekraf. Dengan demikian, Kemenparekraf dapat memanfaatkan fase pandemi COVID-19 untuk memperbaiki sisi penyediaan di sektor parekraf.

Caranya melalui persiapan destinasi wisata, implementasi dan monitoring protokol kesehatan CHSE di daerah. Selain itu, Kemenparekraf juga menciptakan atraksi dan membangun daya tarik wisata, peningkatan kualitas SDM parekraf, peningkatan kuantitas dan kualitas produk ekraf, dan stimulus industri pariwisata melalui koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

Dengan rencana kerja yang lebih tersistematis, Sandi optimistis sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, mampu berkontribusi terhadap PDB naik menjadi 10-12 persen

dalam 5-10 tahun ke depan. Setidaknya, target 7,3 persen, mampu tercapai.

"Selama ini kita kan selalu memasang target berapa banyak jumlah wisatawan yang hadir ke Indonesia. Saya ingin mengubah target itu dari quantity menjadi quality. Kami juga tidak mau hanya mengandalkan kepada wisatawan mancanegara tapi juga harus menambah jumlah wisatawan nusantara," ujar mantan Ketua Umum Hipmi tersebut.

Setidaknya ada dua kampanye nasional, agar target tersebut tercapai, yaitu Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia. Kemenparekraf juga perlu berkolaborasi dengan sejumlah pihak termasuk dengan media untuk bisa kembali membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Selain itu, Sandi menambahkan pemerintah memiliki lima destinasi Bali baru yang diharapkan bisa mempercepat pemulihan industri pariwisata. "Jadi lima Bali baru ini tidak mengambil kuenya Bali tapi justru untuk memperbesar jumlah wisatawan sehingga bisa memperbesar kontribusi

Untuk mendukung tujuan utama tersebut diperlukan beberapa aspek penunjang utama seperti kajian kepariwisataan dan ekonomi kreatif, regulasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif nasional, adopsi teknologi informasi dan komunikasi secara tepat guna, dan reformasi birokrasi Kemenparekraf.

"Selain itu, langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Kemenparekraf adalah mempersiapkan tatanan kenormalan baru di sektor parekraf, mempersiapkan destinasi atau yang lain, dan membangun kepercayaan publik, meningkatkan minat wisatawan dan menciptakan daya tarik,"



Triawan Munaf



sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDB," jelasnya.

Sandi optimistis kebangkitan industri pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun ini akan membantu pemulihan ekonomi nasional. "Bringing back tourism means bringing back economy. Karena industri pariwisata itu adalah beacons of hope yang bisa membuka peluang tenaga kerja. Saya berharap semua destinasi wisata sudah menjalankan dengan ketat protokol kesehatan se-



Arief Yahya

hingga wisatawan tidak ragu lagi untuk berlibur," jelasnya.

Minta Masukan Pendahulu

Untuk mengembalikan sektor pariwisata dan meningkatkan ekonomi kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno tak bisa bekerja sendiri. Dia pun kerap berdiskusi dengan banyak pihak, terutama Arief Yahya dan Triawan Munaf, yang lebih dulu berkecimpung di sektor ini.

Secara khusus, Sandi mengajak Arief Yahya dan Triawan Munaf dalam talk show di acara Pekan Puncak Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) 2021 yang berlangsung di Gandaria City, Jumat (10/12/2021) malam.

Pembahasannya mengenai tantangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pascapandemi COVID-19. Menparekraf Sandiaga sebelumnya bercerita kepada Arief Yahya dan Triawan Munaf tentang program AKI 2021 yang sudah terselenggara di 16 kota. Dan pada Pekan Puncak AKI 2021 ini, Kemenparekraf/Baparekraf



menghadirkan UMKM ekonomi kreatif terbaik dari 16 kota.

“Program ini kita buat untuk membangkitkan lagi ekonomi Indonesia, di tengah situasi COVID-19, melalui peningkatan kapasitas dan publisitas para pelaku ekonomi kreatif. Dimana terdapat beberapa sektor yang ditampilkan seperti kuliner, kriya, fesyen, digital (animasi, permainan, aplikasi), film, dan musik. Ini sesuai dengan RPJMN 2020–2024,” kata Sandiaga.

Sandiaga mengatakan, AKI 2021 menjadi salah satu program Kemparekraf yang diharapkan tepat sasa-

“Bringing back tourism means bringing back economy. Karena industri pariwisata itu adalah beacons of hope yang bisa membuka peluang tenaga kerja.

ran, tepat manfaat, juga tepat waktu. Ini adalah bukti program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu.

“Program ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Kita harapkan (penciptaan lapangan kerja) akan menuju ke base line tahun ini dan tahun depan penciptaan lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif akan kembali ke angka sebelum pandemi,” ujar Sandiaga.

Sementara itu, Arief Yahya menjelaskan, sektor pariwisata sebagai alat penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), devisa, dan lapangan kerja yang paling mudah dan murah. Penilaian ini merupakan perbandingan dari mahalnnya biaya investasi negara yang harus dikeluarkan untuk peningkatan sektor migas.

“Dulu Presiden Jokowi menanya-



kan ke saya, apa core economy bangsa kita? Tegas saya menjawab secara konsisten bahwa core economy bangsa kita adalah pariwisata dan ekonomi kreatif,” katanya.

Arief Yahya menjelaskan sektor pariwisata bisa menjadi harapan bangsa Indonesia, bahwa indeks daya saing

kepariwisataan Indonesia terus membaik dan menembus peringkat 42 besar dunia tahun 2017, dari 135 negara yang diranking oleh World Economic Forum. Sedangkan salah satu pilarnya menembus 20 besar dunia, yaitu alam dan sumber daya budaya.

“Di sisi manufacturing kita tidak bisa

mengalahkan China, karena banyak produk made in China, kemudian negara yang sukses dengan industri kreatifnya, salah satunya Korea, dimana industri kreatifnya lebih tinggi daripada manufacturing. Sementara kita yang punya modal pariwisata dan creative culture industry kemungkinan bisa

menang di sektor tersebut dengan negara-negara lainnya,” katanya.

Sementara itu, Triawan Munaf menjelaskan, Sektor ekonomi kreatif di era Menparekraf Sandiaga ini adalah masa terberat, anggaran difocusing untuk penanganan COVID-19, kedua adalah keterbatasan dari transportasi atau

pergerakan orang selama pandemi.

“Terkait UU Ekonomi Kreatif yang telah disahkan itu diperlukan untuk menguatkan ekosistem industri kreatif terlebih pascapandemi. Lantaran UU itu menjadi payung hukum bagi para pelaku ekraf untuk menjalankan usahanya kedepan,” ujarnya. ●

Kaleidoskop Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif SETAHUN SANDIAGA UNO GASPOL

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) punya tugas membawa Indonesia bisa bangkit dari dampak COVID-19. Terutama setelah ditunjuknya Sandiaga Uno sebagai nakhoda baru menggantikan Wishnutama.

Bersama Angela Tanoesoedibjo sebagai wakilnya, Bang Sandi bergerak dengan gesit untuk membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif di Tanah Air. Jargon pun sudah disiapkan Sandi untuk mengatasi dampak pandemi, yakni Gercep (gerak cepat), Geber (gerak bersama) dan Gaspol (garap semua potensi yang ada).

Menjelang 2021 berakhir, Info Indonesia mencoba merangkum sejumlah kebijakan Kemenparekraf dalam membangkitkan pariwisata nasional.

JANUARI

Pada awal tahun ini, Kemenparekraf menekankan aspek Cleanliness, Health, Safety dan Environmental Sustainability (CHSE) dapat diterapkan dengan baik di seluruh tempat wisata maupun penginapan di seluruh Indonesia.

Sandi mengajak se-

luruh pihak berkolaborasi menjadikan 2021 sebagai kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal itu sebagai upaya membuka lapangan kerja selebar-lebarnya.

Satu per satu diwujudkan Kemenparekraf dengan konsisten melakukan kolaborasi, yang bersamaan dengan strategi kebijakan yang dianggap mampu mewujudkan segala harapan tersebut.

FEBRUARI

Kemenparekraf berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan kebijakan terkait visa jangka panjang yang memungkinkan wisatawan asing dapat tinggal di Indonesia hingga 5 tahun.

Sandi berharap kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas pariwisata. Hal tersebut berdasarkan potensi satu miliar warga dunia yang berusia 60 tahun ke atas memiliki pendapatan lebih dari USD1,5 triliun, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk berbelanja dan berwisata lebih lama.

Visa berkonsep long term stay second home selama 5 tahun tersebut diketahui memiliki syarat tertentu. Salah satunya, wisatawan mancanegara harus melakukan deposit uang senilai Rp2 miliar. Wisatawan mancanegara yang membawa keluarga harus menyetor deposit senilai Rp2,5 miliar.

MARET

Kemenparekraf bersama Kementerian Luar Negeri mempersiapkan penerapan Travel Corridor Arrangement (TCA). Saat itu pihaknya menginisiasikan pembukaan TCA di Batam, Bintan, dan Kepulauan Riau, yang diharapkan akan menggeliatkan lapangan kerja dan kebangkitan ekonomi.



Pada bulan yang sama, Sandi melakukan kunjungan ke Likupang, Minahasa Utara untuk memastikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa hidup. Sandi melihat Likupang cocok untuk menggelar kegiatan Meeting, Incentive, Exhibition dan Event (MICE).

APRIL

Sandiaga mengumumkan bahwa wisatawan domestik mengalami peningkatan hingga 50 persen dari angka normal sebelum pandemi. Sepanjang April, jumlah turis domestik per hari mencapai 4.500 kedatangan per hari. Angka tersebut meningkat dari target Kemenparekraf sebesar 3.600 orang per hari.

"Di masa pandemi, destinasi wisata kita harus bertransformasi agar lebih berkualitas dan berkelanjutan," ujar Sandi.

MEI

Kemenparekraf memastikan pelaku usaha di sektor wisata mendapatkan dana hibah senilai Rp3,7 triliun yang di-

anggarkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.

Dana hibah tersebut diperluas untuk pelaku usaha di sektor biro perjalanan pariwisata. Sehingga penerima dana hibah mengacu pada data pajak hotel, restoran dan hiburan, hingga pajak penghasilan dan pertambahan nilai untuk usaha biro perjalanan wisata.

Saat itu, Sandi berharap mereka yang telah menerima stimulus agar mampu meningkatkan kemampuan dan siap menghadapi tren pariwisata di era pasca-pandemi.

JUNI

Kemenparekraf mematangkan kesiapan destinasi dan infrastruktur yang diklaim menjadi tolok ukur dalam menentukan kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satu caranya dengan mengoptimalkan teknologi untuk mengurangi kontak fisik (cashless payment, informasi digital) serta menekankan CHSE.

Di bulan yang sama, Kemenparekraf juga mendukung pengemasan cerita

dari berbagai event lewat program "Spirit of Indonesia" yang penyelenggaraannya berkolaborasi dengan National Geographic sebagai strategi promosi.

JULI

Kemenparekraf mengeluarkan kebijakan Work From Bali (WFB). Kebijakan itu dikeluarkan seiring dengan tren kunjungan wisatawan nusantara yang datang ke Bali mencapai 7.500 orang, atau meningkat tiga kali lipat dibanding Januari sebanyak 2.500 orang.

AGUSTUS

Kemenparekraf memberikan Tanda Kehormatan Satyalancana Kepariwisata kepada lima orang, yakni (Alm) Ida Pedanda Gede Ngurah Karang (Bali), Tjokorda Gde Putra Artha Astawa Sukawati (Bali), Nuryanto (Jawa Tengah), Yohan Tangke Salu (Sulawesi Selatan), dan Suhardi (Sulawesi Selatan).

Mereka dinilai punya jasa besar dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bi-

dang kepariwisataan, yang dibuktikan dengan fakta konkret lebih dari lima tahun secara terus-menerus.

Sandi juga memaparkan alokasi anggaran Kemenparekraf 2021, di mana dalam realisasinya mengalami realokasi dan refocusing sebanyak empat kali. Sehingga, pagu anggaran yang awalnya berjumlah Rp4.907.148.382.000 direalokasi hingga tersisa Rp2.880.366.582.000 atau 58,7 persen dari total pagu awal.

"Realokasi ini dilaksanakan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Ang-

gembangan wisata kesehatan (wellness tourism). Sandi menganggap wisata kesehatan menjadi program unggulan untuk memberdayakan wisatawan nusantara. Sandi memperluas cakupan wisata kesehatan di sejumlah daerah, seperti Jakarta, Medan, hingga Bali.

"Ini adalah pariwisata berbasis quality and sustainability dan kita tidak kalah dengan rumah sakit di luar negeri. Misalnya di RS Eka Hospital, untuk perawatan tulang belakang/spine, sudah menggunakan alat kedokteran

donesia diminta untuk disiplin protokol kesehatan.

Kemenparekraf juga menyediakan asuransi kesehatan bagi wisatawan mancanegara yang nilainya mencapai Rp1 miliar.

"Pemerintah telah menetapkan dua premi asuransi kesehatan bagi wisman. Yakni, asuransi kesehatan dengan premi Rp800 ribu dan Rp1 juta. Premi ini memiliki nilai tanggungan maksimal Rp1,6-2 miliar dengan masa berlaku 30-60 hari. Jadi, apabila wisman tidak memiliki asuransi di negara

NOVEMBER

Wakil Menparekraf Angela Tanoe-soedibjo, menyoroti kerentanan pekerja perempuan di sektor seni dan kreatif. Angela menegaskan Kemenparekraf berpihak pada perempuan di industri seni kreatif.

Dia mengakui banyak hal yang harus dikerjakan ke depan, termasuk jaminan pekerja perempuan dalam dunia seni. Sehingga menjadi pijakan awal dan dorongan bagi kebijakan dan program pemerintah.

"UU Ekonomi Kreatif memang tidak

World Superbike (WSBK), yang dinilai telah menciptakan multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB).

DESEMBER

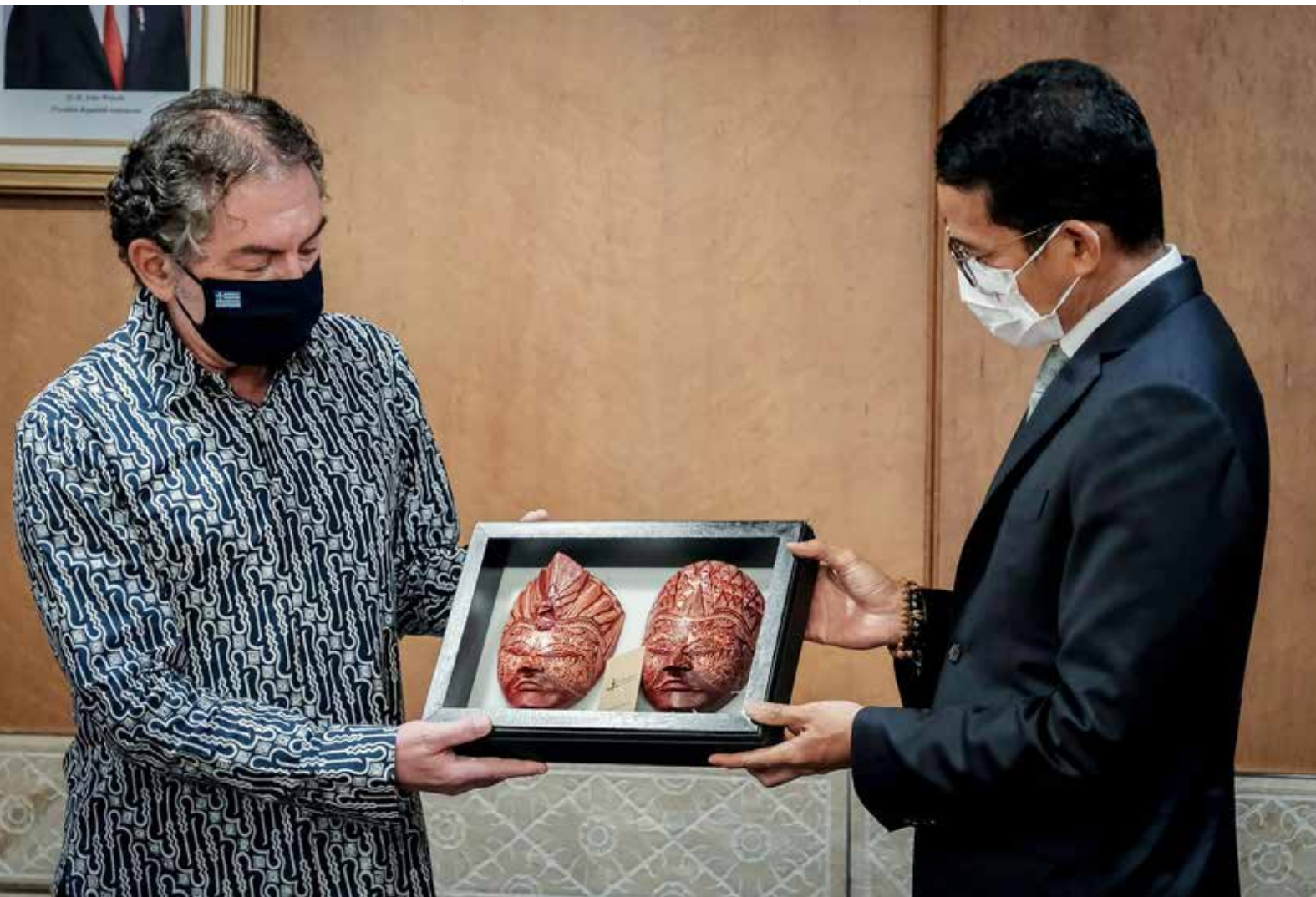
Sandi mengatakan Kemenparekraf tengah mendalami kerja sama bilateral dengan Yunani dalam menggarap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Yunani telah menjadi tujuan wisata dan daya tarik utama di Eropa sejak tahun 1970-an karena memiliki kekayaan budaya dan sejarah. Sehingga

demi.

"Ada ratusan ribu dan jutaan (lapangan kerja) dalam ekosistem penerbangan ini yang tersentuh dengan kehadiran Garuda. Jadi, saya akan all out untuk mengupayakan bagaimana Garuda ini bisa kita dukung dalam melakukan restrukturisasi," kata Sandi.

Sandi juga fokus dalam mengembangkan sektor pariwisata dengan menyoroti Bantuan Pemerintah untuk Usaha Pariwisata (BPUP), di mana penrimanya adalah 550 pelaku usaha pariwisata. BRI juga telah membukakan



garan (DIPA) yang ditetapkan pada 25 Februari 2021, 31 Mei 2021, 28 Juli 2021, dan 16 Agustus 2021. Total pagu anggaran yang mengalami realokasi dan refocusing adalah Rp2.026.781.800.000 atau sekitar 41,3 persen," jelas Sandi.

SEPTEMBER

Kemenparekraf mendorong pe-

buatan Jerman yang merupakan satu-satunya di Asia Tenggara," ujar Sandi.

OKTOBER

Bandara I Gusti Ngurah Rai resmi dibuka pada 14 Oktober untuk perjalanan internasional. Saat itu, Kemenparekraf menekankan fokus kesehatan dan keselamatan. Wisatawan mancanegara maupun masyarakat In-

asal, mereka bisa membeli asuransi saat tiba di Indonesia," katanya.

Kemenparekraf juga memperkuat link and match antara pendidikan dan pelatihan vokasi di Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata (PTNP) yang berada di bawah naungan Kemenparekraf, untuk disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia pada industri pariwisata.



secara spesifik berbicara tentang situasi pekerja perempuan. Dengan masuk hari ini, menjadi langkah awal bersinergi merumuskan kebijakan yang bisa menjawab kebutuhan pekerja perempuan sebagai penguatan ekosistem ekonomi kreatif," ujarnya.

Kemenparekraf juga menobatkan Aceh sebagai Kota Kreatif Indonesia 2021.

Bulan November juga ada event

ga menjadikannya sebagai destinasi wisata unggulan.

Begitupun sebaliknya, Indonesia juga kaya dengan adat istiadat, budaya yang kental dengan kearifan lokal, serta ekonomi kreatif yang mumpuni.

Pada akhir tahun ini, Kemenparekraf membawa optimisme dalam pemulihan maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang terdampak akibat pan-

rekening massal untuk usaha pariwisata penerima BPUP.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan sisi kepatuhan, dan kami akan melacak jika ada pelaku yang mengajukan bantuan ke dua kementerian sekaligus. Harapannya agar kegiatan kita tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu," ujar Sandi. •



PENGHARGAAN DARI PEMPROV UNTUK PAHLAWAN SUMSEL

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada tenaga kesehatan dan berbagai pihak yang telah berkontribusi dan berjuang menangani COVID-19 di Bumi Sriwijaya.

Melalui pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, saat ini angka penyebaran COVID-19 di Sumsel terus melandai.

Penghargaan juga diberikan kepada tenaga kesehatan yang gugur saat menjalankan tugasnya dalam membantu penanganan COVID-19 di Sumsel.

Gubernur Sumsel Herman Deru memberikan secara simbolis penghargaan tersebut pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-57 Tahun 2021 yang dilaksanakan di Din-

ning Hall Jakabaring Sport City Palembang, Rabu (8/12/2021).

Pria yang akrab disapa HD ini menegaskan, sejak awal penanganan COVID-19 di Sumsel dilakukan secara masif. Penerapan protokol kesehatan, termasuk testing, tracing, dan treatment (3T) gencar dilakukan. Sehingga perkembangan penanganan wabah tersebut cukup baik.

"Upaya penanganan COVID-19 di Sumsel ini kami lakukan secara gotong royong. Artinya, ini merupakan keberhasilan bersama," kata HD.

HD menyatakan, bukan hanya pen-

erapan protokol kesehatan dan 3T, upaya pemberian vaksinasi kepada masyarakat juga terus digalakkan. Hal itu dilakukan untuk mencapai target herd immunity atau kekebalan komunal yang telah ditetapkan pemerintah.

"Vaksinasi juga dilakukan secara gotong royong, sehingga target vaksinasi sebesar 50 persen pada akhir November 2021 ini terlampaui. Upaya ini tentunya harus terus dilakukan," terangnya.

Untuk mencapai target kekebalan komunal 70 persen populasi penduduk yang divaksinasi, HD menyebut Pemprov Sumsel siap membantu kabupaten dan kota dalam pemberian vaksinasi tersebut ke masyarakat.

"Animo masyarakat untuk divaksin ini sudah sangat tinggi. Namun, memang ada yang aktif dan ada yang pasif. Maka dari itu, kita harus ubah pola dengan jemput bola. Jadi, masyarakat yang pasif itu kita berikan

vaksin dengan mendatanginya langsung. Apalagi, masyarakat yang ada di pelosok yang mungkin agak jauh untuk menuju tempat vaksin," bebernya.

Mantan bupati OKU Timur ini menambahkan, dengan melandainya angka penyebaran COVID-19 saat ini, tentunya menjadi kabar baik bagi



masyarakat Sumsel. Namun, dia mengajak masyarakat untuk tetap disiplin protokol kesehatan, sehingga semua aktivitas, termasuk ekonomi bisa dilakukan dengan normal.

"Kita telah mendapatkan berkah dengan melandainya COVID-19 ini, sehingga saat ini kita bisa melakukan aktivitas dengan cukup normal. Semua pihak tanpa terkecuali harus menerapkan prokes ini," imbuhnya.

Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Lesty Nurainy, menjelaskan, perkembangan COVID-19 di Sumsel saat ini

sangat baik. Dia menyebut, penambahan kasus COVID-19 di Sumsel saat ini tidak lebih 5 kasus per hari.

Terkait vaksinasi, Lesty menjelaskan, hingga akhir November 2021, masyarakat yang sudah mendapatkan dosis pertama mencapai 58,85 persen. Sementara, untuk vaksinasi dosis kedua sudah mencapai 34,94 persen dan dosis ketiga untuk tenaga kesehatan sebesar 72,82 persen.

"Upaya kita untuk membangun Sumsel ini dari sektor kesehatan bisa dikatakan berhasil. Hal itu dibuktikan

dengan meningkatnya harapan hidup masyarakat. Mudah-mudahan hasil positif ini terus tumbuh," ujarnya.

Peringatan HKN ke-57 dengan tema "Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku" merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam penanganan COVID-19, sehingga Indonesia terus tumbuh lebih baik.

HKN di Sumsel juga diisi dengan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan. Herman Deru memberikan sejumlah penghargaan pada sejumlah pihak yang telah berkontribusi dalam

peningkatan pelayanan kesehatan di Sumsel.

Tidak hanya itu, tahun ini, Dinas Kesehatan Sumsel juga dianugrahi 11 penghargaan tingkat nasional atas dedikasinya di sektor kesehatan. Penghargaan itu antara lain, dinas yang aktif melakukan kegiatan pengawasan, pembinaan pada sarana produksi, distribusi alat kesehatan, PKRT dan menyampaikan laporan, tindak lanjut hasil pengawasan tingkat nasional dari Kementerian Kesehatan, penghargaan pelaksanaan dan pembinaan Gerakan

Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) Tingkat Nasional, dan penghargaan sebagai garda terdepan yang memiliki dedikasi tinggi dalam

"Kita telah mendapatkan berkah dengan melandainya COVID-19 ini, sehingga saat ini kita bisa melakukan aktivitas dengan cukup normal. Semua pihak tanpa terkecuali harus menerapkan prokes ini"

penanganan pandemi COVID-19 di masyarakat.

Prestasi itu pula yang saat ini mengantarkan Dinas Kesehatan Sumsel

menangan pada perhelatan Seleksi Tilawatil Quran dan Hadist (STQH) Tingkat Nasional ke-26 Tahun 2021 di Sofifi, Maluku Utara.

Atas keberhasilan tersebut, Bapak Rumah Tahfidz Sumsel, berjanji akan memberikan bonus kepada setiap qari-qariah yang telah mengharumkan nama Sumsel di kancah nasional tersebut.

"Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah berjuang pada STQH. Saya harap meningkat lagi ke depan. Pemerintah memberikan perhatian ini mungkin tidak setimpal atas perjuangan kalian, tapi ini adalah sebuah penghargaan," ucap HD.

Ada tujuh trofi yang berhasil dibawa pulang qori dan qoriah Sumsel pada STQH 2021 Tingkat Nasional di Maluku Utara.

Mereka yang berhasil membawa pulang gelar yakni Ferima Melati (Juara Harapan 3 Cabang Tafsir Bahasa Arab Putri), Selvira Gusti Ayu (Juara Harapan 2 Cabang 500 Hadits Tanpa Sanad), Naimatus Zahra (Juara Harapan 2 Cabang 10 Juz Putri), Huzaifi (Juara Harapan 1 Cabang 10 Juz



sebagai dinas kesehatan terbaik di Indonesia.

Selain tenaga kesehatan, Pemprov Sumsel juga memberikan apresiasi untuk perwakilan Bumi Sriwijaya yang telah berhasil membawa pulang ke-

Putra), Cindy Aulia Wulandari (Juara Harapan 1 Cabang Tilawah Anak Putri), Eva Hafidoturrahmah (Juara Harapan 1 Cabang 30 Juz Putri), dan Medi Hamzah (Juara 3 Cabang Tafsir Bahasa Arab Putra). •

► Sumsel Targetkan Peningkatan Jumlah Pelaku Wirausaha

PELUANG SANGAT TERBUKA, UMKM HARUS NAIK KELAS

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menargetkan adanya peningkatan jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Data terbaru menyebutkan, jumlah UMKM di Bumi Sriwijaya baru mencapai 644.000 unit. Sementara, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64 juta. Artinya, jumlah UMKM

Sumsel hanya berkontribusi sebesar satu persen secara nasional.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengatakan, peran dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk memacu munculnya pelaku baru di

sektor UMKM.

"Terpenting adalah membangun ekosistemnya, sehingga akan muncul UMKM-UMKM baru," kata pria yang akrab disapa HD itu di Palembang, Kamis (9/12/2021).

HD mengatakan, masih sedikitnya jumlah UMKM di Sumsel tak lepas dari keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan cara pandang mengenai bisnis.

Menurutnya, sebagian besar

masyarakat masih enggan merambah profesi sebagai wirausaha karena dinilai kurang menjamin kehidupan, dibandingkan bekerja di sebuah perusahaan atau menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang mendapatkan pendapatan atau gaji bulanan.

"Cara pandang seperti ini yang harus diubah. Untuk itu, saya mengharapkan pelatihan kewirausahaan diperbanyak agar masyarakat tahu bahwa peluang usaha itu banyak sekali," kata dia.

HD mengakui, diperlukan pendanaan untuk menunjang upaya meningkatkan keterampilan calon wirausahawan. Masalahnya, banyak Balai Latihan Kerja (BLK) yang kurang optimal untuk meningkatkan keahlian pelaku usaha.

"Saya harap Bank Indonesia maupun pihak terkait lainnya bisa masuk ke BLK untuk peningkatan kapasitas pelaku usaha," katanya.

HD mengatakan, pada era saat ini, cara berbisnis sudah berubah karena adanya platform digital belanja online.

Untuk semakin menumbuhkan pelaku usaha, HD mengatakan pihaknya akan mengawal dan memastikan pelaku UMKM dapat mengakses modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah.

Pada 2020, Sumsel mampu menyerap seluruh alokasi KUR dari pemerintah senilai Rp4,4 triliun. Yang lebih menggembirakan, rasio kredit macetnya di bawah 1,0 persen.

HD berharap, nantinya semua UMKM di Sumsel bisa melek teknologi dan berhasil menjual produknya hingga kelas ekspor. Sehingga, laju daya saingnya bisa semakin tinggi dan dapat memberikan hasil positif untuk pertumbuhan ekonomi di Sumsel.

"Kita melakukan kurasi beberapa

UMKM Bina Bank Indonesia yang telah memperoleh kurasi dan berpartisipasi dalam pameran, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemarin ada salah satu UMKM di Sumsel untuk kriya bergerak di perhiasan itu mengikuti pameran internasional di Singapura, juga di New York dan juga kopi kita membawa ke pameran internasional di Singapura dan Jepang, sebenarnya kita terus mendorong pelaku UMKM ini," tuturnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel, Hari Widodo, mengatakan, UMKM merupakan salah satu motor penggerak perekonomian. Berdasarkan data statistik, kontribusi UMKM terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) baru sebesar 14,74 persen.

"Artinya, masih ada ruang untuk UMKM agar meningkatkan produktivitasnya, melalui peningkatan kapasitas



produk dan usaha, nilai tambah, serta akses pemasaran,” kata dia.

Hari mengatakan, pelaku UMKM perlu beradaptasi dengan digitalisasi transaksi, sebab metode pembayaran ini telah menjadi pilihan konsumen selama pandemi berlangsung dalam kurun dua tahun terakhir.

BI mencatat, dari total 332.886 merchant (pedagang) yang mengguna-

aktif memasarkan produknya secara daring.

Salah satunya yang dilakukan pelaku UMKM kuliner pempek yang sudah mengirimkan produk makanan khas Palembang itu hingga ke luar kota. Dengan menggunakan sistem pembayaran digital ini membuat potensi pasar yang selama ini hanya di Sumatera Selatan, kini merambah

terkonsentrasi di Kota Palembang yang mencapai 65 persen dari total 332.886 merchant. Beberapa daerah terdata masih minim penggunaan QRIS, seperti Kabupaten Lahat, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Komering Ulu dan Kota Lubuk Linggau.

Untuk mempercepat transaksi digital ini, BI Sumsel membentuk Tim Perce-

pelaku UMUM) untuk lebih meningkatkan produktivitasnya melalui seminar, webinar, pelatihan, hingga pengurusan sertifikasi halal,” jelasnya.

Pihaknya pun telah melaksanakan on boarding UMKM bersama dengan e-commerce. Hal itu dilakukan sebagai upaya mengembangkan pengetahuan bagi UMKM yang ingin menggandeng e-commerce.

“Upaya kita bukan hanya sekadar pelatihan, namun kita juga menggandeng marketplace untuk membantu para pelaku UMKM. Jadi, mereka, para pelaku UMKM, juga didorong untuk membuka usaha di marketplace,” terangnya.

Saat ini, kata dia, ada 170 UMKM

“
OJK sangat mendukung program percepatan dalam penyaluran KUR, sehingga bisa berdampak positif terhadap UMKM di Sumsel.

binaan Bank Indonesia yang sudah bergabung di e-commerce. Pihaknya terus mendorong agar semakin banyak UMKM memanfaatkan peluang tersebut.

Sebagai upaya mendorong meningkatnya UMKM di Sumsel, Bank Indonesia juga gencar melaksanakan even-even yang melibatkan mereka, di antaranya menggelar Semarak UMKM Sriwijaya (Seru Sriwijaya) 2021 pada akhir Oktober lalu.

Kegiatan tersebut merupakan upaya Bank Indonesia dalam mengembangkan UMKM di Sumsel. Dalam kegiatan Seru Sriwijaya, tidak hanya menampilkan produk-produk UMKM di Sumsel,

tapi juga pembentukan karakter building dalam bentuk webinar kepada para pelaku UMKM.

Selain itu, ada juga kegiatan pembentukan karakter building pelaku UMKM dengan Webinar UMKM Go Ekspor bertema Menjadi Andal di Pasar Global.

“Kita ingin mendorong pengembangan UMKM di Sumsel, khususnya produk fesyen, kerajinan/kriya, dan kuliner kepada pasar domestik maupun ekspor, serta sebagai katalisator bagi pelaku usaha industri kreatif dalam meningkatkan kualitas produk sesuai trend pasar, sekaligus mendorong peningkatan nilai tambahnya,” jelas Hari.

Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi

penyaluran KUR. Tujuannya yakni mempermudah para pelaku UMKM dalam mengakses KUR di mana saja dan kapan saja. Diharapkan ke depan ekonomi kita tumbuh dan segera pulih kembali setelah dilanda pandemi COVID-19,” ujar Mawardi saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Rabu (8/12/2021).

Hal senada diungkapkan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumbagsel, Untung Nugroho. Menurutnya, kedatangan ke OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara untuk mencari referensi dalam rangka membangun website atau aplikasi KUR yang dapat diakses oleh masyarakat.

“Isinya website itu tentu informasi

kan QR Code, diketahui 90 persen merupakan UMKM. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code untuk mendorong transaksi nontunai.

“Jadi, jangan underestimate (meremehkan) dulu, ternyata pelaku UMKM sudah terbiasa dengan sistem pembayaran secara digital,” kata dia.

Bukan hanya pembayaran digital, kata dia, pelaku UMKM juga terbilang

hingga ke seluruh Tanah Air.

“Kami sempat berdiskusi dengan asosiasi pempek, saat ini mereka malahan sedang mengupayakan dapat menjual ke luar negeri. Tapi masih mencari teknologinya agar makanan ini bisa tahan lama,” kata dia.

Hari tak membantah bahwa pemanfaatan digital payment di Sumsel belum merata karena terkait pengetahuan dan infrastruktur. Namun, saat ini sudah terakselerasi lantaran adanya pandemi.

Saat ini implementasi QRIS masih

patan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di 17 kabupaten/kota di Sumsel serta satu TP2DD tingkat provinsi.

Hari menjelaskan, pihaknya terus berupaya mendongkrak pelaku UMKM yang telah melakukan berbagai upaya untuk naik kelas. Upaya yang telah dilakukan di antaranya melalui peningkatan kapasitas produk dan usaha, nilai tambah, serta akses pemasaran.

“Bank Indonesia ini berfungsi sebagai fasilitator bagi UMKM, kami memberikan ruang bagi mereka (para



Yahya, mengatakan, pihaknya terus berupaya melakukan terobosan-terobosan guna memberikan percepatan dan kemudahan dalam menyalurkan KUR kepada pelaku UMKM dengan membangun website TPAKD KUR Sumsel.

Wagub mengatakan, pihaknya belajar dari Bali yang sudah menerapkan sistem penyaluran KUR yang sangat baik, sehingga sangat tepat untuk menjadi referensi dan bisa diterapkan di Sumatra Selatan.

“Pemprov Sumsel juga berencana akan membangun TPKAD KUR Sumsel.id dalam rangka percepatan

tentang bagaimana mendapatkan KUR, caranya dan fitur-fitur lain. Ini tentu dapat memudahkan masyarakat,” ujarnya.

Untung mengatakan pihaknya menargetkan website KUR Sumsel bisa beroperasi pada tahun 2022.

Menurut dia, OJK sangat mendukung program percepatan dalam penyaluran KUR, sehingga bisa berdampak positif terhadap UMKM di Sumsel.

“Sudah menjadi program di tahun 2022, mudah-mudahan nanti tercapai dan sesuai dengan harapan kita semua,” ujarnya. ●

PERSIAPAN NATARU MENCEGAH KLAS TER BARU

► Pemprov Sumsel Keroyokan Capai Vaksinasi 70 Persen

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempersiapkan diri untuk menghadapi libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 atau Nataru yang masih dalam suasana pandemi COVID-19.

Sesuai arahan pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Pada Saat Nataru, kebijakan pembatasan atau pengetatan mobilitas masyarakat diserahkan kepada pemerintah daerah.

Gubernur Sumatera Selatan, Her-

dahnya tidak terganggu, silaturahmi juga tetap berjalan dan keselamatan jiwa tetap terjaga. Artinya, bagaimana Nataru ini membahagiakan bagi pengikutnya, tapi tidak ada klaster baru," kata HD.

HD juga mengingatkan agar masyarakat Sumsel tidak abai dalam menjalankan protokol kesehatan menjelang perayaan Nataru yang tinggal

Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, yang ditujukan untuk mengatur mobilitas masyarakat," terang HD.

Dalam merumuskan aturan tersebut, kata dia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu aturan tidak mengurangi kemeriahan umat beribadah, namun tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Pencegahan yang utama terletak pada kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker selama beraktivitas, menghindari kerumunan, dan menjaga kehygienisan.

"Poinnya itu jangan sampai kondisi penyebaran COVID-19 di Sumsel, khususnya Palembang, yang sudah melandai ini kembali meningkat. Lalu jangan mengurangi kemeriahan umat beribadah," ujarnya.

Masyarakat yang tidak memiliki kepentingan maupun kewajiban pada saat Nataru juga diimbau untuk beraktivitas di rumah.

"Sangat mungkin ini ada klausul yang mengatakan Natal dan tahun baru di rumah saja. Tapi saya belum terima drafnya. Kalau Sumsel berhasil tidak ada lonjakan atau klaster baru saat Natal dan tahun baru ini, maka itu berhasil seperti arahan pemerintah pusat," ujar ia.

"Sesuai dengan arahan Presiden pada libur Natal dan Tahun Baru 2022 tidak diadakan penyekatan. Namun orang yang bepergian harus dalam keadaan sehat, dengan cara memastikan status vaksinasi yang bersangkutan dan hasil tes usap," sambungnya.

Dalam Inmendagri 66/2021, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur, bupati dan wali kota untuk mempercepat vaksinasi COVID-19, terutama terhadap kelompok lanjut usia (lansia). Vaksinasi dosis

kedua harus mencapai 48,57 persen dan dosis pertama 70 persen pada akhir Desember 2021 berdasarkan target masing-masing daerah.

HD menyampaikan, capaian vaksinasi di Sumsel hingga 12 Desember 2021 sudah mencapai 61,28 persen untuk dosis pertama dan 36,70 persen untuk dosis kedua.

Terkait hal tersebut, HD meminta agar pemerintah daerah di 17 kabupaten/kota di Sumsel untuk dapat mempercepat proses vaksinasi di daerah masing-masing. Sehingga mempercepat Sumsel dalam mencapai target 70 persen vaksinasi di akhir tahun ini.

"Saya minta Forkopimda kabupaten/kota untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan proses vaksinasi. Kita juga harus membuat skema khusus agar pelaksanaan vaksinasi dapat dilakukan secara maksimal, serta mempercepat tercapainya herd immunity di sumsel," kata HD.

HD menyebut berada di wilayah yang bertopografi perbukitan dan perairan merupakan salah satu faktor yang menghambat percepatan ketercapaian vaksinasi COVID-19 di Sumsel.

Dia menyatakan, seharusnya di awal Desember capaian vaksinasi COVID-19 di Sumsel sudah mencapai target 70 persen dari total 6,3 juta target sasaran vaksinasi. Namun, saat ini baru mencapai 61,28 persen atau hanya 3,8 juta orang target vaksinasi yang menyelesaikan vaksin dosis pertama.

Karena itu, setiap bupati/wali kota beserta jajarannya diinstruksikan untuk segera mengambil langkah taktis memecahkan hambatan tersebut.

Dengan harapan sebelum memasuki 2022 vaksinasi COVID-19 di Sumsel sudah 70 persen.

Ia menegaskan untuk mendapatkan kesamaan komitmen mencapai target vaksinasi tersebut, setiap bupati/wali kota diminta untuk menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Forkopimda Sumsel.

"Itu harapannya daerah-daerah yang capaian vaksinasinya masih rendah bisa membuat improvisasi dengan berbagai ritme apa saja supaya mereka bisa mempercepat vaksinasi ini,"

ujarnya.

Apabila memang kabupaten/kota membutuhkan stimulasi, baik secara pelaksanaan teknis ataupun pendanaan, Pemprov Sumsel siap untuk mendukungnya.

"Kami akan mendukung, yang penting bisa terselesaikan vaksinasi ini. Bahkan, contohnya TNI sudah melatih personelnya untuk menjadi juru vaksin bila memang kabupaten/kota kekurangan tenaga," ujarnya.

Dinas Kesehatan Sumatera Selatan menyatakan, pasokan vaksin COVID-19 untuk Sumsel naik dari 300 ribu menjadi 600 ribu dosis per bulan. Meski belum masuk jumlah ideal, stok vaksin yang banyak dapat menjawab antusiasme masyarakat untuk divaksinasi.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Sum-

sel, Ferry Yanuar, mengungkapkan, idealnya kebutuhan vaksin di Sumsel 1,5 juta dosis per bulan. Angka itu berdasarkan perhitungan jumlah sasaran, target, dan persentase yang belum divaksin.

"Seperti kalau level PPKM mengharuskan pendatang melakukan tes usap antigen, petugas harus menanyakan hasil tes tersebut dengan seksama demi keselamatan bersama juga," kata Yusri.

Menurutnya, pengelola juga diwajibkan menyediakan layanan pemindaian barcode PeduliLindungi sebagai langkah konkret pelaksanaan skrining sebagaimana yang diinstruksikan pemerintah. •



man Deru, berharap momen libur Nataru kali ini tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Bumi Sriwijaya.

Pada rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan Nataru di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Senin (13/12/2021), pria yang akrab disapa HD ini menyampaikan, momen Nataru nanti agar tidak mengurangi nilai-nilai ibadah dan silaturahmi serta keselamatan jiwa.

"Jadi, saya minta agar proses beriba-

dua pekan lagi.

"Meski kasus COVID-19 melandai, kita jangan lalai dan tetap menerapkan prokes dalam menjalankan aktivitas sehari-hari," ujarnya.

HD menyatakan sudah memerintahkan jajarannya untuk mempersiapkan peraturan pengendalian mobilitas masyarakat untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di akhir tahun.

"Sudah saya perintahkan Biro Hukum merancang draf aturan perayaan



sel, Ferry Yanuar, mengungkapkan, idealnya kebutuhan vaksin di Sumsel 1,5 juta dosis per bulan. Angka itu berdasarkan perhitungan jumlah sasaran, target, dan persentase yang belum divaksin.

"Sekarang vaksin didrop cukup banyak, rata-rata 600 ribu per bulan, itu sudah cukup bagus," ungkap Ferry, Senin (13/12/2021).

Ferry mengatakan, selama ini pasokan vaksin menjadi kendala dalam mengejar target kekebalan komunal pada awal tahun depan. Tingginya mi-

masyarakat berekreasi pada libur akhir tahun.

"Seperti kalau level PPKM mengharuskan pendatang melakukan tes usap antigen, petugas harus menanyakan hasil tes tersebut dengan seksama demi keselamatan bersama juga," kata Yusri.

Menurutnya, pengelola juga diwajibkan menyediakan layanan pemindaian barcode PeduliLindungi sebagai langkah konkret pelaksanaan skrining sebagaimana yang diinstruksikan pemerintah. •



UMKM JATENG BANGKIT DENGAN GO DIGITAL

► Ganjar Pranowo Gandeng Marketplace Pasarkan Produk Unggulan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk terus bangkit dan berkembang. Sektor UMKM terbukti menjadi salah satu pendongkrak ekonomi di tengah pandemi COVID-19.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, terus membuktikan komitmennya untuk mendukung kemajuan pelaku UMKM di wilayahnya. Beragam cara

ditempuh agar UMKM di Jateng semakin dikenal luas.

Komitmen memajukan UMKM Jawa Tengah juga dilakukan Ganjar Pranowo dengan menggandeng salah satu mar-

ketplace besar di Tanah Air, yakni GoTo, yang dirangkai dalam acara "Bangkit Bersama Jawa Tengah".

Ganjar memberikan apresiasi atas tingginya kepedulian dari pemilik mar-

ketplace tersebut terhadap UMKM. Apalagi, kerja sama sebelumnya juga sudah pernah dilakukan. Ganjar berharap, UMKM di Jateng makin percaya diri untuk terus maju.

"Pengalaman-pengalaman selama ini sudah mendorong mereka untuk bisa punya metode baru dalam berjualan dan ternyata menjual melalui marketplace, apalagi yang sudah unicorn begini, ternyata cepet banget," kata Ganjar di Valle Pizza E Resto, Semarang, Kamis (9/12/2021).

Dalam acara tersebut, hadir sejumlah UMKM di Jawa Tengah yang telah merasakan langsung peningkatan penjualan di tengah pandemi karena bergabung dengan marketplace. Antara lain Patrobas, Heritage Brass, Mbok Berek, bahkan toko kelontong lestari, yang mengaku penjualannya meningkat drastis dan terbantu pemasarannya, karena tak

harus pergi ke pasar.

"Kita akan dorong untuk UMKM kita agar mereka menggunakan cara ini, dengan digital marketing, agar mereka bisa tersebar ke mana-mana. Sambil nanti kita dampingi, mereka bisa kita latih," kata Ganjar.

Ganjar mengatakan, dari produk-produk UMKM yang sudah membuktikan tersebut, diharapkan bisa jadi inspirasi bagi pelaku usaha lainnya untuk lebih percaya diri.

"Ini menarik sekali, mudah-mudahan banyak menginspirasi para pebisnis muda, yang tua juga boleh. Artinya punya semangat untuk tetap berusaha bisa eksis dan banyak jalan yang bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan di tengah pandemi. Pesan saya tetap jualan, jangan mengeluh, maju terus," harap Ganjar.

Pada acara tersebut, selain bertemu

sejumlah UMKM Jawa Tengah yang merasakan langsung peningkatan penjualan lewat marketplace, Ganjar juga sempat berjualan lewat Live Sale yang ditayangkan oleh Tokopedia melalui platform-nya.

Ganjar didampingi mantan vokalis Band Naif, David Bayu, dengan luwesnya memamerkan produk-produk dari UMKM. Tak hanya sepatu, Ganjar memamerkan produk rumah tangga, seperti sarung bantal, aksesoris, hingga makanan dan minuman.

CEO dan Founder Tokopedia, William Tanuwijaya, mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM lokal, termasuk di Jawa Tengah, melalui digitalisasi agar dapat menjadi juara di negeri sendiri.

"Di Tokopedia, kami akan terus mengembangkan UMKM lokal melalui berbagai pelatihan dan pendampingan,

memberikan panggung untuk promosi dan ekspansi pasar, serta menghadirkan solusi melalui teknologi untuk meningkatkan skala bisnis,” kata William.

“Kami mengusung berbagai inovasi dengan pendekatan hyperlocal, misal etalase yang dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah untuk mendekatkan pembeli dengan penjual terdekat. Ini demi memberikan UMKM lokal di seluruh penjuru Indonesia punya kesempatan yang sama untuk bertumbuh. Jadi tidak perlu pindah ke ibu kota untuk menjadi juara,” tambahnya.

Menurutnya, potensi pertumbuhan UMKM Jateng masih sangat besar. Di Tokopedia, kata dia, peningkatan rata-rata transaksi UMKM Jateng mencapai hampir 1,5 kali lipat pada kuartal III

usaha di ekosistem GoTo mencapai lebih dari 11 juta dan hampir seluruhnya UMKM lokal.

“Mengingat UMKM adalah penyokong ekonomi nasional, kolaborasi dengan para mitra strategis, termasuk pemerintah daerah, sangat penting guna mendorong produk UMKM lokal semakin juara di negeri sendiri,” ujar Komisaris Tokopedia, Wishnutama.

Wishnutama mengatakan, Jawa Tengah dipilih secara khusus karena dinilai punya potensi UMKM yang sangat luar biasa.

“Pak Gubernur juga proaktif, jadi kini gayung bersambut. Segala sesuatu kalau enggak dapat dukungan kan repot, kebetulan Pemprov juga sangat proaktif. Dan setelah bersatu ini potensinya lebih luar biasa lagi, untuk dimanfaatkan

menarik yang dapat membuat belanja masyarakat akan produk dari UMKM Jateng bisa lebih efisien.

Saat menerima kunjungan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi, Ganjar membicarakan terkait kerja sama kebudayaan dan UMKM. Bahkan, Ganjar sempat menjadi salesman atau agen pemasaran untuk memamerkan dan mempromosikan produk UMKM unggulan Jawa Tengah.

“Saya mendukung Pak Dubes di Tunisia untuk bisa mendorong atau apa yang menjadi pesan Presiden. Hari ini yang ingin kita dorong untuk meningkatkan itu tentu kami sangat berbahagia,” kata Ganjar usai pertemuan di rumah dinas Gubernur Jateng Puri Gedeh, Rabu (8/12/2021).

Di hadapan Gus Mis, Zuhairi Misrawi,

dang-gadang menjadi pasar baru ekspor UMKM Jawa Tengah yang selama ini sudah merambah ‘pasar tradisional’ ekspor seperti Amerika, China hingga Eropa.

“Hari ini kita mencoba mencari pasar-pasar. Ini sebenarnya pasar baru. Rata-rata kan pasar tradisional. Pasar tradisional ke mana sih, ya Amerika, Tiongkok. Kita coba sekarang cari di Tunisia. Timur Tengah bukan tidak mungkin, mungkin sekali karena punya relasi. Relasi yang jauh punya sejarah, apalagi Tunisia. Di Tunisia kalau sebut Bung Karno, tidak ada yang tidak tahu. Sejarahnya ada,” paparnya.

Zuhairi Misrawi mengaku sangat senang atas pertemuannya dengan Ganjar. Ganjar disebut sebagai sosok pemimpin yang punya optimisme dan keyakinan dengan

pamerkan Ganjar.

“Karena produknya sangat banyak dan sudah layak untuk dipasarkan. Nah, sekarang kita tinggal bangun took, outlet-outlet, sehingga seluruh produk UMKM itu bisa kita langsung jual,” ujarnya.

Sementara itu, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jawa Tengah juga menyusun strategi untuk membangkitkan UMKM pada 2022. Salah satu rencana yang akan dilakukan adalah dengan menggencarkan promosi digital dan berkolaborasi dengan pemerintah melakukan penguatan sumber daya manusia.

Ketua Dekranasda Jawa Tengah, Atikoh Ganjar Pranowo, mengatakan, ada tujuh strategi kolaborasi yang akan dilakukan tahun depan. Jika penyebaran

Bank Indonesia, Bank Jateng, Indonesian Fashion Chamber (IFC), dan lainnya. Kerja sama juga akan dilakukan dengan Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah, dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah.

Atikoh menambahkan, kebijakan dari Pemprov Jateng juga diharapkan mengontrol penjualan produk UMKM kriya. Di antaranya, izin usaha melalui Online Single Submission. Adapula kebijakan yang mewajibkan pengadaan barang dan jasa pemerintah menggunakan produk UMKM sebesar 40 persen.

“Di Jawa Tengah hal itu ditempuh melalui Blangkon Jateng. Ini ditempuh



2021 dibanding kuartal III 2020. Jumlah penjual Jateng di Tokopedia juga bertumbuh hampir 1,5 kali lipat. Transaksi GoSend di sisi lain tumbuh 20 persen pada Agustus 2021 dibanding 2020, sedangkan transaksi GoFood melonjak 125 persen.

“Lewat gerakan #BangkitBersama yang menggunakan pendekatan hyperlocal, kami berharap bisa memperkuat kontribusi Grup GoTo terhadap pemulihan ekonomi,” ujar CEO GoTo dan GoTo Financial, Andre Soelistyo.

Andre menjelaskan, selama pandemi lebih dari empat juta mitra usaha bergabung di ekosistem Tokopedia, Gojek maupun GoPay. Kini total jumlah mitra

UMKM di Jateng untuk lebih maju,” kata mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut.

Dijelaskan, gerakan #BangkitBersama mencakup berbagai program untuk meningkatkan kapasitas UMKM Jateng dari sisi produksi, pemasaran, branding hingga pengembangan usaha. Misalnya, Sekolah Kilat Seller (SKS), Kelas Inkubasi UMKM GoTo bersama UNS dan berbagai pelatihan rutin yang dilaksanakan dengan berbagai dinas di tingkat kota, provinsi serta kabupaten di Jawa Tengah.

Terdapat juga halaman khusus Kumpulan Toko Pilihan (KTP) Semarang dan Solo dengan berbagai penawaran

Ganjar tanpa basa-basi langsung memamerkan sejumlah produk UMKM yang ada di ruang tamunya. Mulai dari produk makanan dan minuman hingga produk UMKM yang telah dibina oleh Pemprov Jateng.

Selain UMKM, obrolan keduanya juga membahas sektor-sektor lain yang berpotensi tinggi untuk dikerjasamakan. Misalnya pendidikan, seni budaya, pariwisata hingga olahraga.

“Mudah-mudahan nanti bisa kontak, karena kebetulan kalau di partai kita rapat bareng-bareng seperti tadi disampaikan itu Bu Mega concern banget sama UMKM,” katanya.

Ganjar mengatakan, Tunisia digar-

semangat gotong royong serta Pancasila dalam memajukan Jawa Tengah.

“Jawa Tengah mempunyai produk-produk UMKM unggulan dan tadi sudah dijelaskan oleh pak gubernur. Maka, kalau ekspor UMKM ini kita terus tingkatkan, kita berdayakan, maka akan membantu ekonomi masyarakat yang paling bawah. Jadi, ini pertemuan dua sahabat tetapi untuk Indonesia yang maju, tumbuh dan tangguh,” kata dia.

Dia mengatakan, salah satu program yang jadi misinya adalah membuka outlet di Tunisia sebagai tempat memasarkan produk UMKM. Dia pun makin bersemangat untuk mewujudkannya setelah melihat produk UMKM yang di-

wabah COVID-19 semakin mereda, upaya pameran online pun akan ditempuh untuk memperkenalkan kerajinan asal Jateng.

Atikoh mengatakan, strategi yang akan ditempuh di antaranya meningkatkan kemampuan SDM dan promosi lewat platform YouTube. Kemudian, akan ada pameran offline yang rencana diikuti, seperti Pameran Ina Craft, Jateng Fair, dan UKM Roadshow ke Makasar. Selain itu, pameran juga dilakukan pada galeri UKM dan Dekranasda di Bandara Ahmad Yani Semarang maupun Yogyakarta International Airport Kulonprogo.

Atikoh menyebut, kolaborasi akan menggandeng beberapa pihak seperti

Pemprov Jateng dengan menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 4 Tahun 2021. Ini mendorong pemda melibatkan pengusaha mikro kecil dalam pengadaan barang dan jasa,” sebut Atikoh.

Di samping itu, kata Atikoh, pelatihan terhadap UMKM fesyen pun terus digenjut karena potensinya cukup kuat di Jawa Tengah, seperti melatih perajin mendesain kain menjadi pakaian siap pakai. Dengan pembuatan pakaian ready to wear, diharapkan bisa mengangkat harga produk perajin.

“Saya juga ingin Jawa Tengah menjadi salah satu ikon fesyen di Indonesia, karena kita cukup lengkap miliki ragam batik dan tenun,” terangnya. ●





BELANJA DAERAH STIMULUS EKONOMI RAKYAT

► Serapan Anggaran Sumatera Selatan Tertinggi Kedelapan Nasional

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengklaim penyerapan anggaran hingga November 2021 mencapai 72,9 persen. Angka tersebut menjadikan Sumut sebagai provinsi dengan serapan anggaran tertinggi secara nasional.

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, menjelaskan, serapan anggaran Sumut periode kali ini juga lebih tinggi daripada realisasi anggaran 2020

yang hanya mencapai 55 persen. Hal itu menempatkan Sumut di posisi ke-20 di akhir tahun secara nasional.

Apa yang disampaikan Edy Rahmayadi untuk menjawab Presiden Joko Wido-

do yang memerintahkan jajaran menteri, kepala lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi APBN dan APBD agar dapat memberikan stimulus perekonomian bagi masyarakat.

Presiden juga meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mencermati realisasi APBD. Mendagri harus menekankan kepada kepala daerah bahwa realisasi APBD sangat penting untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi, khususnya di daerah.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menegaskan, serapan anggaran daerah merupakan salah satu yang menjadi perhatian. Hal itu dikatakan Edy kala melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Langkat dan Kota Binjai akhir November lalu.

Edy menyebut, hingga 23 November 2021, serapan anggaran belanja dua daerah tersebut masih kurang memuaskan. Serapan anggaran Kabupaten Langkat masih berada pada posisi 57,36 persen, sementara Kota Binjai masih berada pada 61,94 persen.

"Harusnya di bulan November ini su-

“
Saya meminta pada seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar dapat melaksanakan dengan tertib seluruh anggaran sesuai dengan rancangan peraturan UU.

dah berada di 90 persen, pertumbuhan perekonomian bergantung pada perputaran uang yang dikeluarkan,” kata Edy Rahmayadi saat bertemu dengan kepala desa dan Pemerintah Kota Binjai di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Veteran Binjai, Selasa (30/11/2021).

Edy meminta Pemkab Langkat dan Pemkot Binjai agar tahun 2022 tidak terjadi lagi hal seperti itu. Ia meminta agar pada 1 Januari 2022, proses tender segera dilakukan. Sehingga semua pekerjaan atau proyek bisa dikerjakan paling cepat di April atau Mei.

Edy juga menyebut dirinya tidak terlalu memahami tentang pengaruh serapan anggaran di awal kepemimpinannya pada 2018 lalu.

Dia bilang, di tahun kedua menjabat baru mengetahui tentang dampak yang ditimbulkan mengenai serapan anggaran, termasuk inflasi dan deflasi. Apalagi,

deflasi dan inflasi menjadi salah satu indikator dalam perhitungan upah minimum provinsi (UMP) setiap tahunnya.

"Tahun kedua di pertengahan saya mulai mengerti, paling tidak baru sedikit tahu, sampai kemarin mohon maaf saya mulai mengerti, walaupun saya tak pandai. Tapi paling tidak nilai matematika saya sembilan itu, jadi tak terlalu lama untuk mempelajari hal ini," kata Edy, Selasa (14/12/2021).

Sementara itu, Edy juga merasa optimis pertumbuhan ekonomi di Sumut

bisa tumbuh sebesar 2,4 persen pada 2022 mendatang. Hal itu disampaikan usai Pemprov dan DPRD mengesahkan APBD Sumut 2022 sebesar Rp 12,1 triliun, 29 November 2021 lalu.

Menurutnya, prediksi ini dilihat dari pulihnya beberapa sektor ekonomi yang didukung telah melandainya pandemi COVID-19 di Sumut.

"Sebelum rapat ini, saya juga telah rapat dengan pakar ekonomi di Sumut, di antaranya Perwakilan Bank Indonesia Sumut, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), pengamat,

pendidik serta lainnya, yang menyampaikan 'angin segar' untuk mencapai target pada 2022. Ekonomi kita diprediksi akan segera pulih diiringi semakin terkendalnya COVID-19," kata Edy.

Edy mendorong seluruh jajaran untuk memaksimalkan program-program pembangunan yang sudah disepakati bersama DPRD itu.

"Saya meminta pada seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar dapat melaksanakan dengan tertib seluruh anggaran sesuai dengan rancangan

peraturan UU," katanya.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebelumnya juga sudah menegur sejumlah pemerintah daerah di Sumatera Utara mengenai serapan APBD yang masih rendah.

Mendagri menyebut, ada delapan daerah di Sumut dengan serapan APBD yang masih di bawah 50 persen. Realisasi belanja daerah yang masih di bawah 80 persen menjelang akhir tahun juga jadi sorotan.

Berdasarkan data Kemendagri, realisa-

si belanja Pemprov Sumut masih Rp9,51 triliun dari total anggaran Rp13,9 triliun. Sedangkan, jumlah realisasi penerimaan pendapatan, baik dari dana transfer pemerintah pusat dan penerimaan asli daerah masih 79,35 persen.

"Di sini kita bisa lihat gap pendapat dan belanja. Sumut 79,35 persen, sedangkan realisasi belanja 68,28 persen. Ini artinya masih ada celah fiskal lebih kurang 11 persen, ini yang mungkin perlu digenjut 11 persen ini," ujar Tito, 24 November 2021.

Mantan Kapolri itu menyebut, serapan anggaran yang masih rendah akan berpengaruh terhadap belanja daerah.

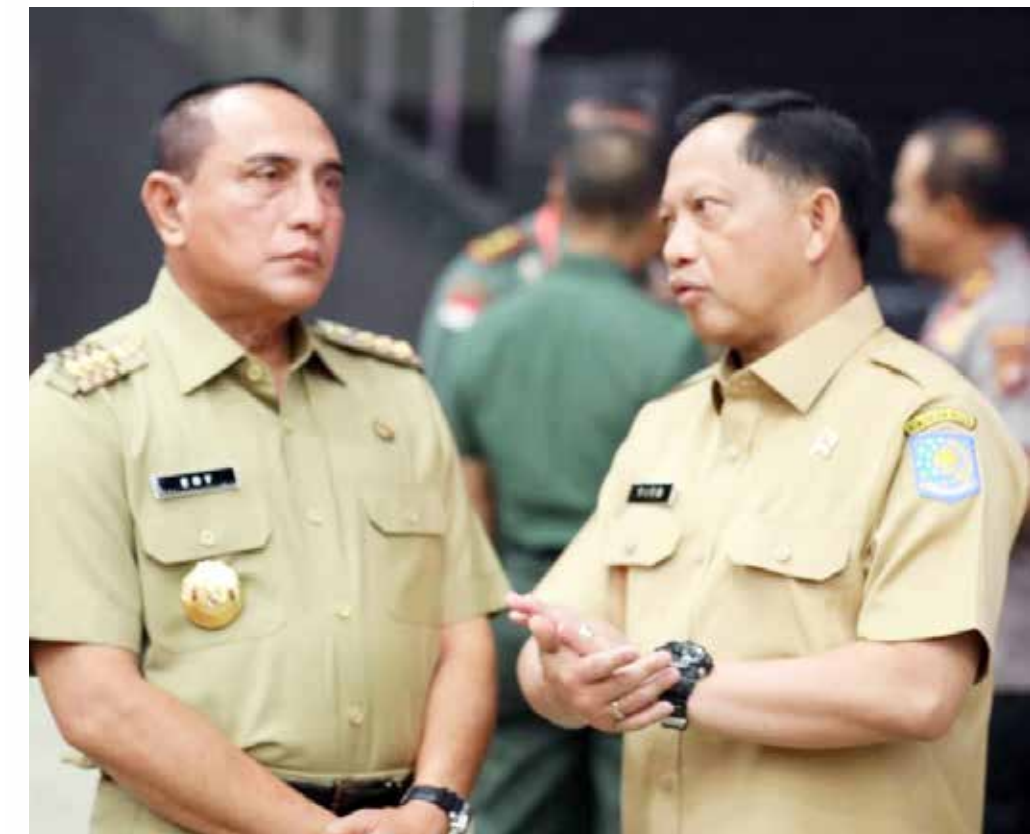
Ada beberapa daerah yang disebut yakni Kabupaten Labuhanbatu Selatan

vember dan Desember," ungkapnya.

Rendahnya penyerapan anggaran itu, lanjut dia, menunjukkan adanya uang yang tertahan atau belum sampai ke masyarakat. Padahal, belanja pemerintah menjadi salah satu andalan dalam meningkatkan akselerasi ekonomi di tengah pandemi.

Tito pun meminta agar pemerintah daerah segera mempercepat penyerapan anggaran pada dua bulan tersisa di akhir tahun ini. Pemerintah tidak menginginkan APBD yang ada justru lama mengendap di perbankan dan tidak diberdayakan untuk mendorong perekonomian.

Pemberdayaan ekonomi melalui realisasi belanja APBD diakuinya saat ini



sebesar 49,62 persen, Kabupaten Mandailing Natal 49,40 persen, Kabupaten Nias 49,22 persen, Kota Sibolga 46,92 persen, Kota Medan 46,22 persen, Kota Tanjungbalai 45,37 persen, Kota Pangsidiempuan 44,98 persen dan Kabupaten Karo 43,54 persen.

"Saya mau atensi teman-teman wali kota dan bupati, masih ada beberapa daerah yang belanja nya di bawah 50 persen, ada 45 persen ini menunjukkan bahwa ada uang yang tertahan, mudah-mudahan akhir tahun mulai dibayar No-

menjadi tulang punggung utama pertumbuhan ekonomi. Termasuk pengembangan UMKM.

"Target dari Presiden, kita tahun ini empat persen, perekonomian rata-rata lima persen, sehingga pertumbuhan ekonomi lima persen. Ini hanya bisa dibangun dengan kekompakan pusat dan daerah, tidak bisa hanya pusat saja, semua daerah 548 daerah harus membelanjakan dan mengedarkan uangnya, peredaran uang di masyarakat sekaligus juga swasta," tegasnya. •



Presiden Joko Widodo menandatangani baja produk terbaru saat meresmikan pabrik Hot Strip Mill 2 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Kota Cilegon, Banten, Selasa (21/9/2021). (Biro Pers Media Setpres/Agus Suparto)

► Transisi Energi Bukan Retorika

DIMULAI DARI KALTARA, UNTUK SELAMATKAN DUNIA

Kerusakan lingkungan yang mengendap, hingga potensi timbulnya konflik sosial-ekonomi menyadarkan pentingnya Indonesia beralih ke pemanfaatan energi bersih. Ketimbang bergantung terus menerus terhadap energi fosil.

Transisi energi dari fosil ke energi bersih, adalah keniscayaan bagi Indonesia, pun dunia. Sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas tak dapat dipungkiri telah menopang kegiatan masyarakat selama ini. Namun ketergantungan pada energi fosil bagaikan menanam bom waktu bagi kehidupan generasi penerus.

Pembakaran energi fosil, telah melepaskan emisi karbon yang berkontribusi pada pencemaran udara, pemanasan suhu global, dan peningkatan permukaan air laut.

Dunia, termasuk Indonesia, menghadapi ancaman kerusakan lingkungan yang sudah tampak. Seperti cuaca ekstrem yang memicu banjir dan longsor, angin siklon, kekeringan, hingga

kenaikan permukaan air laut yang memicu abrasi di pesisir yang terjadi di sejumlah daerah.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terhitung sejak 1 Januari 2021 hingga 30 Oktober 2021, telah terjadi 2.203 bencana alam di Indonesia.

Rinciannya yakni 891 musibah banjir, 587 musibah puting beliung dan

406 musibah tanah longsor. Berbagai musibah ini menyebabkan 6,63 juta orang menderita dan mengungsi, 13.031 orang luka-luka, 549 orang meninggal dunia dan 74 orang hilang. Tak kurang dari 134.587 rumah mengalami kerusakan.

Rangkaian musibah tersebut menunjukkan kerusakan dan ketidakseimbangan lingkungan hidup. Selain itu, alam yang rusak dengan sumber daya yang semakin menipis telah menimbulkan potensi konflik karena melaburnya jurang ketidakadilan sosial-ekonomi.

Alarm telah menyadarkan dunia, untuk tidak menunda-nunda transisi energi. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, mempunyai utang kebijakan dari Perjanjian Paris 2015 untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030, demi mengerem kenaikan suhu global tak mencapai 2 derajat celsius dan jika

memungkinkan 1,5 derajat celsius di atas suhu praindustri.

Namun dalam enam tahun berjalan sejak Perjanjian Paris, komitmen yang dibuat oleh negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca diyakini tidak cukup untuk mencegah pemanasan global melebihi 1,5 derajat celsius. Hal itu terungkap dalam Konferensi Tingkat Tinggi COP26 di Glasgow, Skotlandia, awal November 2021 lalu.

Untuk itu, salah satu hal penting dari deklarasi KTT COP26 Pakta Iklim Glasgow adalah kesepakatan agar setiap negara wajib memperkuat target penurunan emisi gas rumah kaca pada pertemuan iklim akhir 2022 di Mesir. Kekayaan Energi Bersih

Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebelum melawat ke tiga negara akhir Oktober 2021 lalu, menjanjikan bahwa Indonesia tidak akan mengikuti retorika yang tak dapat dijalankan dalam upaya mengantisipasi dampak

perubahan iklim. Presiden menyebut, Indonesia akan terus melangkah maju merealisasikan komitmennya. Indonesia akan mengembangkan industri energi bersih, membangun pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara, mengoptimalkan energi baru terbarukan, dan membangun kawasan industri hijau terbesar di dunia.

Oleh sebab itu, pada bulan depan, Indonesia akan memulai pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara (Kaltara) yang mengandalkan energi terbarukan dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan dengan produksi listrik 11.000-13.000 megawatt.

Kini, daya tarik investor telah bergeser. Para penanam modal lebih tertarik dengan produk ramah lingkungan yang dihasilkan dari industri hijau. Karena itu, menurut Presiden, sudah banyak investor yang mengantre untuk menanamkan modalnya di Green

Industrial Park Kaltara.

Selain Sungai Kayan, pemerintah juga akan mencoba mengembangkan energi terbarukan dengan sumber tenaga air dari Sungai Mamberamo, Papua yang diperkirakan mampu menghasilkan 24 ribu megawatt.

"Indonesia ini memiliki 4.400 lebih sungai besar dan sungai sedang. Kalau 4.400 sungai ini dilarikan ke hidro power, kita bisa bayangkan," kata Jokowi.

Selain energi terbarukan dari air, Indonesia juga memiliki kekayaan energi terbarukan dari panas bumi hingga 29 ribu megawatt.

"Belum urusan (energi terbarukan) angin, bayu. Urusan arus bawah laut, gede banget, belum bisa ngitung yang ini. Inilah kekuatan yang harus kita sadari dan segera kita manfaatkan untuk ke depan, anak cucu kita. Kekuatan ini yang ingin kita siapkan," ujar Jokowi.

Dengan kekuatan besar energi bersih dan semakin sempitnya tenggat waktu untuk meninggalkan energi fosil, Presiden mengatakan strategi transisi energi harus mulai ditata dan dilaksanakan.

Menurut data Kementerian ESDM, potensi energi bersih di Indonesia adalah, surya sebesar 3.294,4 gigawatt; air 94,6 gigawatt; bioenergi 56,9 gigawatt; angin 154,9 gigawatt; panas bumi 23,7 gigawatt; dan laut 59,9 gigawatt.

Sedangkan porsi energi bersih yang baru dimanfaatkan saat ini hanya sebesar 10.889 megawatt. Terdiri dari surya 194 megawatt, air 6.432 megawatt, bioenergi 1.923 megawatt, angin 154 megawatt, dan panas bumi 2.186 megawatt.

Selain potensi energi terbarukan, beragam potensi energi baru yang ada juga masih belum banyak diketahui. Seperti uranium untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Rencana Besar

Saat ini, pasokan energi di Indonesia masih didominasi sumber daya fosil, yakni batu bara sebesar 67 persen, minyak atau bahan bakar 15 persen, dan gas 8 persen. Hal tersebut memperlihatkan masih dominannya penggunaan energi fosil di tengah kekayaan melimpah energi bersih yang

dimiliki Indonesia.

Presiden Jokowi telah memerintahkan dua BUMN raksasa di sektor energi yakni PT Pertamina Persero dan PT PLN Persero untuk membuat rencana besar (grand design) transisi energi.

"Ini yang harus mulai disiapkan, mana yang bisa digeser ke hidro, mana yang bisa digeser ke geotermal, kemudian mana yang bisa digeser ke surya, mana yang bisa digeser ke bayu," ujar Jokowi.

Transisi energi ini juga dibutuhkan untuk merealisasikan salah satu tujuan besar negara yakni untuk mewujudkan ketahanan energi dan menghapus ketergantungan pasokan impor energi sehingga dapat mengurangi defisit neraca transaksi berjalan.

"Goal (tujuan) besarnya adalah negara ini akan memperoleh keuntungan dalam bentuk neraca pembayaran kita yang sudah berpuluh tahun kita tidak bisa selesaikan karena masalahnya impor minyak kita terlalu besar sekali," kata Presiden.

Namun, pemerintah menyadari transisi ke energi bersih membutuhkan biaya yang mahal. Tak mungkin pemerintah menutupi pembiayaan itu dengan APBN yang masih mengalami defisit, ataupun pendanaan BUMN.

Lebih sulit lagi, jika

pemerintah membebaskan pembiayaan pengembangan energi bersih ke harga yang dijual ke konsumen karena bisa mengguncang stabilitas sosial dan politik.

"Ramai nanti, karena kenaikannya tinggi sekali. Wong (tarif listrik) naik 10-15 persen saja demonya tiga bulan," kata Presiden.

Negara-negara maju, yang menikmati paling banyak manfaat ekonomi dari energi fosil, pernah berkomitmen akan membantu pembiayaan untuk transisi energi hingga USD100 miliar. Realisasi dari komitmen itu masih ditunggu.

Negara yang mengikuti KTT COP 26 awal November 2021 lalu, mendesak negara-negara maju segera memberi kejelasan atas komitmen mereka untuk menyediakan dana.

"Tahun ini dibicarakan lagi yang skemanya juga belum ketemu. Dijanjikan USD100 miliar, tapi keluarnya dari mana juga belum ketemu," terang dia.

Presiden Jokowi telah menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencari skema terbaik dari sisi harga dan keberlanjutan industri dalam program transisi energi.

Pengembangan energi hijau merupakan salah satu strategi besar ekonomi dan bisnis negara yang kerap disampaikan Presiden Jokowi. Dengan sederet permasalahan yang ada, Indonesia memang tak bisa hanya mengandalkan jargon atau retorika dalam transisi energi, melainkan harus bersungguhsungguh. Perlu ada peta jalan yang jelas, insentif untuk masuknya pendanaan, infrastruktur untuk menarik investasi hijau, hingga dukungan politis agar terjadi akselerasi. Mengingat pentingnya transisi energi di tengah usia bumi yang semakin tua, kon-

tribusi seluruh pihak sangat dinanti untuk mewariskan lingkungan yang sehat bagi generasi penerus.

Belum Bisa Tinggalkan Migas

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, meski Indonesia mengebut porsi energi baru terbarukan, dan beralih dari energi fosil ke energi bersih, namun tidak bisa meninggalkan industri migas. Sebab, kata dia, Indonesia masih butuh gas sebagai sumber energi alternatif sepanjang masa transisi energi.

Arifin melihat kondisi kebutuhan gas masih penting bahkan dikancah internasional tergambar dari pergerakan investasi. Hari ini, kata Arifin investasi EBT memang meningkat tajam, namun investasi di sektor hulu migas juga tetap bertumbuh meski tidak signifikan seperti dulu.

"Industri hulu migas tidak ditinggalkan begitu saja kok. Masih ada pertumbuhan meski memang tidak signifikan dahulu," ujar Arifin, Senin (29/11).

Arifin mengingatkan industri hulu migas berkontribusi pada peningkatan ekonomi. Selain menyumbang penerimaan negara, sektor hulu migas juga membantu kinerja sektor penunjang seperti perbankan hingga perhotelan.

"Setiap 1 miliar dolar investasi di hulu itu berdampak 1,6 kali untuk industri penunjangnya," kata Arifin.

Industri hulu migas juga menjadi penyokong pada masa transisi ke energi hijau. Sebagai catatan, pemerintah berencana mengganti konsumsi gas masyarakat dari liquified petroleum gas (LPG) atau gas minyak cair menjadi Dimethyl Ether (DME).

Melihat hal itu, Arifin menilai potensi lapangan migas baik konvensional dan nonkonvensional perlu digali. Proses tersebut, sambung Arifin, tidak sederhana dan membutuhkan dukungan serta kerja sama semua pihak.

Selain itu, industri hulu migas juga harus dikembangkan dengan mempertimbangkan keberlanjutan. Dalam hal ini, teknologi maju dan ramah lingkungan harus digunakan. Dengan demikian, peningkatan produksi migas tetap sejalan dengan inisiatif rendah karbon dan target emisi nol pada 2060 yang menjadi komitmen Indone-

sia dalam Konferensi Iklim COP26 beberapa waktu lalu.

"Saya berharap industri hulu migas tetapi berkomitmen untuk tetap mendukung industri migas dengan cara kerja yang baru dan tanggung jawab penuh pada sustainability dan pengembangan low carbon initiatives," ujarnya.

Daerah Siapkan SDM

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Yansen TP mengatakan, sebelumnya sudah pernah dilakukan diskusi bersama dengan Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang terkait pembentukan kerangka untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, terkait pembangunan Green Industrial Park.

"SDM ini sangat penting untuk dipersiapkan untuk menangkap peluang kerja. Oleh karena itu, sekolah-sekolah yang ada di Kaltara ini harus bisa memiliki visi ke arah itu," dilansir dari Radar Kaltara.

Yansen menyebutkan, ke depan pemerintah daerah harus bisa menyiapkan tenaga-tenaga terampil, sehingga bisa merebut peluang untuk menjadi tenaga kerja yang akan terbuka di provinsi termuda Indonesia ini.

"Ini kalau kita lihat ke depan. Kan sekarang ini sudah ada minat investasi, bahkan saat ini sudah ada yang berproses," kata pria yang juga menjabat Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat ini.

Dijelaskannya, seperti PLTA, Untuk di Kaltara ini

terdapat empat titik rencana pembangunan, yakni di Sungai Mentarang satu titik, di Sungai Kayan dua titik dan di Sungai Bahau satu titik. "Ini merupakan potensi besar. Dan ini baru kita lihat dari satu sisi pengembangan di Kaltara," sebutnya.

Sementara, selain PLTA, tentu juga masih ada peluang investasi lain seperti pengembangan pada sektor pertanian, peternakan, kelautan termasuk sektor pariwisata dan lain sebagainya.

"Jadi saya kira peluang ini akan sangat terbuka, utamanya dari sisi tenaga kerjanya. Jika ini bisa terbangun, saya yakin bahwa tidak akan ada lagi kemiskinan di Kaltara ini," tegasnya.

Karena, jika berbicara soal kemiskinan itu adalah berbicara masalah kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya beberapa mega proyek yang akan beroperasi di Kaltara nantinya, tentu kesempatan kerja bagi masyarakat akan terbuka lebar.

"Seperti PLTA dan KIPI (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional), misalnya. Untuk jika sudah operasional, tentu akan membutuhkan ratusan ribu karyawan. Nah, harapannya minimal setengah dari kebutuhan itu bisa diterima dari internal Kaltara," bebernya.

Oleh karena itu, siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) beserta para mahasiswa harus mempersiapkan diri sejak dini. Ini bisa dicapai dengan upaya satuan pendidikan dalam menciptakan kecakapan dan keterampilan peserta didiknya.

"Ini sangat penting, karena kita berharap nantinya orang-orang kita tidak hanya jadi tenaga kasar, melainkan harus bisa masuk pada posisi-posisi strategis," pungkasnya. •



Menteri ESDM,
Arifin Tasrif



Wakil Gubernur Kaltara, Yansen TP



ANGGARAN DAERAH JANGAN DIBIARKAN MENGANGGUR

► **Tito: APBD Dukung Ekonomi Nasional**

Serapan anggaran pemerintah daerah menjadi perhatian serius Kementerian Dalam Negeri menjelang berakhirnya tahun 2021. Pasalnya, berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, dana pemerintah daerah yang mengendap di bank hingga 24 November 2021 mencapai Rp226 triliun. Angka tersebut naik dari Oktober yang jumlahnya Rp170 triliun.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, kembali mengingatkan pemerintah daerah agar mempercepat realisasi belanja yang masih tersisa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Tito mengingatkan agar dalam satu bulan terakhir tahun ini agar bisa memaksimalkan capaian target belanja yang sudah di APBD 2021.

Mantan Kapolri ini menegaskan, percepatan realisasi belanja APBD merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo. Realisasi belanja APBD juga

berperan mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional, layaknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mendagri menjelaskan, belanja daerah akan mendorong bertambahnya jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat, yang akan berdampak ter-

hadap peningkatan daya beli dan konsumsi rumah tangga.

"Selain itu, belanja APBD juga dapat menstimulus dunia usaha atau pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19," kata Tito, Selasa (7/12/2021).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, hingga 25 November 2021, total belanja daerah secara nasional dalam tiga bulan terakhir, September, Oktober, November, mencapai Rp814,54 triliun atau 64,52 persen.

Angka tersebut tercatat masih di bawah total belanja daerah secara nasional pada 2020 dalam kurun waktu yang sama, yaitu sebesar Rp837,18 triliun atau 67,98 persen.

Dijelaskan, untuk belanja provinsi tahun 2021 tercatat Rp270,58 triliun atau 69,59 persen, atau masih di bawah belanja provinsi tahun 2020 sebesar Rp258,05 triliun atau 70,70 persen.

Kemudian, belanja kabupaten pada 2021 tercatat sebesar Rp444,02 triliun atau 62,58 persen, atau masih di bawah belanja kabupaten pada 2020 yang mencapai Rp474,34 triliun atau 66,92 persen.

Sementara, realisasi belanja kota pada 2021 baru mencapai Rp99,94 triliun atau 60,89 persen. Capaian tersebut juga masih di bawah belanja pada 2020 yang mencapai Rp104,79 triliun atau 66,41 persen.

Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menjelaskan, realisasi belanja daerah pada 2019 sebesar Rp1.170,79 triliun atau 90,29 persen. Kemudian, realisasi belanja daerah 2020 senilai Rp1.021,26 triliun atau 82,69 persen. Sementara, rata-rata realisasi belanja daerah pada 2021 hingga 2 Desember yakni senilai Rp853,67 triliun atau 67,19 persen.

"Angka tersebut masih di bawah total belanja rata-rata tahun anggaran 2020 per 30 Desember, karena angka itu adalah data per 2 Desember 2021. Selisih tersebut disebabkan perhitungan realisasi 2021 datanya per 2 Desember, sementara 2020 datanya 30 Desember 2020," tuturnya.

Agus menjelaskan, provinsi dengan

realisasi belanja yang berada di atas rata-rata nasional hingga 2 Desember, yakni Jawa Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur dan Maluku.

Untuk kabupaten, daerah dengan realisasi belanja di atas rata-rata kabupaten yakni, Kabupaten Bogor, Bojonegoro, Bengkalis, Tuban, Kotawaringin Barat, Kutai Timur, Malinau, Jember, Lamandau, Kulonprogo, Pati, Kubu Raya, Jombang, Boyolali, Sleman, Kudus, Mimika, Blitar, Tanah Laut, dan

gan peraturan perundang-undangan.

"Selain itu, beberapa kegiatan juga belum selesai karena masalah teknis, seperti pembangunan jalan karena pembebasan lahan yang belum selesai," tuturnya.

Dia menyebut terdapat sejumlah solusi untuk mengatasi realisasi anggaran tersebut. Untuk jangka pendek, pemda dapat mendorong setiap organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan langkah inovatif dan kreatif dengan tetap berpedoman pada peraturan.

Kemudian, mempercepat realisasi penggunaan anggaran kesehatan, termasuk penanganan pandemi



Madiun.

Sementara, kota dengan belanja daerah di atas rata-rata belanja kota yakni, Kota Metro, Ternate, Lhokseumawe, Bima, Sukabumi, Tanjung Pinang, Banda Aceh, Tidore Kepulauan, Mataram, Payakumbuh, Batam, Kotamobagu, Palangkaraya, Denpasar, Pangkal Pinang, Semarang, Langsa, Pandang Panjang, Jayapura, dan Banjar Baru.

Menurut Fatoni, terdapat sejumlah faktor yang mendorong rendahnya penyerapan belanja pada akhir tahun. Antara lain, tagihan dari pihak ketiga yang baru disampaikan pada akhir tahun. Kemudian, adanya kegiatan gagal lelang atau putus kontrak atau terjadi penundaan bayar, karena diberikan kesempatan 50 hari kalender sampai dengan pekerjaan selesai sesuai den-

COVID-19, sarana dan prasarana kesehatan, dan bidang kesehatan lainnya yang prioritas. Pemda juga diharapkan merealisasikan belanja tidak terduga, seperti bantuan sosial.

Selain itu, pemda juga didorong mempercepat penyelesaian pencairan insentif tenaga kesehatan di daerah yang terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Serta mempercepat penyelesaian pembayaran atas tagihan belanja pengadaan barang/jasa sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan dan termin terakhir sesuai perjanjian dengan pihak ketiga.

Dengan upaya-upaya optimalisasi tersebut, Fatoni berharap realisasi belanja daerah 2021 dapat terus meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya.

Fatoni juga memaparkan sejumlah strategi jangka panjang agar peny-

erapan belanja pemda lebih optimal. Dia menyebut pemda bisa melakukan pengadaan dini atas pengadaan barang/jasa yang sudah bisa dimulai pada Juli/Agustus tahun sebelumnya, atau sebelum APBD 2022 ditetapkan.

Pemda juga wajib menyiapkan jadwal subkegiatan yang dikaitkan dengan anggaran kas final dan didukung dengan tersedianya dana di kas daerah.

Setelah itu, pemda harus membentuk Tim Asistensi dan Evaluasi Penyerapan Anggaran, yang dipimpin sekretaris daerah di masing-masing daerah, dan melakukan rapat secara periodik dipimpin kepala

daerah. Juga sekaligus memberikan teguran dan sanksi bagi OPD yang memiliki realisasi serapan anggaran belanja yang rendah.

"Solusi jangka panjang ini agar tidak berulang realisasi anggaran yang menumpuk di akhir tahun," ujar Fatoni.

Dia menambahkan, pemerintah pusat telah membentuk Tim Analisa dan Evaluasi (Anev) yang beranggotakan Kemendagri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan kementerian/lembaga yang terkait dalam menyiapkan kebijakan teknis. Tim tersebut akan melakukan

kan monitoring dan evaluasi untuk mendukung percepatan pengadaan barang/jasa dan mencari solusi terhadap kendala yang sering dihadapi pemda.

Fatoni menambahkan, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah bisa melakukan hal serupa dengan langkah-langkah yang diterapkan Kemendagri untuk mendorong percepatan realisasi APBD kabupaten/kota di wilayahnya. Langkah ini di antaranya dengan melaksanakan monitoring, analisis, dan evaluasi serapan anggaran kabupaten/kota.

Selain itu, Kemendagri dan pemerintah provinsi melakukan movev setiap bulan. Pada akhir tahun dilakukan setiap minggu yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri dengan dihadiri gubernur didampingi sekretaris daerah dan OPD terkait. Begitu pula dengan movev yang digelar pemerintah provinsi, yang dihadiri bupati/wali kota dengan didampingi sekretaris daerah dan OPD terkait.

"Kami berharap, gubernur sebagai wakil pemerintah dan juga pemerintah provinsi bersama-sama dengan Kemendagri melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi percepatan realisasi APBD kabupaten/kota di wilayah masing-masing," harapnya.

Masih rendahnya serapan anggaran yang ditandai tingginya dana yang mengendap di bank juga sudah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden mengaku geram dengan pemda yang tidak bisa mengoptimalkan belanja anggaran daerah hingga penyerapannya masih rendah.

Presiden juga mengaku heran dengan jumlah uang anggaran Pemda yang ada di bank, yang seharusnya terus berkurang seiring dengan peningkatan belanja, namun justru se-

makin meningkat.

"Saya harus ngomong apa adanya, para gubernur bupati dan wali kota. Masih ada tadi pagi Saya cek ke Menteri Keuangan, masih ada berapa uang yang ada di bank, ini sudah akhir November. Tinggal sebulan lagi, tidak turun justru naik. Saya dulu ingatkan di Oktober, seingat saya 170 triliun, ini justru naik menjadi 226 triliun," kata Presiden Jokowi pada rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Inv-

segera hingga habis. "Waduh sudah enggak ada APBD, APBN juga enggak ada", baru mencari investor untuk uang datang. Logika ekonominya seperti itu," tegasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, mengaku harus bicara terus terang karena terjadi ketidaksinkronan antara pusat dan daerah. Jokowi memaparkan, APBN mengalami defisit lebar hingga Rp548 triliun untuk membiayai belanja negara, termasuk belanja daer-

"Ini perlu saya ingatkan, uang kita sendiri saja tidak digunakan, kok kejar-kejar orang lain untuk uangnya masuk? Logikanya enggak kena," ungkapinya.

Jokowi menyebut, pemda semestinya menghabiskan APBD terlebih dulu, baru membidik uang dari luar, karena tidak ada lagi sumber pembiayaan lain.

Pada April lalu, Jokowi juga sempat mengingatkan pemda untuk mempercepat realisasi anggaran belanjanya. Pada Maret, uang pemerintah daerah



estasi 2021, Rabu (24/11/2021).

Jokowi menilai, pola kerja pemda dalam merealisasikan anggaran tidak sesuai dengan logika ekonomi. Seharusnya, APBD yang tersisa pada Oktober 2022 dihabiskan terlebih dulu, baru setelahnya mencari investor untuk pemasukan uang baru.

"Uang kita sendiri saja tidak digunakan kok, ini ngejar-ngejar orang lain (investor), untuk uangnya masuk. Logikanya enggak kena. Seharusnya uang kita sendiri dihabiskan, realisasikan

ah. Sedangkan daerah malah mendapatkan tabungan.

"Sebagian dari APBN dikirim, ditransfer ke daerah sebanyak Rp642 triliun, baik ke provinsi, kabupaten atau kota, uangnya ada di APBD, artinya itu uang yang siap Rp642 triliun," jelasnya.

Oleh karena itu, Jokowi menyebut jangan bila pemda menyebut getol menggaet investasi luar untuk masuk ke dalam negeri karena uang tersedia saja tidak dimanfaatkan oleh daerah.

yang mengendap di bank mencapai Rp182 triliun.

"Ada Rp182 triliun, tidak semakin turun, tapi naik 11,2 persen. Artinya, tidak segera dibelanjakan," ujar Jokowi, 29 April 2021.

Presiden menyatakan, dana Rp182 triliun merupakan angka yang besar bagi daerah. Jika cepat dibelanjakan, maka ada perputaran dana di masyarakat dengan jumlah banyak. Sehingga berdampak positif untuk perekonomian nasional. ●

KOLABORASI MEMPERCEPAT REFORMASI BIROKRASI

KemenpanRB Siapkan Program Prioritas

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) berupaya melakukan percepatan reformasi birokrasi pemerintah.



Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo, mengatakan, ada empat tantangan utama bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan reformasi birokrasi yang cukup berat dan kompleks.

Pertama terkait terorisme dan radikalisme. Tjahjo mengatakan banyak keluarga calon eselon 1 yang batal menjadi menjabat karena dugaan terpapar radikalisme dan terorisme.

"Ini bikin stres, dua tahun menjadi MenpanRB dalam sidang TPA (tim penilai akhir), hampir di atas 16 calon

izinan, masalah dana desa, masalah aset pemerintah pusat dan daerah, masalah jual beli jabatan, dan masalah mekanisme pembelian barang dan jasa.

Tantangan ketiga adalah narkoba. Tjahjo mengatakan, problem ASN ini hampir tiap bulan muncul di sidang badan kepegawaian.

"Ini tiap bulan kami memberhentikan ASN, menonjokkan ASN, merehabilitasi ASN, dan dia pengguna narkoba. Kalau dia pengguna pengedar, dipe-

dengan reformasi birokrasi, yakni pembangunan sumber daya manusia, penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi.

Dalam kegiatan Rapat Kerja Paguyuban Kementerian PANRB yang berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (3/12/2021), Tjahjo menyebut, terdapat empat kunci dalam melaksanakan program prioritas reformasi birokrasi.

Pertama, kecepatan pelayanan dalam menerbitkan perizinan untuk in-



eselon 1 yang sudah hebat, profesor, doktor, mulai dari bawah naik, ikut TPA, gagal jadi eselon 1 gara-gara kelakuan istrinya atau suaminya," kata Tjahjo dalam paparannya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (1/12/2021).

Kedua terkait area rawan korupsi. Tjahjo mengatakan, hal ini telah berkali-kali diingatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mulai dari urusan perencanaan anggaran dana hibah dan dana bansos, masalah per-

cat," tegas Tjahjo.

Tantangan terakhir adalah bencana alam, mulai dari banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, termasuk pandemi COVID-19 ikut memengaruhi reformasi birokrasi ASN. Karena itu, Tjahjo mengingatkan kerja sama semua pihak diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Tjahjo melanjutkan, ada tiga program prioritas yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo yang berkaitan

vestasi, baik di pusat maupun daerah. Kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik yang harus semakin baik dalam setiap lini kepada masyarakat.

Kunci ketiga, memastikan ketersediaan ASN yang profesional dan kompeten. Sehingga ASN mampu melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat di Indonesia.

Kunci terakhir adalah memperpendek rentang dan jalur birokrasi

yang didukung dengan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Dengan demikian, budaya inovasi dapat tercipta untuk diaplikasikan di berbagai bidang untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat," kata Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, reformasi birokrasi tahap pertama yang diperintahkan Presiden Jokowi membutuhkan dana hingga Rp1,7 triliun. Dana sebanyak itu digunakan untuk menyelesaikan tiga pekerjaan besar.

"Reformasi birokrasi, memangkas birokrasi panjang menjadi pendek, yang diinginkan Bapak Jokowi ini lah yang saya kira faktor dana juga. Ternyata tahap awal memerlukan Rp 1,7 triliun," ungkap Tjahjo.

Tjahjo menjelaskan, reformasi birokrasi tahap pertama merupakan target jangka pendek yang ditetapkan Jokowi usai dilantik sebagai Presiden periode kedua pada 2019. Dalam tahap pertama ini, terdapat tiga pekerjaan utama.

Pertama, mempercepat proses perizinan investasi. Tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kalau tidak (direformasi), ini ada perizinan di tingkat BUMN saja sampai lima tahun, dengan ribuan lembar berkas. Setelah selesai ribuan lembar itu, masih minta saham kosong lagi, ya lari semua investornya," kata Tjahjo.

Kedua, mempercepat dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Ketiga, menghitung ulang jumlah ASN yang sebenarnya dibutuhkan birokrasi Indonesia untuk bisa bergerak cepat dan melayani semua masyarakat.

Pada tahap pertama ini, kata Tjahjo, terdapat total 4,2 juta ASN. Sekitar 1,6 juta orang di antaranya merupakan pegawai administrasi yang ditugaskan gubernur, bupati, wali kota, menjadi penyuluh, guru, dan lainnya.

Semua agenda reformasi jangka pendek itu, ujar Tjahjo, sedang dikerjakan Kemenpan RB bersama kementerian/lembaga lainnya. Semua agenda reformasi birokrasi tahap pertama ini akan dituntaskan pada 2024.

"Di tengah pandemi COVID-19, kami ingin setidaknya selesai pada akhir

2024. Soal ganti presiden, ada visi-misi baru, itu masalah nanti," kata dia.

Tjahjo juga mengaku dirinya sering dipanggil Presiden Jokowi ketika menjabat sebagai MenPANRB dibandingkan saat menjadi Menteri Dalam Negeri. Pasalnya, Presiden Jokowi memiliki fokus luar biasa terhadap reformasi birokrasi.

Tjahjo bercerita bahwa selama lima tahun menjabat Mendagri, dirinya hanya dua kali saja dipanggil oleh Presiden Jokowi. Sementara saat ini, baru dua tahun lebih menjabat sebagai MenPANRB dirinya sudah lebih sering dipanggil oleh Presiden Jokowi.

Tjahjo mengatakan bahwa Presiden

“

Kalau tidak (direformasi), ini ada perizinan di tingkat BUMN saja sampai lima tahun, dengan ribuan lembar berkas. Setelah selesai ribuan lembar itu, masih minta saham kosong lagi, ya lari semua investornya.

Jokowi memang memiliki ekspektasi tersendiri terhadap birokrasi Indonesia.

"Ekspektasi Bapak Jokowi tentang reformasi birokrasi yang pertama adalah birokrasi yang menciptakan hasil, birokrasi yang berdaya saing, birokrasi yang making deliver, birokrasi yang sederhana, lincah dan cepat," terangnya.

Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian PANRB, Rini Widyantini, dalam kegiatan Rapat Kerja Paguyuban Kementerian PANRB di Batam, mengatakan rapat kerja sebagai sinergi dalam memonitor kemajuan, memperoleh masukan, serta merencanakan tindak lanjut dalam implementasi reformasi birokrasi.

"Raker ini ditujukan guna memper-

oleh informasi mengenai capaian, rencana tindak lanjut, serta sinergi dalam menjalankan proses reformasi birokrasi yang dipimpin oleh Kementerian PANRB," jelas Rini yang juga menjabat sebagai Deputy bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB.



Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang merupakan paguy-

uban instansi dari Kementerian PANRB juga memaparkan capaian dan strategi dari reformasi birokrasi, sesuai dengan tugas dan kewenangan dari instansi masing-masing.

Rini mengatakan, dengan diadakannya rapat kerja paguyuban Kementerian PANRB, selain dapat meningkat-

tuk menghasilkan kebijakan yang dapat mempercepat implementasi reformasi birokrasi," pungkas Rini.

Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa, menyampaikan, pelayanan publik tidak selalu bergantung pada pemerintah. Kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah

kan kolaborasi bersama masyarakat untuk menciptakan nilai sebuah pelayanan.

Nilai atau value ini merupakan sebuah pegangan yang kuat, yang menjadi dasar sebuah keterikatan antara penyelenggara layanan dengan penerima layanan, yakni masyarakat.

kan sinergi, juga dapat akselerasi strategi percepatan reformasi birokrasi.

"Dengan adanya rapat kerja ini, Kementerian PANRB bersama instansi paguyuban dapat duduk bersama un-

akan menghasilkan suatu logika pelayanan baru.

Studi mengenai pelayanan publik terus berkembang, kini dikenal konsep public service logic, yang mengutama-

"Dengan adanya value yang kuat, maka akan tercipta pelayanan publik yang partisipatif, yang sesuai dengan harapan masyarakat dan kepuasan masyarakat," ujar Diah.

Saat ini, partisipasi masyarakat bisa terbangun dalam forum konsultasi publik (FKP) dan survei kepuasan masyarakat (SKM). Dua kegiatan rutin itu sebagai refleksi pemerintah untuk melihat titik lemah pelayanan.

Diah menegaskan, dengan adanya partisipasi dan kolaborasi yang baik, maka inovasi dapat diciptakan dan kualitas pelayanan publik dapat meningkat. Hal yang diperlukan adalah komitmen kuat dari pimpinan, transformasi sistem, tata kelola pemerintahan, serta perubahan pola pikir dan budaya kerja.

Salah satu wujud pengintegrasian adalah berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah, serta Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP).

MPP tidak sekadar gedung berisi banyak pelayanan, tapi juga sistem yang terintegrasi. Sebab, kedepannya seluruh pelayanan bisa diakses melalui smartphone.

Secara keseluruhan, untuk mewujudkan transformasi menuju pelayanan prima, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi. Kondisi saat ini merupakan proses transformasi, yang sebelumnya berada pada posisi com-

Dia memastikan bahwa beragam strategi percepatan telah disiapkan sebagai jawaban dari pekerjaan rumah tersebut.

"Kementerian PANRB sebagai leading sector reformasi birokrasi Indonesia telah menyiapkan strategi percepatan reformasi birokrasi daerah yang tentunya memerlukan kolaborasi dari semua pihak," ujarnya saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Rabu (1/12/2021).



Transformasi mengharuskan organisasi atau perusahaan berubah dengan cepat. Proses bisnis yang berubah, dengan pemanfaatan teknologi informasi memangkas tahapan-tahapan yang rumit.

"Transformasi digital menuntut setiap orang mempunyai digital skill, antara lain kemampuan menggunakan teknologi, kemampuan komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai sektor, kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri, dan mengajar orang lain," jelas Diah.

fort zone (zona nyaman) dan kemudian beralih pada learning zone yaitu peralihan dalam bentuk digital.

"Setiap dari kita harus siap melangkah keluar dari zona nyaman dan memulai perjuangan menuju apa yang ingin dicapai," ungkap Diah.

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPANRB, Erwan Agus Purwanto, mengatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah masih menyisakan beragam pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Strategi percepatan reformasi birokrasi daerah terangkum dalam lima poin utama. Pertama, kerja sama dalam membina dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, termasuk mekanisme penghargaan (reward) and pengakuan (acknowledgement). Kedua, penguatan kapasitas Tim Asistensi Daerah dan pelaksanaan kerja sama dengan perguruan tinggi, dan berbagai pihak yang kompeten.

Strategi lainnya adalah membangun best practice kabupaten/kota di setiap provinsi, dan penyempurnaan

alat evaluasi reformasi birokrasi daerah yang lebih disesuaikan dengan kondisi pemerintah daerah. Terakhir, adanya penguatan perencanaan dan penganggaran program reformasi birokrasi di daerah yang memadai.

Erwan menjabarkan, kurang optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, dilatarbelakangi oleh empat permasalahan utama. Di antaranya reformasi birokrasi masih dianggap sebagai formalitas dan pemenuhan administratif, fokus dan lokus reformasi birokrasi belum mengacu pada akar masalah yang ada di daerah, strategi reformasi birokrasi belum terintegrasi, serta komitmen pimpinan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi belum optimal.

"Jadi inilah PR kita, mengapa di tingkat kabupaten/kota pelaksanaan reformasi birokrasi belum sesuai yang kita harapkan," ungkapnya.

Guru Besar Universitas Gadjah Mada ini juga menggarisbawahi, percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi bukan hanya kepentingan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah serta komponen lain yang terlibat di dalamnya.

Untuk menjamin terwujudnya kolaborasi tersebut, Kementerian PANRB juga akan terus menyempurnakan peta jalan (road map) reformasi birokrasi nasional 2020-2024.

Secara umum, peta jalan (road map) reformasi birokrasi nasional 2020-2024 fokus pada terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah. Serta budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.

Sementara road map reformasi birokrasi nasional 2020-2024 tematik fokus pada percepatan penanganan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya saing Indonesia.

"Komitmen dan kerja sama dibutuhkan agar kita bisa mewujudkan visi misi presiden yang ingin birokrasi menghasilkan sesuatu, tidak hanya sekadar sibuk, tetapi yang memberikan dampak langsung pada masyarakat," tutupnya. ●





TUNTUTAN INOVASI REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Mengiringi Revolusi Industri 4.0 berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), menuntut lebih banyak penyesuaian diri dan inovasi. Baik sebagai pribadi perorangan maupun sebagai warga bangsa. Seperti apa bentuknya?

Salah satu tuntutan inovatifnya adalah menyesuaikan keterampilan dan keperluan lapangan kerja atau usaha. Bahkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate pun mengungkapkan 10 jenis pekerjaan yang mengalami peningkatan permintaan di Indonesia sepanjang 2021. Kecenderungan yang sama akan berlanjut pada tahun depan.

Bagaimana menyesuaikan diri dengan gelombang perubahan yang tak terelakkan itu? "Caranya, mempersiapkan sumber daya yang padu dengan kebutuhan sumber daya manusia nasional di era digital ini," ujar Johnny dalam orasi ilmiah Wisuda STMM 2021 secara virtual dari Jakarta, Rabu, 8 Desember 2021.

Mengutip laporan World Economic

Forum Tahun 2021 bertajuk The Future of Job, setidaknya ada 10 jenis pekerjaan yang paling diperlukan terkait perubahan revolusioner di bidang industri ini adalah: Data analyst and scientist, Big data specialist, artificial intelligence dan machine learning specialist, Digital marketing and strategy specialist, Renewable energy engineer, Process automation specialist, Internet of things (IoT) specialist, Digital transformation specialist, Business services and administration manager, Business development professional.

Berdasarkan data marketplace pencarian kerja, Ekrut pada 2020, ada kenaikan permintaan SDM di bidang teknologi informasi. Rinciannya, kebutuhan data analyst dan scientists naik 76,59 persen, tenaga pemasaran merek 66 persen, perencanaan strategi 62,78 persen, full

stack engineer 50,85 persen, dan tenaga keamanan siber 23,91 persen.

Nah, untuk memudahkan penyesuaian diri terhadap Revolusi Industri 4.0 ini, berikut beberapa bidang yang sangat memerlukan inovasi pada dasawarsa 2020-an yang memasuki tahun ketiga pada 2022.

Kecerdasan buatan (AI, artificial intelligent) dan mesin pembelajar (machine learning)

Kecerdasan buatan merupakan teknologi masa kini yang konsepnya "membawa kepintaran manusia ke dalam mesin." Mungkin ini terdengar tidak masuk akal, mengingat kompleksitas cara berpikir manusia. Toh penerapan teknologi kecerdasan buatan ini sudah akrab dalam keseharian. Bebera-

pa contoh artificial intelligence yang sering kita temui antara lain teknologi face recognition (pengenalan wajah) dari ponsel, transaksi bank melalui ponsel (phone banking), dan rekomendasi produk pada laman jual beli online.

Sedangkan machine learning adalah bagian atau cabang dari penerapan artificial intelligence. Machine Learning merupakan metode pembelajaran AI yang memanfaatkan data untuk membuat prediksi layaknya manusia. Contohnya, optimasi iklan dalam strategi digital marketing, penerjemah tulisan tangan menjadi teks, juga pengecekan terjemahan dan tata bahasa di layar komputer atau ponsel.

Secara nasional, pemerintah mulai menyusun peta jalan dan menerapkan AI dan machine learning untuk bidang pendidikan dan penelitian, pelayanan kesehatan, reformasi birokrasi dan ketahanan pangan serta mobilitas dan kota pintar (smart city).

Internet of Things (IoT)

Berbeda dengan AI dan machine learning, IoT merujuk pada jumlah perangkat dan objek "pintar" yang terus bertambah untuk terhubung ke internet. Perangkat semacam itu terus mengumpulkan dan mentransmisikan data, yang selanjutnya mendorong pertumbuhan Big Data dan AI. Contoh penerapan internet of things antara lain sistem keamanan rumah, peralatan pertanian mandiri, peralatan pabrik, juga pelacak persediaan barang tanpa kabel.

Teknologi Internet of Things juga masuk ke dalam sektor kesehatan seperti alat pemantau tekanan darah, alat pacu jantung hingga sektor militer seperti drone. Toh penggunaan IoT lebih banyak berkaitan dengan industri dan bisnis di samping tentu bidang pemerintahan. Jika sebelumnya industri lebih banyak dikendalikan secara manual dan sekarang menjadi bentuk revolusi industri menuju Industri 4.0. Hal lain menjadi tantangan terbaru bagi Indonesia. apabila teknologi telah tersedia, akankah bangsa Indonesia siap untuk memonitor dan menggerakkan teknologi tersebut.

Big data (data besar) dan Augmented analytics (analitik tertambah)

Big Data mengacu pada pertumbuhan berlipat ganda (ekspon-

ensial) dalam jumlah data yang dibuat di dunia kita. Berkat augmented analytics (analitik data yang sangat canggih, sering kali didorong oleh teknik AI), kita sekarang dapat memahami dan bekerja dengan arus data yang sangat kompleks dan beragam. Pada akhirnya, big data dan analitik tertambah bermanfaat untuk menyusun pola perilaku dan memprediksi kecenderungannya di masa depan. Kecenderungan selera konsumen misalnya.

Sebelumnya, kegiatan intelijen bisnis tradisional bekerja tanpa platform analitik tertambah. Namun meskipun kederengarannya rumit, analitik tambahan tidak pernah semudah diakses saat ini. Augmented analytics dapat digabungkan secara pas dengan big data.

Cara bekerjanya, augmented analytics menghilangkan banyak pekerjaan hafalan dan pemrosesan data. Jadi, augmented analytics menghemat waktu untuk sampai pada simpulan dan prediksi terhadap perilaku konsumen.

Blockchain dan pembukuan yang terdistribusi (distributed ledgers)

Metode penyimpanan, otentikasi, dan perlindungan data yang relatif sangat aman ini dapat merevolusi banyak aspek bisnis – terutama dalam hal memfasilitasi transaksi bisnis. Contoh populernya adalah mata uang kripto (cryptocurrency).

Anda mungkin pernah mendengar tentang Bitcoin, tetapi itu bukan satu-satunya bentuk cryptocurrency. Saat ini, ada ribuan cryptocurrency. Tidak seperti mata uang yang didukung pemerintah, yang biasanya diatur dan

dibuat oleh bank sentral, cryptocurrency dihasilkan oleh komputer yang memecahkan serangkaian algoritma yang kompleks dan bergantung pada jaringan peer-to-peer yang terdesentralisasi. Sementara ini hanya iseng beberapa tahun yang lalu, hal-hal yang jauh lebih serius sekarang. Tak lama setelah pembuatan Bitcoin, satu pengguna menghabiskan 10.000 Bitcoin untuk dua pizza. Jumlah bitcoin yang sama akan bernilai sekitar 8 juta dolar AS beberapa tahun kemudian.

Toh banyak perdebatan seputar cryptocurrency. Misalnya, karena terdesentralisasi dan anonim, Bitcoin telah digunakan dan digunakan untuk mendanai kegiatan ilegal. Selain itu, selalu ada risiko komputer crash menghapus dompet Anda atau peretas mengobrak-abrik brankas virtual Anda. Namun, sebagian besar kekhawatiran ini tidak jauh berbeda dengan kekhawatiran tentang uang tradisional, dan seiring waktu, cryptocurrency bisa menjadi sangat aman.

Teknologi 5G (Fifth Generation)

Teknologi jaringan seluler generasi kelima akan menyediakan jaringan nirkabel yang lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih stabil, sehingga mendorong kemajuan dalam banyak tren lainnya (misalnya, lebih banyak perangkat yang terhubung dan aliran data yang lebih kaya).

Namun, teknologi jaringan seluler generasi kelima (5G) tidak hanya dirancang untuk menyediakan unduhan

konten yang lebih cepat, tetapi juga sejumlah aplikasi lain yang mampu dilakukan oleh 5G, yang dapat mengubah cara kita melakukan aktivitas dan bisnis sehari-hari, termasuk internet of things (IoT) hingga kecerdasan buatan (AI).

Dengan Indonesia yang akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital dunia, 5G akan memainkan peran penting dalam perekonomian ke depan. Den-



gan tujuan menjadi salah satu dari lima ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045, transformasi digital merupakan elemen penting bagi perusahaan dalam mempercepat pertumbuhan untuk beralih dari ekonomi berbasis sumber daya ke ekonomi berbasis pengetahuan dan digital. Dari pabrik pintar hingga ibu kota baru berbasis AI di Kalimantan dan bisnis pertanian berbasis digital, hingga IoT industri, Indonesia berpotensi menjadi pasar 5G terbesar di Asia Tenggara.

Toh Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penerapan teknologi 5G, terutama dalam ketersediaan spek-

trum yang lambat, ketidakcocokan

trum yang lambat, ketidakcocokan smartphone yang ada, dan kemungkinan perang harga antar operator telekomunikasi. Negara-negara lain di Asia-Pasifik sudah mulai membebaskan spektrum mid-band dan sedang dalam perjalanan untuk menerapkan penggunaan komersial 5G.



trum yang lambat, ketidakcocokan smartphone yang ada, dan kemungkinan perang harga antar operator telekomunikasi. Negara-negara lain di Asia-Pasifik sudah mulai membebaskan spektrum mid-band dan sedang dalam perjalanan untuk menerapkan penggunaan komersial 5G.

Untuk Indonesia, 5G diproyeksikan dapat mencakup lima persen dari total koneksi internet pada 2025, terendah di antara negara-negara Asia-Pasifik dengan India diprediksi mencapai tujuh persen, Singapura 34 persen dan Korea Selatan memimpin kawasan itu pada 67 persen, menurut GSMA 2020 Laporan Ekonomi Seluler Asia Pasifik. Toh Indonesia telah membentuk gugus tugas 5G untuk mempercepat adopsi 5G di dalam negeri, setelah menjajal 5G di Asian Games 2019 dan banyak kesempatan lain yang dipimpin oleh perusahaan tel-

(LAPI-HTB). Teknologi tersebut dapat menciptakan 4,4 juta lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas menjadi Rp 9,4 juta PDB per kapita pada dekade berikutnya juga.

Komunitas bisnis dapat berkontribusi 18 hingga 22 persen untuk pertumbuhan pendapatan tambahan sementara konsumen individu dapat berkontribusi 6-9 persen, menurut sebuah studi oleh AT Kearney. Antara 4-6 miliar dolar investasi perlu dilakukan setiap tahun dari 2020 hingga 2025 untuk merealisasikan potensi ini.

Komputasi awan dan komputasi tepi (cloud and edge computing)

Komputasi awan - maksudnya data tersimpan di ruang maya namun dapat dibuka melalui internet. Sedangkan komputasi tepi merujuk pada pengguna di penghujung rangkaian peralatan, ka-

takan saja layar komputer atau ponsel. Mungkin istilahnya aneh. Namun, ini soal istilah saja. Sejak kita membuka situs berita atau belanja online di ponsel, pada saat itulah cloud and edge computing berperan.

Komputer Visual dan pengenalan wajah

Salah satu bentuk cloud dan edge computing tentulah mesin dapat berbicara, jadi mengapa mereka tidak "melihat" juga? Teknologi ini memungkinkan mesin untuk menafsirkan dunia di sekitar mereka secara visual, dengan pengenalan wajah sebagai contoh utama. Meskipun kita pasti akan melihat kontrol peraturan yang lebih besar atas penggunaan pengenalan wajah, teknologi ini tidak akan kemana-mana.

Kendaraan listrik mandiri

Dalam tahun-tahun ke depan, bukan hanya kendaraan berenergi listrik yang kian banyak, melainkan juga yang tanpa pengemudi. Semua jenis kendaraan otonom - mobil, taksi, truk, dan bahkan kapal - menjadi benar-benar otonom dan layak secara komersial.

Untuk kendaraan listrik, setidaknya jalan raya di Indonesia mengenal beberapa merek. Baik untuk kendaraan umum maupun pribadi. Sebut saja Hyundai Kona, misalnya. Mobil asal Korea Selatan ini mengandalkan motor listrik dengan tenaga 118 Tk dan torsi 295 Nm. Motor listrik tersebut didukung oleh baterai Li-Ion Polymer 38,3 kWh. Kendaraan ramah lingkungan ini diklaim memiliki kecepatan maksimal 155 km per jam. Pengisian daya dapat dilakukan selama sembilan jam untuk pengisian normal.

Merek-merek lain, Nissan Kicks e-POWER yang berharga setengah miliar rupiah. Kemudian, Toyota Corolla Cross Hybrid dengan harga sekitar Rp400 juta. Yang lebih mahal juga ada, silakan Lexus UX300e atau BMW i3s yang berharga di atas Rp1 miliar. Namun yang termahal memang Tesla Model S P1000D yang bernilai sekitar Rp4,4 miliar.

Nah, kini persiapan untuk menghadapi 2022 dan tahun-tahun berikutnya adalah menghadapi perubahan dalam banyak bidang kehidupan dengan inovatif. Tuntutan melekat seiring Revolusi Industri 4.0 yang tak terelakkan. ●

Gubernur Untuk Negeri



untuk memilih klik www.infoindonesia.id

Polling Gubernur Untuk Negeri memasuki tahap final
Mulai sekarang, kami menampilkan nama-nama yang berhasil menduduki **10 besar** pada hasil polling kedua.



Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta



Herman Deru
Gubernur Sumatera Selatan



Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat



Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah



Wahidin Halim
Gubernur Banten



Zulkieflimansyah
Gubernur Nusa Tenggara Barat



Isran Noor
Gubernur Kalimantan Timur



Sri Sultan Hamengkubuwana X
Gubernur D.I. Yogyakarta



Erzaldi Rosman Djohan
Gubernur Kepulauan Babel



Sutarmidji
Gubernur Kalimantan Barat

ERICK THOHIR INSTRUKSIKAN DIGITALISASI BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir rupanya mulai mewaspadai disrupsi teknologi setelah kemunculan produk artificial intelligence (AI) milik bos Facebook Inc. Mark Zuckerberg, Metaverse.

Metaverse merupakan nama baru dari Facebook yang diluncurkan pada 28 Oktober 2021 lalu di acara Connect 2021. Metaverse disebut-sebut proyek masa depan manusia yang membantu orang-orang terhubung, menemukan komunitas, dan mengembangkan bisnisnya di dunia maya.

Erick mengatakan bahwa kemunculan metaverse merupakan sebuah keniscayaan yang menandai gelombang ketiga perkembangan teknologi setelah media digital (online) saat ini.

"Sekarang sudah banyak yang bicara juga menge-

nai metaverse, gelombang ketiga di mana sebuah ekosistem digital yang di situ terjadi, menjadi turunannya seperti Bitcoin, NFT (non fungible token) dan hal-hal lainnya yang tidak pernah terpikirkan selama ini," katanya pada 'Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia' dilihat di Youtube Humas FEB UI Jumat, 10 Desember 2021.

Dia menegaskan bahwa BUMN sebagai lokomotif pembangunan na-

infrastruktur berupa jaringan fiber optik dan jaringan 5G, pendanaan seperti Initiative Capital Venture untuk pendanaan start up karya anak bangsa agar tidak lari ke luar negeri, dan tentu yang terakhir ekosistem dalam bentuk platform digital nasional sebagai enabler kreator lokal," papar mantan bos Inte Milan.

Dalam mewujudkan misi digitalisasi BUMN, Erick sangat mengapresiasi inovasi dan kreativitas anak bangsa

Namun demikian, untuk mencapai ambisi tersebut pemerintah harus memiliki fondasi sumber daya manusia yang memadai. Erick menyebut bahwa modal SDM menjadi kekuatan utama untuk masa depan Indonesia.

"Karena transformasi bisnis dan digital tidak akan ada artinya apabila kita tidak melakukan transformasi human capital terutama di generasi muda. Oleh karena itu BUMN menyiapkan karpet merah bagi talenta hebat dari



sional harus mampu beradaptasi dengan disrupsi teknologi dan terpacu melakukan berbagai penerapan program digitalisasi dan pengembangan teknologi.

Untuk itu, BUMN dituntut untuk harus mengoptimalkan potensi bisnis digital yang berskala besar dengan cakupan pangsa pasar yang juga tidak kalah luas di dalam negeri.

"Karena itu kita mendorong transformasi digital yang berdasarkan pada tiga perspektif meliputi BUMN

yang terus bertumbuh. Hingga saat ini Indonesia telah memiliki 2.310 start up dan masuk lima besar dunia. Sebanyak delapan start up berstatus unicorn dan satu decacorn.

"Menurut data yang ada, 10 start up berpotensi naik menjadi unicorn," imbuhnya.

Erick mengungkapkan, keterlibatan anak muda dalam pembangunan nasional semakin terasa. Hal ini penting sebagai persiapan menuju visi "Indonesia Emas 2045".

perguruan tinggi," ungkapnya.

Seiring perkembangan teknologi, Erick memandang bahwa sudah saatnya BUMN memanfaatkan platform digital sebagai tumpuan utama pertumbuhan bisnis.

"BUMN keluar dari zona nyaman dalam merespon disrupsi teknologi, perubahan perilaku konsumen dan revolusi industri 4.0, melakukan berbagai penerapan program digitalisasi dan pengembangan teknologi," katanya. ●

DI PATIMBAN SELALU ADA KEMAJUAN

Bukan hendak berlebihan. Setahun setelah beroperasi, lebih dari 12 ribu kendaraan berbagai jenis sudah diparkirkan. Konsorsium swasta mulai mengelola Pelabuhan Patimban tahun depan.

Satu demi satu aneka mobil Toyota berbagai type, mulai dari Fortuner hingga Agya, memasuki perut kapal MV Fujitran World. Dalam hitungan hari, kapal kargo itu akan angkat sauh dari Pelabuhan Patimban, Sukanagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Salah satu pelabuhan tujuannya adalah Batangas, tempat pelabuhan pusat kendaraan Toyota di Filipina berada. Dari Patimban, kapal khusus pengangkut kendaraan berbendera Liberia ini mengangkut 1.209 unit kendaraan Toyota produksi Indonesia. Mendominasi palka yang baru berisi 84 unit kendaraan dari Jepang.

sasa mobil Jepang Toyota Corporation.

"Ini melambangkan kerja sama antara Indonesia dan Jepang. Kerjasama antara PPI dan Toyota Tsusho diharapkan dapat membuat pelayanan ekspor dan impor kendaraan lebih baik dan lebih kompetitif di masa depan," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seremoni serah terima.

Tampak hadir dalam acara itu Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel. Tentu juga Komisaris Utama Pelabuhan Patimban Internasional (PPI), Chairul Tanjung serta CEO Toyota, Tsusho Ichiro Kashitani terkait dengan serah terima pengelolaan Patimban dari Pelindo.

terian Perhubungan, Jakarta, Kamis, 16 Desember 2021.

Penandatanganan tersebut dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha dan Direktur Utama PT Pelabuhan Patimban Internasional Fuad Rizal. Selain itu, ditandatangani pula Berita Acara Serah Terima Aset KPBU Pelabuhan Patimban serta penandatanganan Berita Acara Tanggal Efektif KPBU.

"Pelabuhan Patimban internasional ini adalah suatu perjalanan panjang. Alhamdulillah sekarang kita memasuki era baru dari suatu Pelabuhan," ujar Arif Toha.

Pengembangan dan kemajuan di Patimban pun berjalan seiringan. "Belakangan ini kita ketahui bahwa traffic pengiriman kendaraan dari pelabuhan Patimban sudah cukup baik, harapannya dengan dikelolanya oleh PT Pelabuhan Patimban Internasional nantinya akan semakin baik lagi kinerjanya," ungkap Arif.

Dalam pengembangan Pelabuhan Patimban, Pemerintah Jepang telah memberikan pinjaman sekitar 120 miliar yen untuk pembangunan terminal dan akses jalan. Pembangunannya berlangsung melalui kerja sama dengan perusahaan Jepang.

Menteri Budi Karya mengatakan gerbang ekspor dan impor yang baru itu akan membantu meningkatkan daya saing nasional di industri logistik tingkat regional dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis ekspor kendaraan terbesar di Asia.

Berlokasi sekitar 140 kilometer sebelah timur Jakarta, Pelabuhan Patimban merupakan alternatif dari Pelabuhan Tanjung Priok yang paling sibuk di Indonesia. Patimban memberikan akses lebih mudah ke produsen kendaraan besar dan suku cadang mobil yang sebagian besar berbasis di kabupaten tetangga Bekasi dan Karawang, Jawa Barat.

Pemerintah berencana memiliki pusat industri baru dan kawasan perkotaan di Patimban serta kabupaten sekitarnya. Patimban sendiri diharapkan dapat menciptakan 4,3 juta pekerjaan dalam 15 ta-

hun ke depan.

Saat presiden meresmikan Pelabuhan Patimban pada 20 Desember 2020, pemerintah mengungkapkan biaya pembangunannya sekitar tiga miliar dolar AS. Pengapalan uji coba ekspor saat itu mencakup 140 mobil Toyota dan Daihatsu tujuan Brunei Darussalam.

Pemerintah mengatakan akan memakan waktu hingga 2027 untuk menyelesaikan pusat industri di Patimban, sementara jalan tol menuju pelabuhan baru ditargetkan selesai pada 2023. "Satu upaya yang secara sistematis kita berusaha untuk meningkatkan daya saing logistik nasional tetapi kita juga memberikan kecepatan kepada swasta untuk mengelola suatu pelabuhan besar," terangnya dalam acara Handover Ceremony Terminal Kendaraan Pelabuhan Patimban.

Sebagai pelabuhan besar, pada 2027, Patimban diperkirakan mampu mengeksport sebanyak dua juta unit mobil dalam satu tahun. "Pelabuhan Patimban adalah pelabuhan yang besar, pada saat ultimatnya pada 2027 dengan (ekspor) kurang lebih 7 juta TEUs dan lebih dari dua juta mobil dalam satu tahun," jelas Budi.

Selain melayani kegiatan ekspor-impor kendaraan, keberadaan Pelabuhan Patimban juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi sektor UMKM, sektor pertanian, industri kreatif dan lainnya sehingga produk lokal mampu bersaing di pasar global.

Pelabuhan Patimban merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian secara nasional. Dibangun sejak 2018, pengelolaan Pelabuhan Patimban akan dikerjasamakan selama kurun waktu 40 tahun.

Saat ini pengembangannya telah memasuki Tahap 1-2 (2021-2023) meliputi pembangunan terminal peti kemas dengan kapasitas 3,75 juta TEUs. Juga terminal kendaraan dengan kapasitas total sampai dengan 600.000 unit kendaraan CBU serta Terminal RoRo 200 meter yang dijadwalkan tercapai pada 2027.

Menurut Budi Karya, ekspor yang kini dilakukan nantinya akan diperluas dan bukan hanya di sekitar Asia Tenggara. "Kami berharap, ekspor kendaraan ini bukan hanya untuk wilayah dekat saja, tapi bisa untuk ke Timur Tengah bahkan

Afrika," ungkapnya.

Sebagaimana dipesankan oleh Presiden, kata Menhub Budi, Pelabuhan Patimban adalah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan indeks logistik nasional dan bekerja sama dengan pelabuhan Tanjung Priok sehingga memiliki daya saing di Asia. Selain itu, sambungnya, Presiden berpesan untuk mendukung produk ekspor selain otomotif, yaitu industri kreatif, pertanian juga mendorong produk lokal. "Saya yakin dengan adanya PPI, Toyota Tsusho kita bisa memberikan satu layanan yang baik dan kompetitif," ujarnya.

Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kenji Kanasugi dalam sambutannya menyampaikan selamat atas handover dan ekspor perdana kendaraan di Pelabuhan Patimban. Kenji mengatakan Patimban adalah simbol kerja sama Jepang Indonesia dalam meningkatkan ekspor Indonesia. "Saya sangat terkesan

Sedangkan Dirut PT PPI Fuad Rizal mengatakan, "Nantinya akan dikirimkan dengan tujuan ekspor dengan rute Port Klang, Patimban, Singapura, Kuching hingga Filipina," ujarnya.

Setelah resmi beroperasi pada Desember 2020, sejauh ini realisasi kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Patimban telah mencapai 12.335 kendaraan. Angka itu tercatat selama periode Januari-November 2021.

Fuad mengatakan sejauh ini sudah banyak pabrik mobil yang mau ekspor produk mobilnya lewat Patimban. Toyota hanya salah satu saja, terlebih karena konsorsium Jepang yang bekerja sama dengan PPI adalah grup Toyota. "Car terminal ini kan kerja sama kepemilikannya sama Konsorsium Jepang. Ada Toyota Tsusho, itu kan semua satu grup di bawah Toyota Corporation, maka volume (pengiriman mobil) Toyota perlahan bakal ke sini," ungkap Fuad



Untuk Pelabuhan Patimban, momen yang berlangsung pada Jumat, 17 Desember 2021 itu adalah tahapan kemajuan berikutnya dengan ekspor seribu lebih kendaraan hingga ke Filipina. Ekspor kali ini seiring dengan serah terima pengelolaan dari Badan Usaha Milik Negara PT Pelindo kepada konsorsium PT Pelabuhan Patimban Indonesia (PPI) dengan Toyota Tsusho Corporation (TTC).

Momen ini berlangsung tiga hari menjelang ulang tahun pertama pelabuhan tersebut sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan bertepatan dengan peralihan manajemen ke operator baru. Pelabuhan Patimban pertama kali dioperasikan oleh Pelindo dan kini pengelolannya resmi beralih kepada PPI dan TTC Jepang -lengan perdagangan rak-

Hadir pula pada kesempatan ini antara lain Anggota Komisi V Bambang Hermanto, Pangdam III Siliwangi, Kapolda Jawa Barat. Juga Bupati dan Forkopimda Kabupaten Subang, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Subang, serta tamu undangan lainnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memang secara resmi telah melaksanakan serah terima pengelolaan aset Pelabuhan Patimban kepada PT PPI. Ini ditandai dengan acara Penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Negara Melalui Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Patimban di Kantor Pusat Kemen-



dengan pembangunan berbagai fasilitas yang ada di Patimban," ungkapnya.

Hal senada dikatakan, Bupati Subang H Ruhimat yang menyatakan ekspor kendaraan nantinya akan menuju ke beberapa negara selain Filipina, seperti Malaysia, Singapura, dan negara Asia Tenggara lainnya dengan menggunakan kapal MV Fujitran World. Sebagai Bupati, ia mengaku sangat bangga karena keberadaan Patimban sebagai salah satu proyek nasional akan berdampak bagi perekonomian warga Subang.

Termasuk dampak positif lainnya yang sejak pembangunan sudah dapat dirasakan. "Tentu saja kegiatan sekarang merupakan yang baik bagi pelaksanaan operasional Pelabuhan Patimban," ungkap Ruhimat.

Untuk merek lain bagaimana? "Kalau di sini yang lain udah masuk itu ada Hyundai masuk, Wuling juga masuk. Terus Mitsubishi, Daihatsu juga ada," papar Fuad.

Fuad pun menambahkan, Pelabuhan Patimban juga menyediakan layanan terminal alat berat. Alat-alat berat bisa dikirim melalui Pelabuhan Patimban. "Kita sediakan juga terminal alat berat, ekskavator, bulldoser bisa juga lewat pelabuhan ini," ungkap Fuad.

Nah, serah terima pengelolaan aset Patimban pada 16 Desember 2021 merupakan tindak lanjut dari perjanjian KPBU Pelabuhan Patimban antara Kemenhub sebagai penanggung jawab proyek dengan PT PPI sebagai Badan Usaha Pelaksana yang telah ditandatangani pada Maret 2021 lalu. ●

GERILYA POLITIK PERANGKAT DESA

Lama tak terdengar, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) turun ke jalan lagi. Kali ini menyoal pengalihan alokasi dana desa.

Entah terpenuhi atau tidak, gerilya politik sudah terjadi. Para perangkat pemerintah desa di berbagai wilayah Jawa maupun luar Jawa menuntut revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022.

Menggelar aksi di Ibu Kota: kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya seberang Istana Negara dan depan Gedung Parlemen, pada Kamis, 16 Desember

2021, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menuntut revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022. Sedangkan di berbagai tempat, Apdesi tingkat kabupaten menyuarakan hal yang sama, bahkan sebelum aksi di Jakarta.

Di Jakarta, Massa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka

menuntut revisi Perpres 104 Tahun 2021.

Apdesi mendesak pemerintah merevisi Perpres tersebut, khususnya Pasal 5 ayat 4 tentang rincian APBN Tahun 2022 yang mengatur penggunaan Dana Desa.

"Kita datang dari seluruh penjuru Indonesia, kami punya janji kepada masyarakat untuk melakukan pembangunan desa. Kalau PP tidak direvisi, dan maka kita akan ditagih janji

oleh masyarakat kami menuntut untuk revisi. Kita tidak akan pulang sebelum Perpres 104 Tahun 2021 direvisi," ujar salah satu orator di kawasan Patung Kuda, Kamis, 16 Desember 2021.

Massa aksi tampak memadati kawasan pintu masuk Monas. Mereka membawa beberapa atribut pelengkap, dari bendera hingga spanduk.

Sedangkan Ketua DPP Apdesi, Surta Wijaya, meminta agar penggunaan dana desa dilakukan berdasarkan permusyawaratan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. "Harus direvisi berdasarkan asas hukum pengakuan dan subsidiaritas dan kewenangan Desa dalam UU No 6/2014 tentang Desa, sehingga Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus Dana Desa sesuai hasil permusyawaratan di Desa," ujarnya.

Dia menilai keuangan desa dalam APBN berdasarkan kewenangan Desa. Sehingga, Surta menyebut Menteri Keuangan harus menerbitkan kebijakan pengelolaan keuangan dalam APBN tanpa membatasi penggunaan dana desa untuk perlindungan sosial, program ketahanan pangan dan hewani, serta dukungan pendanaan COVID-19.

"Kami meminta dengan hormat dukungan publik, terutama dari bupati/wali kota dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menunda pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Perpres No. 104/2021 tentang Rincian APBN TA 2022 yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa pada TA 2022, sehingga Dana Desa kembali digunakan sesuai asas pengakuan, subsidiaritas dan permusyawaratan dalam UU No. 6/2014 tentang Desa. Desa tidak boleh menjadi korban dari kebijakan sentralistik pengelolaan keuangan negara dan Kepala Desa tidak menjadi korban kebijakan yang berujung pada kesalahan administrasi dan perbuatan pidana," tandasnya.

Akhirnya sekitar 10 orang perwakilan dari massa aksi diundang masuk ke Istana beraudiensi. Namun kemudian, Apdesi menyebut pihak Istana tak dapat memenuhi tuntutan mereka.

"Presiden tidak ditempat, dia tidak memenuhi tuntutan kita. Kita nggak perlu lama-lama. Kita pergi ke gedung

DPR MPR, kita ngadu ke beliau. Kita langsung ke sana, pergi ke gedung MPR DPR," kata Ketua Umum DPP Apdesi, Surta Wijaya, dari atas mobil komando.

"Maju, maju, maju," ujar massa aksi di lokasi.

Tampak koordinator massa aksi Apdesi dan pihak kepolisian melakukan koordinasi terkait perpindahan

syarat yakni massa tidak boleh long march. "Silakan, tapi dengan satu syarat tidak boleh long march," tegas Hengky kepada koordinator.

Maka Surta Wijaya menyerukan massa aksi agar mengikuti arahan kepolisian dan bergerak ke gedung DPR-MPR RI menggunakan kendaraan. Dia menegaskan tak bertanggung jawab atas peserta demo yang tak ikut ara-



lokasi aksi. Lalu lintas di sekitar lokasi pun tampak macet.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi mengatakan massa aksi boleh bergerak ke gedung DPR MPR RI. Namun Hengki memberi

han polisi. "Hari ini kita ke DPR RI pakai kendaraan. Kalau kawan-kawan memaksakan long march silakan, tapi kami koordinator tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Toh tiba di DPR petang itu, tak ada



lagi kemungkinan audiensi. Sebagian wajah massa terlihat kecewa. Alhasil, muncul suara agar Apdesi tahun depan tak perlu mencairkan dana desa.

"Tidak perlu dicairkan, biarkan saja. Artinya satu, sepakat tidak ada lagi dana desa dari pusat. Tidak ada lagi yang perlu kita jalankan," kata Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya di depan gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat, petang itu.

Ia mengaku kecewa karena tak ada perwakilan dari DPR yang menerima pihaknya untuk audiensi sore ini. Sebelum bergerak ke gedung DPR, massa Apdesi lebih dulu berunjuk rasa di kawasan Monas dan diterima oleh perwakilan Istana, tapi mereka merasa tuntutan mereka tak dapat dipenuhi di akhir audiensi itu.

"Kita rasakan hari ini sangat ironis, surat kita sudah masuk, bahkan dari intel pun menyatakan kita udah siap akan diterima. Kenyataannya satu pun tidak berani bertemu kita," ucap Surta Wijaya.

Surta Wijaya mengancam akan mengerahkan lebih banyak massa Apdesi lagi hingga tuntutannya dipenuhi. "Kita tunggu sampai Desember. Nanti kita datang lagi dengan massa yang lebih banyak," tandasnya.

Sebelumnya, Surta mengemukakan latar belakang aksi Apdesi kali

ini. Ia menyatakan aksi ini menggugat ketidakpercayaan negara terhadap Desa dalam mengatur dan mengelola Dana Desa, padahal selama masa pandemi Covid-19, desa berada di depan dalam mengatasi dampak Covid-19. "Maka Apdesi yang mendorong adanya revisi Pasal 5 ayat (4) tentang Penggunaan Dana Desa," ungkapnya, Rabu, 15 Desember 2021.

Surta Wijaya menjelaskan, dalam naskah Perpres No.104 tahun 2021, penggunaan Dana Desa ditujukan untuk beberapa hal: (1) Perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa paling sedikit 40 persen. (2) Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 persen. (3) Dukungan dana penanganan paling sedikit delapan persen dari Dana Desa setiap Desa, serta program sektor prioritas lainnya.

Selama ini, sambung Surta Wijaya, kepala desa dan perangkat desa punya energi sosial berupa tradisi tangan bagi masyarakat Desa yang miskin. Tanpa menunggu penanganan Covid-19, Desa menggunakan kearifan lokal untuk mengatasinya. "Misalnya, mencari tempat isolasi mandiri, memberikan makanan bagi warga yang pandemi dan langkah aktif lainnya," terangnya.

Surta Wijaya mengakui, Pasal 5 ayat (4) berniat baik, tapi mengurangi ke-

percayaan pada Desa untuk mengelola Dana Desa bagi rakyat secara total.

Terlebih, lanjutnya, saat ini kondisi kesehatan sudah kondusif. Desa sudah menjalankan instruksi pusat untuk melakukan pendataan dan hal lainnya. "Desa tepat bangkit secara ekonomi. Bukan malah menerima suruhan agar mengubah hasil kesepakatan dalam Musrenbangdes demi kepentingan pusat," ungkap Surta.

DPP Apdesi, kata Surta, percaya Presiden mempunyai kearifan untuk membangun Indonesia dari pinggiran, baik yang berawal dari daerah dan Desa. Bukan membangun Indonesia dari pusat dan menyisakan sekitar 32 persen sebagai simbol pengakuan dan subsidi negara terhadap Desa.

Ringkasnya, Desa ingin pemerintah melihat lagi UU No 6/2014 tentang Desa yang menyangkut kewenangan alokasi dana berhadapan dengan Perpres 104 yang mengatur alokasinya pada 2022.

Kewenangan alokasi dana desa selama ini berangkat dari bawah karena melibatkan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Jika Perpres 104 diterapkan, otomatis hasil Musrenbang desa berantakan diterjang Perpres.

Ini juga soal tata kelola pemerintahan. Mana lebih tinggi hirarkinya, UU Desa atau Perpres? Apdesi paham soal itu. Entahlah yang menyusun Perpres 2021. •

HAJI SURTA DARI BABAKAN ASEM

Sehari-harinya, Drs H Surta Wijaya adalah Kepala Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten. Belum lama sebenarnya Surta terpilih menjadi Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Jakarta.

Ia mulai menduduki jabatan Ketua Umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) IV di Golden Boutique Hotel Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 18 September 2021. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Prof Drs H Muhammad Tito Karnavian MA PhD yang membuka resmi Munas itu.

Dalam sambutan sekaligus pengarahannya Mendagri Tito mengemukakan, menuju Indonesia Emas 2045 kunci pentingnya adalah memperkuat desa. Desa menjadi pusat ekonomi baru, pemerataan pembangunan, menciptakan lapangan pekerjaan dan ujungnya adalah desa maju dan mandiri, membangun dari pinggiran itu adalah desa.

"Hal tersebut butuh kemampuan desa, kepala desa harus mengerti administrasi pemerintahan dan juga administrasi keuangan, dan harus mampu menjadi negarawan dengan merangkul semua pihak, serta memiliki kemampuan leadership. Dan memiliki jiwa entrepreneurship.

Untuk desa yang lebih Berjaya dan

kaya nantinya. Spirit memperkuat desa harus benar-benar ditangkap oleh desa. Jika ada problem dalam penyelenggaraan desa sampaikan ke Dirjen Pemdes. Kami akan berjuang, itu pasti," ungkapnya.

Yang mungkin luar biasa, Surta terpilih secara aklamasi lantaran tak ada lagi yang mau mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Apdesi 2021-2026. Maka jadilah Surta Wijaya sebagai orang Banten pertama yang menjadi pucuk pimpinan DPP Apdesi. "Alhamdulillah, saya mengucapkan syukur tak terhingga. Ini berkat doa dan dukungan semua pihak, saya terpilih menjadi Ketum DPP Apdesi," ujar Surta Wijaya, Selasa, 21 September 2021.

Surta Wijaya sebelumnya merupakan Ketua DPD Apdesi Provinsi Banten untuk periode 2020 – 2025 dalam sebuah pemilihan yang secara aklamasi memilihnya kembali untuk ketiga kali. Sedangkan di Munas Apdesi, Surta terpilih dengan mengusung tema "Masyarakat Giat Desa Kuat".

Apdesi merupakan wadah berkumpul para Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang aktif maupun purna bakti seluruh Indonesia. Organisasi ini dideklarasikan pada tanggal 17 Mei 2005 di Jakarta.

Berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi, Apdesi berdiri berdasarkan kesamaan pandangan dan pemikiran yang sama dalam memban-

gun Pemerintah Desa dan masyarakat Desa, namun beraneka ragam dalam konteks sosial, budaya, kemampuan moral maupun material. Sedangkan visi dan misi Apdesi adalah "Terwujudnya Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa yang Maju, Kuat, Sejahtera, Mandiri dan Demokratis".

Nah, Surta menegaskan, setelah mengemban amanah untuk memimpin DPP Apdesi, Ketua Umum beserta jajaran pengurus akan segera melakukan konsolidasi organisasi. Menurut dia, hal ini bertujuan agar mesin organisasi bisa langsung bergerak untuk melakukan konsolidasi hingga kepengurusan tingkat kecamatan di seluruh Indonesia.

Kades Babakan Asem ini pun mengakui tugas tersebut tidak mudah karena menyangkut urusan kemajuan nasional bangsa Indonesia. "Ini memang bukan tugas ringan. Insya Allah Apdesi akan memberikan kontribusi pemikiran dan tenaganya untuk kemajuan bangsa dan negara," kata Surta Wijaya.

Harap maklum, pasca pengesahan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Apdesi seperti tenggelam dan sibus mengurus Dana Desa yang mengalir hingga Rp70-80 triliun per tahun dari alokasi APBN sebelum pandemi Covid-19 tiba.

Kini momentum perjuangan terkait alokasi dana desa muncul kembali. Surta pun turun ke jalan. Bagaimana hasilnya, kita lihat saja nanti. •





Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, menerima kunjungan Duta Besar Denmark untuk Indonesia, H.E. Lars Bo Larsen.

HADIRKAN TEKNOLOGI KEBENCANAAN DI NEGERI CINCIN API

► Kemenkominfo Jajaki Kerja Sama Dengan Denmark

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berkolaborasi dengan Naganaya Indonesia menghadirkan teknologi kebencanaan terbaru dalam Indonesia International Disaster Expo & Conference (IIDEC) 2021.

Kegiatan tersebut merupakan satu rangkaian pameran dan konferensi mengenai solusi, riset dan teknologi bencana alam yang akan diadakan dalam platform virtual inovatif. Pameran berlang-

sung dari 8-15 Desember 2021, sedangkan konferensi diselenggarakan 14-15 Desember 2021.

Ketua Panitia IIDEC 2021 sekaligus Peneliti BRIN, Joko Widodo, menjelaskan, melalui International Conference

dengan tema "Riset, Teknologi, dan Industri Penanggulangan Bencana", kegiatan ini diharapkan akan menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan pengurangan dan mitigasi risiko bencana.

"Para pemangku kepentingan dapat merumuskan serta membangun ekosistem riset teknologi yang tepat guna dalam mendukung program reduksi resiko bencana di Indonesia pada khususnya dan dalam tatanan global pada umumnya, serta didukung oleh peran serta BUMN dan Swasta untuk memanfaatkan hasil riset untuk dikembangkan sebagai Industri kebencanaan yang mandiri," kata Joko.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana (PTRRB), Mulyo Harris Pradono, menyatakan, PTRRB adalah salah satu pusat di bawah naungan BRIN yang diberi-

“

Denmark memiliki teknologi yang bisa mendukung koordinasi tata kelola lintas kementerian dan lembaga dalam penanganan bencana dan perlindungan publik. Apalagi, Indonesia yang berada di kawasan ring of fire yang kerap terjadi bencana alam.

kan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi reduksi risiko bencana.

"PTRRB telah melakukan beberapa pengembangan teknologi, antara lain Landslide Early Warning System (LEWS), Flood Early Warning System (FEWS), Bio-textile (Soil Protection and Soil Erosion Control), Si Jagat (Sistem Kaji Cepat Risiko Gempa Bumi Gedung Bertingkat), SiKuat (Sistem Informasi Kesehatan Struktur Gedung Bertingkat) dan Indonesian Network for Disas-

ter Information (INDI) sebagai platform integrasi data kebencanaan.

Dengan diadakannya IIDEC 2021 diharapkan dapat meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan riset dan inovasi teknologi di bidang kebencanaan.

Direktur Naganaya Rafidi Iqra, menerangkan, IIDEC 2021 tidak hanya akan membahas solusi, tetapi juga memberikan beragam insight dan pengetahuan seputar perkembangan teknologi kebencanaan dan penerapannya pada masa mendatang.

Selain menghadirkan produk dan solusi teknologi terkini dalam pameran virtual, rangkaian acara yang

Handoko mengatakan, BRIN memiliki organisasi yang dapat mendukung aktivitas riset kebencanaan, meliputi ilmu sosial humaniora untuk menggali kearifan lokal dan akuisisi data berbasis citra satelit.

"Juga riset biologi untuk memahami mekanisme terjadinya bencana, serta ilmu science dan keteknikan untuk pengembangan berbagai sensor, simulasi, serta teknologi mitigasi kebencanaan," ujarnya saat pembukaan IIDEC 2021 di Jakarta, Selasa (14/12/2021).

Melalui berbagai organisasi tersebut, BRIN siap mendukung riset-riset terkait penciptaan berbagai teknologi. Lembaga yang dipimpinnya juga siap



akan digelar selama dua hari ini juga menghadirkan topik-topik konferensi menarik, di antaranya kebijakan dan regulasi dalam penanggulangan bencana, inovasi dan teknologi terkini dalam mitigasi bencana, peran institusi swasta dan NGO dalam optimalisasi kesiapan terhadap bencana.

Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, mengatakan, pemahaman terhadap mekanisme bencana, khususnya non-hidrometeorologi, sangat penting untuk diperkuat. Hal ini terutama terkait kemampuan bangsa dalam memitigasi bencana yang mungkin terjadi.

mendukung kebijakan penanganan bencana yang berbasis science, serta bukti berbasis data yang solid.

Peneliti dari Pusat Riset Geoteknologi BRIN, Eko Yulianto, merekomendasikan tiap rumah di Indonesia memiliki ruang aman untuk berlindung, dalam upaya mengantisipasi gempa yang datang tiba-tiba.

"Indonesia masih bermasalah dengan ancaman gempa, tapi faktor utamanya bukan gempanya, tapi justru kualitas bangunannya," kata Eko.

Eko menuturkan, kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bisa men-

jadi besar jika kualitas bangunan tidak baik. Sehingga banyak bangunan/ru-
mah runtuh atau rusak dan menimpa
penghuni di dalamnya yang mengaki-
batkan kerugian besar dan kehilangan
nyawa.

Oleh karenanya, penting di dalam
suatu rumah, ada ruang aman untuk
penghuni agar dapat berlindung ke-
tika gempa datang menggoncang.

Eko menjelaskan, pada peristiwa
gempa Yogyakarta 2006, gempa yang
hanya memiliki magnitudo 5,9 bisa
merusak ratusan ribu rumah warga.
Hal itu utamanya disebabkan oleh
kualitas bangunan yang tidak baik,
sehingga rumah mudah roboh atau
rusak.

Kemudian, gempa Lembang
pada 2011 bisa menyebab-
kan sekitar 300 rumah
warga rusak, padahal
kekuatan gempanya
hanya 3,3. Itu juga
utamanya dis-
ebabkan oleh
kualitas ban-
gunan yang
kurang baik.

Menurut Eko,
membuat ru-
ang aman di
rumah warga
masing-masing
menjadi suatu
hal yang realistis
yang bisa
di-

lakukan masyarakat.

Ruang aman bisa berupa suatu ru-
angan yang diperkuat, sehingga kalau
ada goncangan gempa, ruang terse-
but bisa digunakan untuk berlindung.

Ruang aman bisa berupa kamar ti-
dur atau kamar mandi yang diperkuat,
sehingga penghuni rumah bisa masuk
dan berlindung di ruang tersebut.

Selain itu, ruang aman juga bisa
menggunakan perabot rumah tangga,
misalnya meja yang diperkuat kaki-
kakinya, dan tempat tidur tingkat atau
tidak tingkat yang diperkuat kaki-kak-
inya, sehingga bisa dipakai untuk ber-
lindung.

Penguatan ruang kamar tidur atau
kamar mandi bisa dilakukan dengan
menambah besi atau beton yang
diperkuat.

Jika warga terkendala biaya
untuk memperkuat kamar tidur
atau kamar mandi tersebut,
maka bisa menggantikan ru-
ang aman dengan meman-
faatkan perabot, seperti meja
makan dan tempat tidur
yang kaki-kakinya diperkuat.

Dengan penguatan itu,
maka meja atau tempat
tidur bisa lebih kuat dan
kaki-kakinya tidak patah
atau hancur ketika kejatu-
han benda dari atas.

Dengan demikian,
penghuni ru-
m a h
da-

pat aman berlindung di dalam kamar
tidur atau kamar mandi, dan di bawah
meja makan atau tempat tidur yang su-
dah diperkuat itu.

Pada 19 November lalu, Menteri
Komunikasi dan Informatika (Men-
kominfo), Johnny G. Plate, menerima
kunjungan Duta Besar Denmark untuk
Indonesia, H.E. Lars Bo Larsen.

Pada pertemuan tersebut, salah
satu yang dibahas adalah tentang
hubungan kerja sama bidang teknolo-
gi kebencanaan.

"Kami mendiskusikan tentang Den-
mark yang mempunyai teknologi ke-
bencanaan dan saat ini menyiapkannya
untuk bekerja sama pada sektor
public protection and disaster di Indo-
nesia," kata Johnny.

Menurut Johnny, Denmark memi-
liki teknologi yang bisa mendukung
koordinasi tata kelola lintas kemente-
rian dan lembaga dalam penanganan
bencana dan perlindungan publik.
Apalagi, Indonesia yang berada di ka-
wasan ring of fire yang kerap terjadi
bencana alam.

Johnny mengatakan, di era trans-
formasi digital, ada teknologi yang bisa
digunakan untuk memudahkan pen-
anganan bencana, baik yang terkait
early warning system, maupun penan-
ganan saat dan setelah bencana.

"Teknologi yang ada di Denmark
sudah dikenal secara global, jadi
teknologi ini yang kami diskusikan,"
kata Johnny.

Johnny pun berharap agar Den-
mark bisa segera menyampaikan pro-
posal kerja sama yang dapat dikem-
bangkan untuk penanganan bencana
di Indonesia. Persiapan juga perlu
dilakukan, terutama karena ini terkait
dengan pembiayaan yang melibatkan
dan kementerian, serta lembaga lain.

Perencana Ahli Madya Badan Na-
sional Penanggulangan Bencana
(BNPB), Robi Amri, menambahkan,
aplikasi mitigasi bencana akan di-
dorong untuk masuk ke sistem
aplikasi startup di Indonesia,
mengikuti langkah PeduliLind-
ungi.

Robi menyebut, saat ini
hampir semua informasi

Ketua DPD
AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

terkait mitigasi kebencanaan bisa di-
akses melalui smartphone. Aplikasi
tersebut adalah inaRISK Personal, info
BMKG, dan Magma Indonesia.

"Mitigasi kebencanaan harus
mengikuti perkembangan teknologi
dan perubahan masyarakat," ujarnya,
Senin (13/12/2021).

Menurut Robi, aplikasi-aplikasi
tersebut memang tidak secara lang-
sung terlihat mengurangi dampak fa-
tal dari bencana. Apalagi, pemahaman
masyarakat terhadap potensi bencana
dan strategi antisipasinya sudah mulai
meningkat.

Dia mengatakan, aplikasi inaR-
ISK saat ini masih dalam proses
pengembangan. Fokus utama kam-
panye penggunaan inaRISK adalah di
wilayah rawan bencana yang memiliki
tingkat kepadatan penduduk cukup
tinggi.

Secara bertahap, pengembangan
inaRISK terus dilakukan untuk mem-
berikan kemudahan akses kepada
seluruh pengguna dalam berbagai
kondisi. Beberapa fitur inaRISK saat ini
sudah dapat digunakan tanpa akses
jaringan internet.

Menurutnya, pengembangan ap-
likasi inaRISK ke depan akan diarahkan
untuk masuk ke dalam sistem aplikasi
para startup, terutama aplikasi super.

Langkah tersebut mengikuti
PeduliLindungi yang telah masuk di
beberapa sistem aplikasi. Aplikasi ke-
bencanaan akan terus berkembang
menyesuaikan perkembangan IoT, ke-
butuhan masyarakat pengguna, dan
perkembangan teknologi termasuk
penggunaan AR (augmented reality).

Pemerintah akan memberikan
dukungan penuh untuk pengem-
bangan aplikasi mitigasi, apalagi
ini menyangkut keselamatan
masyarakat luas dalam kebenc-
naan.

Ketua DPD AA LaNyalla Mah-
mud Mattalitti juga mendorong
pemerintah untuk melakukan ri-
set mitigasi kebencanaan secara
komprehensif.

LaNyalla mengatakan, hal itu
penting untuk dilakukan lantaran
Indonesia berada pada zona cincin

Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko

api yang rentan terhadap bencana.

"Seluruh potensi kebencanaan
itu harus diidentifikasi. Begitu juga
dengan mitigasinya, harus disiapkan
dengan baik, karena potensi bencana
yang cukup besar di Indonesia," kata
LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu men-
dorong realisasi pengadaan teknologi
kebencanaan yang dipamerkan di
IIDEC 2021.

la meminta peran PTRRB yang be-
rada di bawah naungan BRIN untuk
mempercepat pengkajian dan
penerapan di bidang teknologi
reduksi risiko bencana.

"Negara kita sudah berada
dalam kondisi darurat kebenc-
nanaan. Penting untuk dilaku-
kan kajian dan riset secara
komprehensif," papar dia.

Dikatakan, pemerintah
perlu menyegerakan peru-
musan serta pembangunan
ekosistem riset teknologi untuk
mereduksi resiko bencana di
Indonesia dan mewu-
judkan dalam
bentuk

yang lebih baik.

"Saya meminta teknologi yang dimi-
liki sedapat mungkin dimaksimalkan
dan dimanfaatkan untuk mereduksi
risiko bencana di Indonesia," katanya.

LaNyalla berharap, para pemangku
kepentingan dapat merumuskan serta
membangun ekosistem riset teknologi
yang tepat guna dalam mendukung
program reduksi
risiko bencana di
Indonesia. ●





KELILING INDONESIA DEMI PRESTASI OLAHRAGA

► DBON Jadi Panduan Indonesia Menuju Nomor Lima Olimpiade 2044

2021 menjadi tahun kebangkitan olahraga nasional. Beragam event olahraga skala nasional hingga internasional mampu dilaksanakan dengan baik, meski dunia masih dilanda pandemi COVID-19.

Bahkan, Indonesia sudah ditunjuk menjadi tuan rumah event olahraga dunia dalam beberapa tahun ke depan. Misalnya, tuan rumah balapan MotoGP dan World Superbike 2022. Selain itu, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Sejalan dengan meningkatnya pengakuan dunia atas Indonesia di dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga punya tugas yang sangat berat untuk menyiapkan atlet-atlet yang nantinya akan membawa harum nama

bangsa.

Pemerintah sudah menyiapkan panduan pembinaan atlet untuk jangka panjang tersebut dalam sebuah Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Aturan tersebut akan memberikan panduan perencanaan di bidang olahraga, mulai dari hulu hingga hilir, yang ditujukan untuk peningkatan prestasi olahraga nasional di kancah dunia.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, jadi yang paling sibuk

dalam melakukan sosialisasi peraturan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 9 September 2021 lalu itu. Dalam beberapa bulan terakhir, Zainudin sudah melakukan sosialisasi DBON di beberapa provinsi di Indonesia, antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara.

Menteri asal Gorontalo ini menjelaskan, DBON lahir sebagai jawaban atas arahan Presiden Jokowi yang meminta dirinya untuk melakukan review

total terhadap ekosistem dan prestasi olahraga di Tanah Air, bertepatan Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-37 pada September 2020 lalu.

"Awalnya yang mau diterbitkan Inpres, tapi karena ini penting serta sustainable, sehingga jangan sampai berganti pimpinan atau menteri kemudian muncul kebijakan baru. Maka, harus ada payung hukum yang kuat, sehingga lahir Perpres 86/2021. Sekarang, dalam Revisi Undang-Undang SKN rohnya dari undang-undang itu adalah Desain Besar Olahraga Nasional," kata Menpora di Nusa Dua, Bali, 1 Desember 2021.

Menpora menekankan pentingnya implementasi aturan Perpres DBON tersebut oleh para stakeholder olahraga, terutama kepala daerah baik gubernur, wali kota, bupati dan masyarakat.

"Sekarang aturannya sudah ada, desainnya sudah ada, tinggal kita bagaimana mengerjakan ini. Sebab, sebagai apapun dasar hukumnya, sebagai apapun desainnya, kalau implementasinya macet sama saja," ucapnya.

Menpora mengungkapkan, tujuan lahirnya DBON adalah meningkatkan kebugaran dan budaya olahraga di tengah-tengah masyarakat.

"Budaya olahraga ini menjadi hulu dari prestasi, prestasi itu hilir. Prestasi itu hasil dari kebugaran masyarakat. Kalau masyarakat tidak bugar, maka sulit mendapatkan talenta dan bibit yang baik," kata dia.

Oleh karena itu, hal yang paling pertama dilakukan dalam DBON yakni memperbaiki tingkat kebugaran masyarakat.

"Kalau masyarakat bugar, kita sangat mudah mencari talenta. Sekaligus membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul dan kompetitif. Itu diawali dari kebugaran fisik," ujarnya.

Muatan lain yang terkandung dalam DBON, yakni adanya kewajiban dari para kepala daerah, baik gubernur, bupati dan wali kota untuk memajukan perekonomian nasional berbasis olahraga.

Sebab, melalui kegiatan-kegiatan olahraga, baik sepak bola, basket,

voli dan olahraga lainnya, sangat berdampak terhadap perekonomian di daerah. Misalnya, ketika kompetisi Liga 1 dan Liga 2 terhenti selama pandemi, ada potensi kehilangan sekitar Rp3 triliun.

"Jadi dalam DBON, selain olahraga prestasi kita juga membicarakan dampak-dampak ekonomi dari kegiatan-kegiatan olahraga," katanya.

Hal lain yang diatur dalam DBON yakni sport tourism, sport industry, olahraga masyarakat, serta olahraga pendidikan. Dengan demikian, DBON menjadi pedoman bagi stakeholder olahraga seluruh Indonesia.

"Fungsi dari DBON ini menjadi pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, juga induk organisasi cabang olahraga yang selama ini belum tertata dengan baik. Selama ini belum ada pedoman. Maka, sekarang ada pedoman, ada kompasnya, ini akan bermanfaat terhadap industri, akademisi, media dan masyarakat dalam penyelenggaraan olahraga nasional," ujarnya.

"Sehingga, diharapkan pembinaan olahraga nasional dapat berjalan efektif, efisien kemudian bisa terukur dan akuntabel dan sustainable, berkelanjutan," harapnya.



Zainudin juga memastikan, dalam DBON tidak hanya mengatur pembinaan atlet berprestasi. Namun juga menjamin masa depan atlet, terutama terkait kesejahteraannya.

"Di dalam Desain Besar Olahraga Nasional, itu kita atur dari hulu sampai ke hilir. Kebugaran masyarakat sampai atlet berprestasi, dan masa depan serta pasca dia jadi atlet," ungkapnya.

Maka dari itu, Menpora mengimbau kepada para orang tua untuk tidak lagi khawatir dan melarang anaknya untuk memilih jalan menjadi atlet. Sebab, masa depan mereka akan terjamin dan kesejahteraannya diperhatikan pemerintah.

"Sehingga bagi orang tua jangan khawatir kalau anaknya memilih jalur atlet, asal betul keinginannya dan dia berbakat, dengan ukuran ukuran-ukuran sport science," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, saat ini sejumlah cabang olahraga sudah memiliki bapak angkat masing-masing atau penanggung jawab dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membantu pendanaan. Misalnya, cabang sepak bola bapak angkatnya dari BRI, bulu tangkis dari BNI, dan bola basket dari Bank Mandiri.

"Ini sejak awal mereka diproyeksikan menjadi atlet. Jadi, BUMN yang sehat atas kesepakatan dengan Kementerian BUMN mereka harus membina atlet itu, sehingga berprestasi. Jadi jangan khawatir kalau anaknya mau

berkarir sebagai atlet akan sama dengan dia menjadi karyawan BRI," tutur dia.

Menpora menegaskan bahwa Perpres 86/2021 tentang DBON dibuat untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi di tingkat dunia, dengan Olimpiade dan Paralimpiade sebagai target utamanya.

"Prestasi-prestasi yang muncul sekarang itu kalau boleh saya katakan tidak by design. Padahal, untuk

menuju satu prestasi terstruktur, kemudian berkelanjutan dan pembinaan usia dini harus ada desain. Saya sering ibaratkan prestasi itu tidak bisa ditemukan, harus dibuat, harus dicetak, harus di pabrik. Pabrik prestasi itu adalah DBON ini," tegasnya.

Zainudin menambahkan, melalui DBON, pembinaan olahraga prestasi difokuskan pada 12 cabang yang sudah dipertandingkan di Olimpiade dan dua cabang yang belum dipertandingkan di Olimpiade. Target utamanya adalah bisa masuk peringkat lima dunia pada Olimpiade 2044.

Cabang olahraga yang masuk

Kami menerapkan sistem promosi dan degradasi," ujar Menpora.

"Pada Olimpiade 2044, Indonesia harus masuk di peringkat 5 dunia. Di Paralimpiade juga demikian. Target ini ditetapkan setelah kami berdiskusi dengan para pakar. Jadi, ada hitungannya untuk masuk ke target itu. Jika kita konsisten dan berstruktur, maka peringkat 5 dunia di Olimpiade 2044 bukan hal mustahil," tegasnya.

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat dan Provinsi menyatakan komitmennya untuk mendukung implementasi DBON demi peningka-

anggotanya.

"Kami mengambil satu peran yang betul-betul berdampak dan optimal di dalam pencapaian sasaran dari DBON itu, yaitu bagaimana menambah juara-juara pada multi event internasional, puncaknya adalah Olimpiade," kata Marciano, Kamis (10/12/2021).

"Kami memberikan pendampingan kepada cabang olahraga, agar mereka benar-benar melakukan sesuai dengan programnya, sesuai dengan sport science-nya, sesuai dengan sistem pembinaan yang dikehendaki," sambungnya.

Sebagai atlet yang masih ak-

ke bawahnya, ke KONI seperti apa, kota/kabupaten dan cabang-cabang olahraganya seperti apa, nah, itu sejalan tidak. Apabila sejalan, kemungkinan bisa sukses," kata Eko.

Peraih perak dalam dua edisi Olimpiade itu juga berharap, DBON bisa lebih menunjang fasilitas bagi para atlet nasional, termasuk kualitas tempat latihan, gizi, fisioterapi dan recovery.

Menurut Eko, tugas atlet hanyalah berlatih dan bertanding untuk juara. Sedangkan persiapan untuk meraih prestasi menjadi peran dari pemerintah serta induk organisasi olahraga.

"Kalau kami sebagai atlet hanya

"Saya berharap DBON bukan cuma alat doang, tetapi juga sport science (diperhatikan) karena atlet banyak yang belum mengerti tentang kondisi tubuhnya seperti apa," ujar Anthony.

Menurut dia, penerapan sport science juga sangat penting bagi atlet. Salah satunya untuk menemukan program latihan yang tepat saat sedang menjalani pertandingan.

Ia mencontohkan, tiga turnamen Indonesia Badminton Festival yang digelar secara beruntun di Bali memiliki jadwal pertandingan yang padat. Para atlet hanya memiliki waktu istirahat sedikit dari satu pertandingan ke

tingkatkan. Prestasi tidak muncul begitu saja, prestasi dihasilkan melalui sebuah proses pembinaan dari hulu hingga hilir yang sistematis dan berkelanjutan," kata Jokowi, 9 September lalu

"Kita harus fokus bekerja mencetak talenta-talenta hebat di bidang olahraga, agar lahir semakin banyak atlet unggul yang akan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, yang berpotensi besar mendulang prestasi di olimpiade," sambung Jokowi.

Jokowi menyebut, Indonesia memiliki bibit unggul di berbagai cabang



dalam prioritas DBON adalah atletik, bulu tangkis, panjat tebing, senam artistik, angkat besi, balap sepeda, panahan, menembak, renang, dayung, karate, taekwondo, wushu dan pencak silat.

"Ke-12 cabang itu adalah cabor yang menyumbangkan medali di Olimpiade dan punya harapan untuk menyukseskan target-target ini. Namun, 12 cabang ini tidak kekal di dalam DBON. Kalau ada cabor yang tidak berprestasi, maka akan dikeluarkan dari DBON.

tan prestasi olahraga Tanah Air.

Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, mengatakan, pihaknya dan para pimpinan KONI daerah siap melakukan pendampingan secara serius kepada cabang-cabang olahraga agar menjalankan program yang sejalan dengan DBON.

Menurut dia, peran organisasi pembinaan olahraga anggota KONI sangat penting. Sebab, atlet-atlet juara yang ditargetkan DBON merupakan hasil dari pembinaan olahraga KONI beserta

tif bertanding, lifter senior Eko Yuli Irawan, berharap DBON dapat terimplementasi dengan baik. Tidak hanya di pusat, tetapi juga sampai ke bawah hingga kota dan kabupaten.

Menurut Eko, DBON memiliki program yang bagus untuk peningkatan prestasi olahraga nasional. Namun, pemerintah pusat harus bisa memastikan program itu juga bisa berjalan di daerah.

"Sebagai atlet, program DBON luar biasa, tinggal gimana (implementasi)



bertanding dan berlatih sebaik mungkin. Tinggal mempersiapkannya seperti apa, tempat latihan, fisioterapi, recovery, gizi. Kami sebagai pelaku olahraga sudah latihan berat, hanya gimana sistem recovery-nya sudah dipikirkan belum," ucap Eko.

Hal serupa juga disampaikan pebulu tangkis tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting. Dia mengatakan pentingnya sarana dan prasarana serta penerapan sport science demi menunjang prestasi atlet.

pertandingan berikutnya.

"Sport science penting banget. Dari sisi latihan, misalnya, kami tidak bisa berlatih seperti saat sedang tidak ada pertandingan. Latihan harus tetap ada, tapi, kan, programnya seperti apa, itu harus menyesuaikan karena tidak bisa latihan yang diforsir," ungkap Ginting.

Saat meluncurkan Perpres 86/2021, Presiden Jokowi meminta seluruh pihak fokus bekerja mencetak talenta hebat di olahraga.

"Prestasi olahraga harus terus kita

yang dipertandingkan di Olimpiade. Sehingga bisa dimaksimalkan dalam pesta olahraga dunia yang akan datang.

"Untuk itu, saya mengajak pemangku kepentingan untuk bersinergi menciptakan ekosistem industri olahraga yang semakin modern, menyelenggarakan kompetisi olahraga yang sehat, dan memacu prestasi untuk menemukan talenta unggul sejak dini, untuk memajukan dunia olahraga di Indonesia," ujarnya. ●



Kaleidoskop Kementerian Pemuda dan Olahraga 2021

TAHUN KEBANGKITAN OLAHRAGA NASIONAL

Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi salah satu kementerian yang paling sibuk di tahun 2021. Sepanjang tahun ini, kementerian yang dipimpin Zainudin Amali disibukkan dengan beragam event dan kompetisi olahraga, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pandemi COVID-19 yang membuat banyak kegiatan di 2020 terpaksa ditunda dan dibatalkan, menjadi pelajaran dalam menggelar event olahraga tahun ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Event olahraga di Tanah Air dimulai dengan dibukanya turnamen Indonesia Basketball League (IBL) 2021 yang dimulai pada 10 Maret hingga 4 Juni 2021. Event yang diselenggarakan

di dua lokasi berbeda ini, yakni Bogor dan Jakarta, menerapkan sistem bubble atau gelembung guna mencegah pemain, pelatih, ofisial hingga panitia dan media terkena paparan COVID-19.

Penerapan sistem gelembung tersebut mendapatkan apresiasi dari Zainudin Amali. Menurutnya, pelaksanaan IBL dengan sistem ini telah berjalan sukses.

"Saya senang apa yang dilakukan IBL, benar-benar sesuai dengan apa yang di-

ampaikan Direktur Utama IBL, Pak Junas, saat rapat koordinasi bersama lalu. Saya apresiasi kepada IBL dan Perbasi yang telah memenuhi komitmen. Mudah-mudahan semua kegiatan olahraga setelah ini juga bisa berlangsung dengan baik," ujar Mepora, 3 Juni 2021.

Tak lama berselang dari pembukaan IBL, PSSI juga menggelar turnamen sepak bola bertajuk "Piala Menpora 2021". Turnamen yang dilaksanakan di Stadion Manahan, Solo,

Jawa Tengah, 21 Maret hingga 25 April ini, merupakan upaya untuk kembali memanaskan dunia sepak bola Tanah Air yang sempat vakum selama setahun karena pandemi.

Turnamen Piala Menpora 2021 juga merupakan upaya PSSI dengan bantuan Kemenpora untuk bisa kembali menggelar kompetisi Liga 1 musim 2021/2022. Liga 1 musim ini akhirnya bisa kembali bergulir pada 27 Agustus lalu.

Bahkan, akhirnya pada pertengahan November lalu, Menpora juga mengumumkan bahwa pertandingan Liga 1 bisa dihadiri penonton dengan jumlah terbatas. Namun, uji coba itu hanya akan dilaksanakan di stadion yang memiliki single seat.

"PSSI dan PT LIB sedang menggodok, tetapi saya mendapatkan informasi dari PSSI dan PT LIB bahwa itu akan diuji coba di stadion yang ada single seat," ungkap Zainudin, 16 November lalu.

Menurutnya, pemilihan stadion

yang memiliki single seat bertujuan agar penerapan protokol kesehatan dapat diterapkan dengan baik, khususnya aturan jaga jarak.

"Itu kan penonton terbatas, tiketnya dijual sesuai nomor kursi. Kalau bangku rata bagaimana penomorannya,

pasti akan berdempetan dan tanda silangnya gimana," jelasnya.

Selain event di dalam negeri, Kemenpora juga disibukkan dengan kontingen Indonesia yang akan berlaga di Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2021. Olimpiade Tokyo dimulai pada





23 Juli hingga 8 Agustus 2021. Sementara, Paralimpiade Tokyo digelar 24 Agustus hingga 5 September 2021.

Pada Olimpiade Tokyo, kontingen Indonesia membawa pulang satu emas, satu perak dan dua perunggu. Sementara, kontingen Paralimpiade Tokyo membawa pulang dua emas, tiga perak dan empat perunggu.

Menpora pun menyatakan pemerintah telah menyiapkan bonus untuk kontingen Indonesia yang berhasil mempersembahkan medali untuk Merah Putih. Peraih emas mendapatkan Rp5,5 miliar, perak Rp2,5 miliar, dan perunggu Rp1,5 miliar. Nominal tersebut besarnya sama antara kontingen Olimpiade dengan Paralimpiade Tokyo.

Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada para atlet yang belum berhasil mempersembahkan medali dengan nominal sebesar Rp100 juta.

Zainudin menegaskan pemerintah tak akan membedakan fasilitas dan apresiasi antara atlet yang berlaga di Olimpiade dan Paralimpiade.

"Pemerintah tidak membedakan atlet yang ikut Olimpiade dan Paralimpiade. Perhatian sama, fasilitas sama karena mereka datang ke sana atas nama bangsa dan negara," kata Menpora.

Event besar lain yang berhasil terselesaikan tahun ini tentu saja Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Papua 2020. Dua event pesta olahraga terbesar Tanah Air itu seharusnya digelar tahun lalu, namun ditunda akibat pandemi COVID-19.

Dua event yang berlangsung sejak awal Oktober hingga pertengahan November ini berjalan dengan sukses untuk pertama kalinya di Bumi Cenderawasih. Selain banyak memunculkan bibit-bibit atlet, lewat PON dan Peparnas diharapkan fasilitas yang dibangun dimanfaatkan untuk pembinaan olahraga nasional, khususnya atlet



yang berasal dari Indonesia timur.

Tahun ini, Indonesia juga berhasil kembali membawa pulang trofi turnamen bulu tangkis beregu Piala Thomas setelah penantian 19 tahun. Indonesia terakhir kali meraih trofi ini pada 2002 lalu. Pencapaian tersebut juga menjadikan Indonesia sebagai negara terbanyak yang mengoleksi Piala Thomas, yakni 13 kali.

Di akhir 2021, Indonesia juga sukses menggelar event berskala internasional. Ajang World Superbike (WSBK) dan Asia Talent Cup (ATC) untuk pertama kalinya sejak 1997 kembali digelar di Indonesia, tepatnya di Sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Bahkan, tahun depan Indonesia juga bakal menggelar empat kejuaraan balap dunia. Selain WSBK dan ATC, juga akan ada MotoGP dan MXGP, yang semuanya digelar di Mandalika.

Event olahraga internasional di Tanah Air ditutup dengan turnamen bulu tangkis bertajuk "Indonesia Badminton Festivals (IBF) 2021". Berlangsung di Nusa Dua, Bali, ada tiga turnamen yang digelar yakni Indonesia Masters, Indonesia Open, dan BWF World Tour Finals.

Sayangnya, Indonesia juga harus

menerima sanksi dari Badan Anti Doping Dunia (WADA) karena dinilai tidak patuh terhadap aturan yang diberlakukan. Akibat hal itu, Indonesia dilarang mengibarkan bendera Merah Putih

“
Penerapan sistem gelembung tersebut mendapatkan apresiasi dari Zainudin Amali. Menurutnya, pelaksanaan IBL dengan sistem ini telah berjalan sukses.

dalam kegiatan olahraga internasional yang diikuti. Namun, saat ini, Indonesia masih melakukan upaya agar sanksi tersebut bisa segera dicabut oleh WADA.

"Saya dapat informasi perkembangan ke arah positif, bahkan benar-be-

nar terjadi percepatan upaya-upaya dari tim LADI dan unsur pemerintah terhadap pemenuhan complain, sebagaimana yang dipersyaratkan WADA kepada LADI," kata Menpora, Senin (13/12/2021).

Menpora bahkan menyebut upaya Indonesia untuk mencabut sanksi itu lebih baik dari negara lainnya yang juga terkena sanksi.

Selain itu, saat ini Menpora juga tengah berkeliling Indonesia untuk melakukan sosialisasi terhadap Perpres 86/2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Dalam DBON itu, terdapat 10 provinsi yang akan menjadi sentra pembinaan. Yakni Papua, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Kalimantan Timur.

"Ke depan pembinaan akan terfokus dan target jelas, yakni Olimpiade dan Paralimpiade. Ajang Asian Games, Asian ParaGames, SEA Games dan ASEAN ParaGames itu hanya sasaran antara saja ke depannya. Kemudian cabor-cabor yang dibangun untuk menuju target dan ranking Olimpiade serta Paralimpiade sudah jelas," ucap Zainudin. ●



MENGGAUNGKAN KEMBALI AROMA DAN CITA RASA REMPAH NUSANTARA

► Kemenparekraf dan Dispar Maluku Menggelar Spice Island Festival 2021

Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dan Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah menggelar Festival Pulau Rempah-Rempah atau Spice Island Festival 2021.

Dipusatkan di pelataran Baileo Negeri Iha Mahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, 19 November 2021, Spice Island Festival digelar dengan mengusung

tema "Rempah Maluku, Cita Rasanya Seng Ada Lawang".

Festival ini merupakan ajang untuk menggaungkan kembali aroma dan cita rasa rempah khas Maluku, khususnya yang ada di Pulau Saparua,

yang konon menjadi primadona di kalangan penjajah Bangsa Eropa.

Wakil Bupati Maluku Tengah, Marlatu Leleury, menyampaikan, Spice Island Festival digelar sekaligus untuk mempromosikan berbagai keragaman

potensi kearifan lokal masyarakat, khususnya seni, budaya serta pariwisata. Harapannya, di masa mendatang dapat menjadi roda penggerak ekonomi masyarakat di Pulau Saparua.

"Kami ingin momentum ini menjadi penggerak. Sehingga Spice Island Festival akan memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi masyarakat di Pulau Saparua," terangnya.

Selain itu, Marlatu Leleury menjelaskan Spice Islands Festival dimaksudkan agar mampu memperkenalkan dan mempromosikan kebudayaan dan pariwisata Maluku, khususnya di Pulau Saparua.

Menurut Leleury, festival ini juga merupakan pemicu berkembangnya

berbagai potensi pariwisata di Pulau Saparua, serta dapat meningkatkan arus kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri ke daerah ini.

"Kita semua berharap melalui Spice Island Festival ini, dapat menumbuhkan kembali kecintaan masyarakat akan seni dan budaya serta rempah-rempah Maluku, sebagai salah satu kearifan lokal sekaligus memperkaya khazanah budaya nasional," tuturnya.

Leleury menambahkan, momentum ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengikutsertakan seluruh komponen bangsa dalam menyuburkan interaksi sosial yang sehat, meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta kebersamaan dan ke-

kompakan untuk membangun daerah dan bangsa ini.

Menurut cerita sejarahnya, Kepulauan Maluku dikenal sebagai daerah yang kaya akan rempah-rempah sejak zaman dahulu. Buktinya pun tercatat dalam buku berjudul *Suma Oriental* yang ditulis oleh Tomé Pires, seorang ahli obat-obatan asal Portugis yang telah menghabiskan waktunya di Maluku dari 1512-1515.

Selain itu, sebelumnya kepulauan yang memiliki nama asli "Jazirah Al-Mulk" ini juga telah menjadi incaran bangsa Portugis karena rempah-rempahnya yang melimpah.

Pada 1511, Bandar Malaka yang pada saat itu merupakan pelabuhan utama, di mana cengkeh serta rempah-rempah Asia Tenggara lainnya didistribusikan, berhasil dikuasai oleh bangsa Portugis.

Adapun rempah-rempah yang paling banyak dihasilkan di Kepulauan Maluku di antaranya adalah cengkeh dan pala. Cengkeh biasa ditemukan di Pulau Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Bacan. Sementara, pala biasa ditemukan di Kepulauan Banda dan Halmahera Timur.

Karena cita rasa serta khasiatnya, kedua rempah tersebut merupakan komoditas perdagangan yang sangat berharga pada masa itu.

Tak lama setelah dikuasai bangsa Portugis, beberapa tahun kemudian bangsa Eropa lain, seperti Belanda dan Inggris pun ikut berlomba-lomba memonopoli rempah-rempah di Kepulauan Maluku.

Festival ini diawali dengan pameran kuliner hasil produk negeri-negeri yang berada di Kecamatan Saparua Timur dan Saparua, Talk Show Kuliner Rempah, Demo Masak Dari Koki Bertaraf Internasional Jurger Domani dan diakhiri dengan makan patita bersama.

Tahun ini menjadi kali kedua Spice Islands Festival digelar di Maluku. Sebelumnya, tahun 2020 di Benteng Belgica Banda Naira, tahun ini Pulau Saparua mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan.

Pulau Saparua tepat dipilih karena nilai historisnya yang panjang terkait



dengan era kolonialisme, yang bermuara dari motivasi para penjelajah Eropa menemukan rempah-rempah.

Saparua adalah sentra perdagangan rempah-rempah di wilayah Lease (Haruku, Saparua, Nusalaut). Benteng Duurstede adalah saksi bisu romansa

kolonialisme dengan cengkeh dan pala sebagai primadona utama.

Hari pertama pelaksanaan bertempat di Negeri Ihamahu, Kecamatan Saparua Timur. Di sini digelar pameran produk UMKM dari hampir seluruh negeri yang berada di Pulau Saparua,

di antaranya produk-produk kuliner, seperti bagea kenari, sagu tumbu, sarut, sagu, serta hasil produksi gerabah atau sempe dalam bahasa lokal.

Selain pameran produk UMKM, di hari pertama juga digelar bincang-bincang bersama pelaku usaha kuliner. Ibu Jun Manuhuttu pemilik rumah kopi Sibu-Sibu yang ada di Kota Ambon bersama dengan Mama Nyora (sebutan untuk Isteri Raja) Negeri Ihamahu duduk bersama dan berbagi cerita tentang usaha mereka melestarikan warisan rempah Maluku dalam bentuk produk kuliner. Rumah Kopi Sibu-Sibu terkenal dengan Kopi Rarobang, resep yang ditemukan dan dikembangkan oleh almarhum suami Ibu Jun.

Sementara, Mama Nyora Ihamahu bercerita tentang usahanya memajukan UMKM Negeri Ihamahu bersama



kelompok ibu-ibu setempat. Demo masak oleh Chef Jürgen Domani dengan memakai rempah-rempah khas Maluku disertai dengan demo masak dari ibu-ibu dari beberapa negeri di Saparua menutup kegiatan di hari pertama.

Benteng Duurstede menjadi tempat pelaksanaan Spice Islands Festival 2021 di hari kedua, sekaligus tempat dilaksanakannya acara puncak. Para peserta yang terdiri dari kaum milenial dari beberapa negeri, di antaranya Papperu, Tiouw, dan Saparua menampilkan sejumlah tarian diiringi musik yang khas.

Festival Bumi Rempah Nusantara sebelumnya juga diadakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan yang dimulai 29 Oktober hingga 13 November 2021.



"Memasuki tahun kedua Festival Jalur Rempah, Kemendikbud Ristek melanjutkan program Jalur Rempah untuk mendukung penetapannya sebagai warisan dunia di UNESCO," kata Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid.

"Tahun ini dengan mempertimbangkan situasi pandemi, Festival Bumi Rempah Nusantara untuk Dunia digelar secara daring," kata Hilmar.

Ia menjelaskan kali ini program fokus mengangkat narasi Jalur Rempah melalui berbagai acara budaya yang diproduksi langsung di 13 titik Jalur Rempah.

Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Restu Gunawan, mengungkapkan, kegiatan Festival Jalur Rempah Nusantara untuk Dunia ini bertujuan untuk mem-

bangun ekosistem budaya rempah dari hulu hingga hilir.

"Muhibah budaya Jalur Rempah adalah platform kerja sama yang melibatkan kemendikbud Ristek, pmda, komunitas, dan pihak swasta. Tayangan-tayangan dalam Festival Bumi Rempah Nusantara untuk Dunia digodok langsung di Banda Neira, Ternate, Makassar, Banjarmasin, Tanjung Uban-Pulau Bintan, Belawan, Lhokseumawe-Banda Aceh, Padang, Banten, Jakarta, Semarang, Benoa, dan Surabaya," kata Restu.

Restu mengatakan, berbagai komunitas kreatif yang bekerja bersama unit pelaksana teknis dan para kurator, berhasil menciptakan tayangan-tayangan menarik yang menggambarkan ketersambungan budaya dalam lintas daerah di Indonesia. •

Pameran Foto Jurnalistik Antara “Rwa Bhineda” MEMOTRET KILAS BALIK SUNDA KECIL DI TENGAH PAGEBLUK

Galeri Foto Jurnalistik Antara, Redaksi Foto Kantor Berita Antara, dan Antara Biro Bali menyelenggara-
kan pameran foto jurnalistik bertajuk “Rwa Bhineda”.

Pameran yang diselengga-
rakan di Seminyak Village,
Kabupaten Badung, Bali, 16
Desember 2021, menampilkan
sejumlah foto sebagai kilas balik
peristiwa di Bali-NTB-NTT selama
2020-2021.

Ketua Dewan Pengawas Perum

LKBN Antara, Widodo Muktiyo, saat
pembukaan pameran, mengatakan
pameran tersebut merupakan agenda
tahunan yang diadakan di berbagai
daerah di Tanah Air, salah satunya di
Pulau Dewata.

Tujuannya adalah untuk mengenal-
kan berbagai realitas sosial yang ada

di Bali dan untuk kali ini dengan NTT
dan NTB.

Widodo mengharapkan pameran
tersebut dapat mengajak masyarakat
memahami dampak pandemi COV-
ID-19 dan mengambil hikmah di balik
pandemi tersebut, seperti momentum
yang menyentuh rasa kemanusiaan,
nasionalisme, serta gotong royong.

“Di sinilah foto ini banyak bicara
melebihi kata-kata yang ditulis dalam
bahasa jurnalistik. Jadi, bahasa foto ini
melebihi bahasa kata-kata,” ungka-
pnya.

Widodo mengatakan, 55 foto yang
dipamerkan oleh pewarta foto Antara
di Bali, NTT dan NTB itu, memiliki
dimensi luas. Di antaranya ada yang
mengambil sisi bagaimana perilaku
masyarakat yang sebelum pandemi
sangat padat kegiatan dan banyak
tamu wisatawan, kemudian mengala-
mi situasi pandemi menjadi sepi.

“Ini merefleksikan semangat kita un-
tuk segera menyelesaikan persoalan
pandemi COVID-19 ini, agar Bali bisa
maju lagi seperti semula,” kata dia.

Pihaknya berharap, foto-foto yang
dipamerkan tersebut gaungnya mend-
unia karena Bali merupakan destinasi
wisata global.

Kurator Pameran Rwa Bhineda,
Ismar Patrizki, mengungkapkan,
pameran tersebut menjadi salah satu
medium distribusi informasi dan pem-
beritaan. Sekaligus retrospeksi men-
genai hal-hal yang terjadi, khususnya
sepanjang 2021.

Pameran Rwa Bhineda sebelumnya
diselenggarakan Kantor Berita Antara
Biro Bali pada 2017, 2018, dan 2019,
dengan menyajikan foto-foto jurnalistik
karya pewarta foto setempat.

Namun, pada penyelenggaraan
Rwa Bhineda 2021, cakupan wilayah

pameran foto jurnalistik diperluas, tidak
hanya Bali tetapi juga NTB dan NTT.

Sebanyak 55 foto yang dipamerkan
di pusat perbelanjaan Seminyak Vil-
lage, pada 13 Desember 2021 hingga
2 Januari 2022 merupakan hasil karya
lima pewarta foto. Mereka adalah Ah-
mad Subaidi (NTB), Naufal Fikri Yusuf
(Bali), Kornelis Kaha (NTT), I Nyoman
Budhiana (Bali), dan I Nyoman Hendra
Wibowo (Bali).

“Pameran ini merupakan salah satu
bentuk apresiasi atas kiprah para pew-
arta foto Antara di wilayah Sunda Kecil
(Bali, NTB, dan NTT) dan dalam rangka
memeriahkan HUT Ke-84 Perum LKBN
Antara,” ungkap Ismar.

Ia menjelaskan, tajuk Rwa bhineda,
dalam bahasa Bali, bermakna dua sisi
atau sifat yang berlawanan.
Meski bertolak bela-
kang, kedua sisi itu
justru menjaga
harmoni alam
semesta.

“Dua hal
yang ber-
tentangan,
hitam-putih,
gelap-
terang,
baik-buruk,
siang-malam,
kiri-kanan, serta
laki-laki-perempuan,
mewarnai kehidupan,
membentuk sebuah keseimbangan
mikrokosmos ‘bhuwana alit’ dan
makrokosmos atau ‘bhuwana agung’,
jelasnya.

Menurutnya, selama hampir dua
tahun terakhir, situasi dunia sedang
berada di sisi gelap dari “Rwa Bhine-
da”. Keigelapan itu muncul karena pe-
nyebaran pandemi COVID-19. Pulau
Dewata juga tak luput dari hantaman
virus SARS-CoV-2 itu.

Perekonomian Pulau Dewata
terpuruk akibat pandemi COVID-19.
Sektor pariwisata yang menjadi mata
pencaharian utama sebagian besar
masyarakat Bali terdampak dengan
sepiunya wisatawan saat pandemi
melanda dunia.

Hingga 14 Oktober 2021, pemer-
intah memutuskan untuk membuka
pariwisata internasional Pulau De-

wata. Secara perlahan, Bali kembali
menggeliat, meskipun hingga pertem-
pahan Desember 2021 belum ada
satu pun penerbangan internasional
yang membawa wisatawan mancanera
menuju Bali.

“Suluh yang nyaris padam itu mulai

logam di setiap karya.

Menurut Ismar, logam merupakan
material alam yang sifatnya keras, kuat,
dan solid atau kukuh. Hal itu sebagai
perlambang harapan dan doa untuk
masyarakat Sunda Kecil, khususnya
di Pulau Dewata, agar tetap kuat dan



menyala lagi. Sisi terang ‘Rwa Bhineda’
terlihat di cakrawala Pulau Dewata.
Dan suasana gelap-terang Pulau De-
wata sepanjang pandemi COVID-19
melanda ini tak luput dari reportase
visual yang diberitakan para pewarta
foto Kantor Berita Antara,” ujarnya.

Ismar menambahkan, foto-foto
yang disajikan dalam pameran Rwa
Bhineda tahun ini dicetak di atas
aluminium composite panel. Sehingga
memunculkan kesan metal atau

kukuh dalam menghadapi gelombang
pagebluk.

“Semoga Rwa Bhineda dapat lekas
kembali seimbang dan selaras, sehing-
ga Bali dan wilayah sekitarnya bangkit.
Dan di tengah pagebluk ini, pewarta
foto Kantor Berita Antara juga akan
terus memberitakan informasi terkini,
termasuk mengenai ketiga wilayah
yang dahulu disebut Sunda Kecil ini
kepada khalayak di Tanah Air, bahkan
hingga mancanegara,” pungkasnya. ●



BINTANG TANAH AIR YANG SEMAKIN TAJIR

Julukan artis terkaya memang layak disandang oleh sejumlah selebriti di Indonesia. Bagaimana tidak, jumlah harta kekayaan mereka mencapai ratusan miliar rupiah. Tentunya, untuk mendapatkan semua itu memerlukan kerja keras yang tak sedikit.

Perjuangan mereka selama bertahun-tahun di dunia hiburan membuat mereka mendapatkan pundi-pundi rupiah dengan jumlah menggiurkan.

Selain dari industri hiburan, para selebriti Tanah Air ini juga mempunyai bisnis-bisnis yang menambah nilai kekayaan mereka.

Inilah lima artis yang tercatat memiliki kekayaan tertinggi di Indonesia di akhir 2021.

AGNEZ MO

Di urutan pertama ada Agnez Mo, penyanyi Indonesia yang berhasil menembus pasar internasional.

Menempati urutan pertama, kekayaan Agnez Mo dikabarkan mencapai Rp452 miliar. Hal ini tidak mengherankan, sebab penyanyi 35 tahun ini memang sudah lama

berkecimpung di dunia hiburan, yakni sejak era 1990-an.

Tak hanya sebagai penyanyi, wanita bernama asli Agnes Monica Muljoto ini juga sempat terjun sebagai aktris dan presenter. Belum lagi dia memiliki sejumlah bisnis, seperti parfum, fashion, kuliner, platform digital, hingga minuman wine yang baru dia luncurkan pada September silam.

Ya, penyanyi 35 tahun itu belum lama ini terjun ke industri winery dengan meluncurkan produk sparkling wine bernama Love Potion by A MO.

Ada alasan tersendiri bagi Agnez sehingga akhirnya dia merilis bisnis minuman ini. Dia mengatakan, hal itu berawal dari kesulitannya mencari minuman yang cocok untuknya.

"Sebenarnya, anehnya itu, aku enggak terlalu suka minum (beralkohol), itu bukan gaya hidup aku. Jadi alasan nya merilis ini adalah, karena selama ini aku belum pernah menemukan minuman yang tepat, di mana aku bisa enjoy minum tanpa harus merasa pusing setelahnya," kata Agnez dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, 12 September lalu.

Agnez bilang, kegiatannya sebagai seorang artis sangat padat, membuatnya tidak mungkin minum minuman yang membuatnya pusing di malam hari, sementara dia harus mulai kegiatannya di pagi hari. Oleh karena itu, minuman produksinya tersebut mengandung alkohol yang lebih rendah daripada wine pada umumnya.

"Aku akhirnya produksi ini, karena menurutku, wine itu sangat classy, bisa diminum kapan aja pada saat dinner, dan tujuannya bukan untuk mabuk, tetapi untuk merasakan rasanya," ujarnya.

Agnez Mo juga meluncurkan bisnis salah satunya Maverick Avenue, bisnis yang bergerak di bidang digital platform. Dia telah menjalankan bisnis itu



sejak 2015 lalu.

Agnez Mo juga merambah ke dunia kuliner dengan meluncurkan bisnis bernama The Boxes. Juga meluncurkan bisnis parfum bernama Agnez Reve sejak tahun 2013 silam. Kemudian, Agnez Mo juga meluncurkan bisnis pakaian bernama Anye.

RAFFI AHMAD

Raffi Ahmad menempati urutan kedua daftar artis Indonesia dengan jumlah kekayaan terbanyak di Tanah Air.

Presenter yang kerap mendapatkan julukan 'Sultan Andara' ini disebut-sebut memiliki harta yang jumlahnya mencapai Rp400 miliar.

Kekayaannya itu merupakan hasil kerja kerasnya di dunia entertainment selama bertahun-tahun. Ya, Raffi sendiri sudah memulai terjun ke dunia

hiburan sejak awal era 2000-an.

Dia memulai kariernya sebagai aktor sinetron remaja dan pernah juga menjadi penyanyi dalam grup vokal Bukan Bintang Biasa (BBB). Namanya lalu melejit sebagai presenter program Dahsyat di RCTI sejak 2009 hingga sekarang.

Selain itu, Raffi juga mempunyai berbagai bisnis seperti RANS Entertainment, RANS Music, RA Pictures dan RANS Animation Studios, RANS eSports, hingga RANS Cilegon FC.

Meski punya kekayaan ratusan miliar, Raffi mengaku tak tahu jumlah uang pribadinya dan uang pribadi sang istri.

"Kalau uang pribadi gue, dia enggak pernah tahu gue berapa, gue enggak pernah tahu uang pribadinya Gigi berapa," ujar Raffi.

Raffi kemudian mengatakan telah

mempercayakan bisnis terbesarnya, yaitu Rans Entertainment untuk dikelola sang istri. Dia percaya karena Nagita Slavina memiliki pengalaman di bidang yang sama.

"Tapi uang RANS Entertainment, biar performanya bagus ya pegang saja sama Nagita, yang ngontrolnya. Menurut gue bebas, itu semua tergantung gimana kita ngobrol sama istri. Tapi kalau Gigi itu 100 persen percaya, dia enggak bakal mikir yang gimana-gimana," tambahnya.

Raffi mengaku tak pernah khawatir meski tidak pernah memegang duit perusahaan. Baginya, dengan begitu, Nagita bisa mengetahui cara yang baik untuk terus mengembangkan perusahaan.

INUL DARATISTA

Kekayaan Inul Daratista disebut mencapai Rp300 miliar. Sumber pundi-pundi uang pedangdut ini bukan hanya berasal dari pekerjaannya sebagai penyanyi, tetapi juga bisnis yang dibangunnya.

Pemilik Goyang Ngebor ini diketahui memiliki sedikitnya enam usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Bukan hanya sekadar bisnis karaoke, Inul juga memiliki bisnis yang bergerak di bidang perhotelan, tempat rekreasi, hingga kuliner.

Inul memiliki usaha rumah karaoke yang cukup sukses. Diberi nama Inul Vizta, bisnis tersebut bahkan telah berdiri sejak 2005 dan memiliki lebih dari 100 cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Bisnis karaoke milik Inul bahkan hampir tak terkalahkan. Beberapa rekan artis yang mencoba untuk membangun bisnis karaoke, bahkan tidak bisa mengalahkan ketenaran Inul Vizta.

Istri dari Adam Suseno ini juga diketahui memiliki bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Bernama Inul Food, bisnisnya menawarkan keripik berbagai macam rasa.

Wanita kelahiran Januari 1979 itu sempat menceritakan kisah masa lalunya yang memilukan melalui akun Instagram pribadinya.

Inul mengaku sangat kasihan kalau mengingat dirinya di masa lalu. Pemilik



nama asli Ainur Rokhimah itu dilahirkan dari keluarga yang serba kekurangan. Ia merupakan anak dari tukang jahit yang tidak selalu mendapatkan orderan. Dengan keadaan seperti itu, mereka terpaksa harus berutang dulu untuk membeli beras.

Bahkan, Inul juga menyebutkan kalau mau makan enak harus menunggu belah kasihan dari orang lain.

"Hidup tersakiti disakiti. Hidup susah jadi orang enggak punya. Mau makan enak nunggu dikasih, tiap hari makan dapat bagian nunggu yang lain makan dulu," beber Inul.

Dengan perekonomian yang sangat terbatas, mendorong Inul menjadi seorang pribadi yang mandiri sejak kecil. Saat pagi setelah ibadah Subuh, istri dari Adam Suseno itu harus mem-

bantu ibunya dan mengurus adik-adiknya, kemudian baru ia bisa fokus terhadap dirinya sendiri.

Demi membantu keluarga, Inul harus sekolah dan juga bekerja. Ia mendapatkan pundi-pundi rupiah dari menjajakan rokok dan minuman di pinggir jalan. Selain itu, ia juga mengatakan kalau sekolahnya tidak beres, sering telat, dan tak tamat sekolah.

Meskipun begitu, Inul tidak patah arang terhadap nasibnya dan itu menjadi batu loncatan agar bisa mendapat kehidupan yang lebih baik.

"Semua butuh proses untuk bisa hidup layak. Aku orang yang tidak pernah menyerah dalam nasib. Bahkan sampai hari ini. Semangat nul. Jangan nyerah, masih banyak yang lebih sulit hidupnya drmu. Dan akupun terus bekerja," pungkask Inul dalam unggahannya.

SYAHRINI

Siapa yang tak kenal dengan Syahrini? Penyanyi yang 'cetar membahana' dan terkenal dengan gaya hidup mewah nan glamor. Istri pengusaha Reino Barack ini ditaksir mempunyai harta yang jumlahnya mencapai Rp280 miliar.

Dengan jumlah kekayaan itu, tidak heran jika Syahrini selalu tampil 'cetar membahana' lewat busana-busana dan fashion item yang mewah.

Selain dari industri hiburan, Syahrini juga mempunyai sejumlah bisnis di berbagai bidang. Mulai dari fesyen, kuliner, kecantikan, karaoke, hingga property.

KRISDAYANTI

Nama penyanyi yang kini berprofesi sebagai anggota DPR, Krisdayanti, menempati urutan lima besar sebagai artis dengan kekayaan tertinggi di Indonesia.

Harta mantan istri Anang Hermansyah ini disebut-sebut mencapai ratusan miliar rupiah, yakni Rp270 miliar. Hal ini tentu tak heran, karena Krisdayanti telah menjadi seorang penyanyi populer sejak era 1990-an.

Dia bahkan telah dinobatkan sebagai salah satu diva terbaik di Indonesia karena suaranya yang spektakuler dan indah.



Selain itu, istri Raul Lemos ini juga mempunyai beberapa bisnis di bidang fesyen, kecantikan, dan kuliner.

Krisdayanti beberapa waktu lalu juga sempat membocorkan pemasukannya sebagai anggota DPR. Saat berbincang di akun Youtube Akbar Faizal, istri Raul Lemos ini mengungkapkan pendapatan DPR yang fantastis.

"Banyak potongan. Setiap tanggal 1, Rp16 juta (gaji pokok). Tanggal 5 Rp59 juta (tunjangan) kalau tidak salah," ungkap Krisdayanti.

Di luar gaji sebagai anggota DPR, dia mengatakan juga mendapatkan dana aspirasi sebesar Rp450 juta, di mana ia juga bertanggung jawab untuk menyerap aspirasi dari masyarakat.

"Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita. Namanya juga uang negara. Dana aspirasi kita itu Rp450 juta, itu lima kali dalam setahun," jelasnya.

"Kita juga harus menyerap aspirasi di 20 titik, itu kehadiran kita. Mohon maaf kepada senior saya, ini saya upayakan semaksimal mungkin. Saya akan tergetar hati saya kalau tidak menyampaikan nilai-nilai

kemasyarakatan," sambungnya.

Krisdayanti juga mengaku mendapatkan dana kunjungan Dapil sebesar Rp140 juta. Bahkan, ia juga

mengatakan dana sebanyak itu akan digunakan untuk penyaluran sembako dan lainnya untuk masyarakat.

Usai menulai polemik, sang diva belakangan meralat ucapannya soal dana aspirasi atau dana reses yang diterima oleh para anggota DPR. Dia memastikan bahwa dana

reses bukanlah pendapatan pribadi para anggota dewan.

"Dana reses bukanlah merupakan bagian dari pendapatan pribadi anggota DPR, melainkan dana untuk kegiatan reses guna menyerap aspirasi rakyat di daerah pemilihan masing-masing," kata Krisdayanti. •





Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah REFORMASI STRUKTURAL ALIAS PEROMBAKAN BESAR-BESARAN

Undang-Undang baru lagi. Pemerintah menyebutnya sebagai reformasi struktural di bidang desentralisasi fiskal. Ringkas saja sebenarnya: perombakan besar-besaran terkait anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten maupun kota.

Tampak mulus-mulus saja. Maka, Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU HKPD) akan segera mendapatkan pengesahan menjadi UU pada Sidang

Paripurna DPR mendatang. Paling cepat, minggu kedua Januari 2022, setelah masa reses parlemen 17 Desember 2021 sampai dengan 10 Januari 2021.

Pengesahan itu berlangsung belum sampai enam bulan setelah pengajuannya oleh pemerintah pada akhir Juni 2021 lalu. Namun, memang lebih cepat UU terkait ketentuan umum perpajakan yang akhirnya menjadi UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Toh kedua beleid itu memang berjaln kelindan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, RUU HKPD memang memiliki keterkaitan erat dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"Kita berharap UU HPP dapat meningkatkan peningkatan tax ratio di tingkat pusat dan pendapatan negara,

yang kemudian akan juga dibagikan kepada daerah di dalam bentuk transfer ke daerah. Sedangkan dalam RUU HKPD terkandung ikhtiar meningkatkan tax ratio di level daerah yang utamanya untuk meningkatkan kemandirian daerah, namun dengan tetap menjaga keseimbangan dari sisi beban masyarakat," ungkap Bu Menteri dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama pemerintah pada Selasa, 23 November 2021.

Alhasil, pemerintah bersama DPR RI sepakat untuk meneruskan pembahasan Rancangan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU HKPD) dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan di sidang paripurna. "Atas nama pemerintah, kami menerima hasil pembahasan RUU di tingkat panja yang menjadi dasar pengambilan keputusan

pembicaraan tingkat I pada hari ini. Pengaturan dalam RUU HKPD ini diharapkan akan menjadi momentum untuk memperkuat peran pemerintah daerah yang secara bersama-sama dengan pemerintah pusat bersinergi untuk mencapai tujuan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan memberikan perlindungan kepada seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia," ungkap Menteri Ani dalam rapat itu.

Ia juga mengungkapkan, dalam pembahasan RUU HKPD ini, pemerintah bersama DPR RI memfokuskan upaya peningkatan kualitas belanja negara dan sinergi kebijakan fiskal nasional. Ia menegaskan, peningkatan kualitas belanja negara dan kebijakan fiskal nasional yang sinergis bukan bertujuan untuk resentralisasi, namun merupakan bagian dari akuntabilitas penggunaan keuangan negara dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik, menciptakan kemakmuran rakyat dan kesempatan kerja yang adil.

"RUU HKPD adalah upaya reformasi struktural di bidang desentralisasi fiskal, dengan melihat pengalaman kita menjalankan desentralisasi fiskal selama ini, di dalam rangka untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang lebih efisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang makin transparan, akuntabel dan berkeadilan," tandas Menkeu.

Jadi, tercakup di dalamnya tindak lanjut dan evaluasi pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sebelumnya diatur di dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu, RUU HKPD juga menggabungkan perbaikan pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang saat ini diatur dalam Undang-undang 28 tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk memperkuat local taxing power.

"RUU ini diharapkan juga hadir saat yang tepat untuk menjadi instrumen yang penting bagi konsolidasi fiskal. Ini sekali lagi bukan resentralisasi, tapi mengembalikan kesehatan APBN di mana APBD merupakan bagian yang sangat penting dalam APBN kita," kata

Menkeu Ani.

Bu menteri juga mengemukakan, keselarasan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan nasional dan mengantisipasi ketidakpastian dari dinamika global adalah sesuatu yang sangat penting. Ia menyatakan, RUU ini juga merupakan manifestasi dari asas gotong royong dalam upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah un-

bahasan ini melalui berbagai macam focus group discussion yang dilakukan dengan melibatkan berbagai kalangan, termasuk dalam hal ini adalah pemerintah daerah, para akademisi, dan juga stakeholder lainnya, serta dilakukan kunjungan ke daerah untuk mendapatkan aspirasi daerah. Ini tentu merupakan suatu proses yang sangat baik," sambung Menkeu Ani.

Namun, apakah masukan dari berba-



tuk mencapai tujuan bernegara.

Oleh sebab itu, Menteri Keuangan mewakili pemerintah, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Ketua dan Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU HKPD, Kementerian/Lembaga yang terkait, serta kepada DPD RI yang telah mencurahkan perhatian, memberikan masukan dan saling bekerja bersama dalam pembahasan penyusunan RUU HKPD ini.

"Kami sangat menghargai berbagai masukan yang diberikan dan juga tujuan yang ingin dicapai di dalam pem-

gai kalangan terakomodasi atau tidak, sebagian atau seluruhnya, itu memang soal lain. Seperti apa substansi dan dinamika menjelang kesepakatan untuk mengundang RUU yang akan berpengaruh terhadap postur anggaran dan transfer dana dari pusat ke daerah, masih memerlukan waktu untuk menunggu pelaksanaannya.

Namun, sejumlah pembahasan substansial, kandungan inti, maupun implikasinya masih akan berdinamika. Bahkan meskipun RUU itu sudah mendapat pengesahan. ●

(TAMPAK) TENANG DI PERMUKAAN

Pembahasan RUU HKPD di DPR relatif tenang jika dibandingkan dengan yang terjadi pada RUU Harmonisasi Aturan Perpajakan. Tercatat, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menolak pengesahan RUU HKPD. Toh, pemangku kepentingan lainnya sudah pula mengemukakan catatan kritis.

Air tenang belum tentu menghangatkan. Meski sejak pembahasan di awal Juli 2021, RUU HKPD segera mendapat persetujuan sebelum tutup tahun. Hanya sekitar lima bulan.

Demikianlah, maka Komisi XI DPR dan pemerintah sepakat melanjutkan pembahasan RUU HKPD ke Rapat Paripurna. Persetujuan tersebut didapat setelah mendengar pandangan mini fraksi, DPD, serta perwakilan

pemerintah.

"Sekarang kita ambil keputusan pembicaraan tingkat I RUU HKPD, apakah dapat diterima dan disetujui?" tanya Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto kepada peserta rapat yang dijawab "Setuju: disusul pengetukan palu sebagai tanda disepakatinya pembicaraan tingkat I tentang RUU HKPD, dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama pemerintah, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa, 23

November 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir mewakili pemerintah mengatakan RUU HKPD akan memberikan momentum bagi daerah untuk bersinergi dengan pusat dalam mencapai tujuan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Atas nama pemerintah, kami menerima hasil pembahasan RUU di tingkat panja yang menjadi dasar pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I hari

ini," kata Menkeu Ani.

Menkeu menyampaikan, RUU HKPD disusun dalam empat pilar utama. Pertama, untuk mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah dengan upaya meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal. "Kedua, mengembangkan sistem pajak daerah dengan mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien," kata Menkeu.

Ketiga, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah karena belanja daerah yang sebagian besar dibiayai melalui transfer menjadi sangat penting untuk bisa menghasilkan dampak yang maksimal. Keempat, harmonisasi belanja pusat dan daerah dalam rangka menyelenggarakan layanan publik yang optimal dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.

Dari total sembilan fraksi di Komisi XI DPR RI, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak RUU HKPD dibahas lebih lanjut pada pembicaraan tingkat II. Fraksi PKS memandang beberapa klausul RUU HKPD berpotensi menciptakan desentralisasi

untuk meratakan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

F-PKS melalui juru bicaranya, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, menilai RUU HKPD pun belum berhasil memformulasikan kemandirian fiskal bagi daerah. Dengan nihilnya formulasi kemandirian fiskal dalam pembahasan RUU tersebut, Anis memandang RUU HKPD berpotensi meningkatkan risiko utang negara.

Secara keseluruhan, F-PKS DPR RI menyampaikan 10 poin yang menjadi alasan penolakan terhadap RUU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). "Pembahasan RUU HKPD seharusnya merupakan bagian penting untuk merealisasikan Tujuan UUD 1945, khususnya Pasal 18A Ayat 2 yang mengatakan bahwa pemanfaatan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah harus dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan peraturan perundangan," ujar Anis mewakili pandangan fraksinya.

Ia menambahkan, implementasi penyempurnaan HKPD penting un-

tuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang adil untuk mewujudkan pemerataan. Fraksi PKS, ujarnya, sejak awal berpandangan bahwa alokasi tersebut harus diwujudkan dengan berlandaskan pada tujuh aspek; penguatan desentralisasi, peningkatan keadilan, peningkatan keselarasan dalam Sistem Keuangan Nasional, pengembangan sistem pajak daerah yang berkeadilan, pengembangan HKPD yang minim ketimpangan, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi kebijakan.

"Secara umum, RUU ini cenderung mereduksi semangat 'desentralisasi' dan memperkuat 're-sentralisasi' yang tidak sejalan dengan semangat reformasi seperti yang tercantum dalam Pasal 165. Padahal, seharusnya daerah diberikan ruang untuk mengembangkan potensi dan inovasinya. Intervensi pemerintah pusat dalam kewenangan dan fiskal daerah jelas menyalahi amanat Otonomi Daerah," sesal legislator yang mewakili Daerah Pemilihan DKI Jakarta I itu.

Pada, Badan Pemeriksa Keuan-



Pembahasan RUU HKPD di DPR.



Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati.

gan (BPK) melaporkan bahwa kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah dan pusat masih cukup tinggi, di mana sebanyak 80,7 persen Pemda belum masuk kategori mandiri dari aspek fiskalnya. Dengan permasalahan tersebut, PKS menyoroti pembahasan RUU HKPD yang belum berhasil memformulasikan kemandirian fiskal bagi daerah dan prinsip desentralisasi untuk meratakan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Dengan nihilnya formulasi kemandirian fiskal dalam pembahasan RUU tersebut, FPKS memandang bahwa RUU HKPD berpotensi meningkatkan risiko utang negara. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan peluang utang daerah, dimana pembangunan dan obli-

lokasi sumber daya nasional yang efisien. Supaya hubungan keuangan yang transparan, akuntabel dan berkeadilan dapat mewujudkan pemerataan layanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tampak berseberangan dengan F-PKS, Musthofa menjelaskan, pembentukan UU HKPD dilatarbelakangi ketentuan UU Dasar 1945 Pasal 18 A Ayat 2. Antara lain, sambungnya, menekankan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan UU.

"Bahwa untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan

Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah; UU No. 28/2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah; UU No.2/2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19; dan UU. No. 11/ 2020 Tentang Cipta Kerja.

"Kalau kita bandingkan antara UU tersebut di atas dengan RUU HKPD yang sebentar lagi disahkan menjadi UU, di dalamnya jelas-jelas adanya progres adanya peningkatan pengaturan yang memberikan akses bagi daerah untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar, pasti dan merata. Dengan penjelasan ini pendapat tentang re-sentralisasi sesungguhnya tidak terjadi," ucapnya mewakili fraksi yang memiliki kursi terbanyak di DPR itu.

Di luar parlemen, pemangku kepentingan yang kritis terhadap RUU HKPD ini antara lain adalah pakar Otonomi Daerah dari Universitas Gadjah Mada Profesor Purwo Santoso. Ia meminta DPR RI tidak terburu-buru melakukan pengesahan Rancangan Undang-undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD).

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada yang juga menjadi itu bahkan meminta agar DPR menunda pengesahan RUU HKPD karena dinilai belum mendesak "Saya kira RUU HKPD perlu mendapat banyak masukan dari publik. Tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan pengesahan RUU ini karena belum mendesak. Lebih baik Pemerintahan Nasional membangun sinergi kebijakan fiskal bersama Pemerintahan di Daerah," ujarnya pada awal Oktober 2020.

Apakah pandangan Prof Purwo yang juga menjadi nara sumber ahli dalam pembahasan RUU HKPD di DPR pada Juli 2021 lalu itu akan menjadi pertimbangan menjelang rapat paripurna pengesahan yang dijadwalkan pada Januari 2022 mendatang. Masih tersisa waktu sekitar sebulan, dan akan terlihat apakah memang RUU ini tanpa gejolak di kedalaman meski tampak tenang dan menghanyutkan di permukaan. ●



Gubernur Kalimantan Timur H Isran Noor .

RIAK SUARA DARI DAERAH

Daerah pada umumnya tak terlalu menghiraukan persoalan teknis yang rumit dalam legislasi HKPD. Ini terlihat dalam pandangan Gubernur Kalimantan Timur H Isran Noor dalam Rapat Panja RUU HKPD Komisi XI DPR RI secara virtual dari Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Kamis, 8 Juli 2021.

Isran to the point saja, mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD) memuat porsi alokasi APBN untuk daerah minimal 50 persen. Alasannya, perimbangan keuangan pusat dan daerah hingga saat ini masih sangat tidak adil.

"Sudahlah, uang itu berikan saja ke daerah. Tidak usah 70 persen, biarlah 50 persen tidak apa. Nanti penggunaan uang itu diawasi oleh negara," kata Isran yang berbicara sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Bukan hanya itu, Gubernur Isran juga menyoal kurangnya perhatian pemerintah terkhusus bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam penyumbang ekspor. Perhatian lebih ini harus diberikan negara kata Isran, sebab risiko pertama yang akan diterima dampak dari eksploitasi sumber daya alam minyak, gas, emas, nikel,

bauksit, emas, batu bara dan lainnya itu adalah penduduk sekitar operasional perusahaan dan provinsi yang bersangkutan.

Isran juga sempat menyinggung perihal keadilan perimbangan keuangan yang masih berlaku hingga saat ini untuk daerah yang disebut istimewa dan khusus. "Nah ada juga ketentuan Undang-Undang terkait daerah khusus, daerah istimewa, itu juga sebenarnya perlu dipertimbangkan, apa istimewanya, apa khususnya? Supaya perimbangan keuangan itu memenuhi rasa keadilan itu," sambungnya dalam rapat yang juga dihadiri Ketua Apeksi Bima Arya (Wali Kota Bogor) dan Sekjen Apkasi Adnan Purichta (Bupati Gowa).

Hadir dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Gubernur Isran Noor mengapresiasi dukungan Komisi XI atas usulan yang telah ia sampaikan.

Sejumlah Anggota DPR RI menanggapi Isran dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi dan Amir Uskara itu. Antara lain Fauzi H Amro (Fraksi Nasdem), Musthofa (Fraksi PDIP Perjuangan), Anis Byarwati (Fraksi PKS), dan Agun Gunanjar Sudarsa (Fraksi Partai Golkar). Sementara rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi

XI Fathan Subchi dan Amir Uskara.

Agun tampak mendukung Isran. "Saya ingin memberikan penguatan kepada pemikiran Pak Isran Noor. Penguatan ini, harapan kami bisa menjadi masukan berharga untuk mengubah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang memang sudah terlalu lama tidak direvisi," kata politikus senior partai beralambang pohon beringin itu.

Ia menjelaskan pembentukan UU 33 Tahun 2004 ketika itu, dibuat bersamaan dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dia berharap agar UU 33 Tahun 2004 yang akan diubah menjadi UU HKPD harus satu nafas dengan UU 32 Tahun 2004, khususnya pasal 18.

Menurut Agun, dalam penyusunan RUU HKPD tidak boleh dikeluarkan angka-angka pembagian pusat dan daerah, tanpa melihat apa yang tertera dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan pusat dalam UU itu meliputi hubungan luar negeri, masalah keuangan, agama, hukum, dan peradilan.

"Hanya lima itu yang menjadi kewenangan pusat. Selebihnya diserahkan kepada daerah yang disebut dengan negara kesatuan yang berotonomi seluas-luasnya. Ini bukan kata Agun Pak, tapi kata konstitusi," ungkap Agun Gunanjar. ●



Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa

gasi daerah berpotensi meningkatkan utang pemerintah secara keseluruhan. Padahal, Pemda hanya memiliki kapasitas fiskal terbatas.

"Mekanisme 'top-down' dalam perencanaan daerah bertentangan dengan semangat desentralisasi yang tercantum dalam UU No. 32/2004. Mekanisme 'top-down' yang juga diterapkan dalam penggunaan dana desa juga tidak akan bisa diimplementasikan secara penuh karena perbedaan karakteristik setiap desa dan paling penting, bertentangan dengan UU No. 6/2004," ujar Wakil Ketua BAKN itu.

Sedangkan pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa menyebutkan, pada prinsipnya RUU itu disusun sebagai upaya dalam menciptakan

efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan UU Dasar 1945," ujar Musthofa.

Ia menegaskan, UU HKPD diarahkan untuk mempertajam penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok NKRI. Menurut dia, untuk memahami bahwa UU HKPD diarahkan untuk mempertajam penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, maka harus memahami dulu beberapa UU yang berlaku sebelum RUU HKPD yang sebentar lagi disahkan menjadi UU.

Antara lain UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 33/2004



MELENGGANG (SEMOGA) SESUAI DENGAN HARAPAN

Urusan legislasi selesai, tinggal pelaksanaannya. Efektivitas regulasi baru HKPD akan terlihat kemudian.

Tinggal menunggu penyelesaian rapat paripurna DPR awal tahun depan dan tanda tangan Presiden tentunya. Lalu, RUU HKPD menjadi UU dan segera berlaku.

Setidaknya, dua regulasi setingkat akan terdampak menjadi kedaluarsa. Pertama, UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua, UU No 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Reformasi struktural yang menjadi target penyusunan UU baru di bidang fiskal (anggaran) ini sudah jelas dike-

mukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai empat pilar utama HKPD. Pertama, mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah dengan upaya meminimalkan ketimpangan vertikal antara jenjang pemerintahan pusat dengan provinsi, kabupaten, kota; dan ketimpangan horisontal antar pemerintah daerah pada level yang sama.

Masalah yang terkait dengan ketimpangan vertikal ini adalah kesenjangan antara kebutuhan anggaran di daerah (fiscal need) yang tidak seimbang dengan kapasitas anggarannya (fiscal capacity). Ringkasnya, fiscal gap atau kesenjangan anggaran, antara

yang diperlukan dengan yang tersedia. Akan menjadi terobosan penting jika kelak UU ini dapat meminimalkan fiscal gap ini.

Pilar kedua, pengembangan sistem pajak daerah dengan mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien. Ini adalah titik temu antara UU HKPD (jika sudah berlaku), dengan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). UU HPP yang mulai diterapkan pada tahun depan diyakini dapat meningkatkan rasio pajak secara nasional, sedangkan RUU HKPD diharapkan mendongkrak rasio pajak di level daerah.

"Kami berusaha untuk meningkat-

kan tax ratio di daerah, terutama kemandirian daerah. Namun tetap menjaga keseimbangan dari sisi beban masyarakat," kata Menkeu Ani.

Konkretnya, terkait dengan lima jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten-kota: pungutan pajak maupun retribusi restoran, hiburan, hotel, parkir, dan penerangan jalan. Melalui RUU HKPD, kelima jenis pajak tersebut diintegrasikan ke dalam satu jenis pajak baru yakni pajak atas barang dan jasa tertentu (PBJT).

Masih ada yang terkait dengan pengembangan sistem pajak daerah di RUU HKPD ini: Pemangkasan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dalam Undang-Undang (UU) No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan minimal satu persen dan maksimal dua persen untuk kepemilikan pertama. Untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya dikenai tarif progresif dengan batas bawah sebesar dua persen dan batas atas di angka 10 persen. Di UU HKPD kelak, tarif pemilikan progresif turun menjadi maksimal delapan persen.

Dalam konteks PKB dan BBNKB, pemerintah provinsi memiliki tambahan kewenangan dalam memungut pajak alat berat dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Yang MBLB ini biasanya tambang galian C seperti pasir.

Dalam naskah akademik RUU HKPD, jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), PAB (Pajak Alat Berat), PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), PAP (Pajak Air Permukaan), pajak rokok, dan opsen pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan). Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPH-TB, PBJT, pajak reklame, PAT (Pajak Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah), pajak MBLB, pajak sarang burung walet, opsen PKB dan opsen BBNKB.

Secara keseluruhan, dalam UU

HKPD, jenis pajak daerah akan diturunkan dari 16 jenis menjadi 14 jenis. Retribusi daerah juga diturunkan dari 32 jenis menjadi 18 jenis. Meski begitu, ia yakin jumlah retribusi dan pajak yang lebih kecil tidak mengerdilkan penerimaan pajak. "Jumlah retribusi dan pajak yang lebih kecil tidak berarti penerimaan pajak turun, justru bisa meningkatkan PAD pemerintah terutama kabupaten/kota. Bila menggunakan baseline 2020, bisa naik hingga 50

persen 70 persen dana APBD berasal dari TKDD ke pemerintah daerah belum bisa mendorong pembangunan daerah dan secara nasional. Sementara, pendapatan APBN yang diterima dari daerah juga tidak sebanding dengan apa yang sudah ditransfer oleh pemerintah pusat, terutama di daerah-daerah di luar pulau Jawa-Bali.

"Belanja (outflow) APBN yang dialokasikan ke daerah di luar wilayah Jawa lebih besar dari pendapatan (in-



persen," kata Menkeu Ani.

Selanjutnya, pilar ketiga adalah peningkatan kualitas belanja daerah dari transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Kaitannya dengan pilar kedua, dari berbagai jenis pajak dan retribusi daerah itu, besaran pendapatannya masih belum sanggup menopang kemandirian fiskal sehingga tetap lebih banyak pendapatan dari transfer oleh pemerintah pusat untuk memenuhi semua operasional kegiatan di daerah.

Menkeu Ani mengungkapkan, ham-

flow) APBN yang diterima dari wilayah luar Jawa," ujar Sri Mulyani saat rapat bersama Komisi XI DPR, Senin, 13 September 2021.

Ia juga mengungkapkan, sebenarnya, wilayah Jawa-Bali memberikan kontribusi paling besar untuk pendapatan APBN. "Namun, inflow APBN Jawa-Bali lebih besar daripada belanja APBN yang diterima (outflow)," kata Sri Mulyani melanjutkan.

Diketahui, rata-rata redistribusi pendapatan negara untuk belanja APBN

ke daerah dalam rentang tahun 2016-2019 yakni, di Pulau Jawa-Bali, pendapatannya mencapai Rp 1.285 triliun dengan belanja sebanyak Rp 398,19 triliun. Sehingga yang masih surplus Rp 886,89 triliun.

Sementara rata-rata pendapatan di luar Jawa-Bali pada 2016-2019, daerah memperoleh pendapatan sebesar Rp 252,64 triliun, namun belanjanya mencapai Rp 661,93 triliun, sehingga mengalami kontraksi atau minus sebesar Rp 409,29 triliun. "Perlu kolaborasi agar target-target pembangunan nasional terus dicapai dan tidak mencapai disparitas makin tinggi," jelas Sri Mulyani.

HKPD, pemerintah hanya akan membuat tiga kelompok retribusi, yakni jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Salah satu jenis retribusi yang akan dihapuskan pemerintah di antaranya retribusi izin gangguan (hinder ordonantie/HO). "Penyederhanaan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam hal administrasi dan compliance cost," jelas Sri Mulyani.

Sedangkan pilar keempat, harmonisasi belanja pusat dan daerah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal dan tetap menjaga kesinambungan fiskal, terkait erat dengan yang ketiga tadi -peningkatan

mulihan ekonomi, sejak pertengahan tahun ini Wapres mulai mengemukakan agar pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota meningkatkan penyerapan anggaran penanganan pandemi Covid-19 di setiap daerah.

"Mohon perhatian, seperti yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, banyak yang masih rendah penyerapan anggarannya untuk penanganan Covid-19. Oleh karena itu saya minta ini betul-betul dipacu," kata Wapres Ma'ruf, Kamis, 22 Juli 2021 di hadapan Gubernur dan Bupati serta Wali Kota se-Jawa Timur.

Kala itu, risiko wabah Covid-19 ten-

ma manfaat tersebut.

Ma'ruf juga meminta Pemprov Jatim meningkatkan kinerja untuk memperbaiki pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang kini mulai menggunakan kategori level. "Diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan dapat lebih baik lagi," ucap Ma'ruf.

Bukan hanya di Jatim sebenarnya. Tercatat menjelang tutup tahun Wapres Ma'ruf bersama Mendagri Tito bersafari ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Wacananya ya serapan anggaran provinsi, kabupaten dan kota yang mendapat kunjungan.

Sudah jelas bahwa daya serap anggaran memang terkait dengan kualitas layanan publik. Ketika daya serap anggaran melemah, maka layanan publik cenderung menurun. Pada sisi lain, dana anggaran yang telah tersedia hanya tersimpan di perbankan, termasuk bank pembangunan daerah.

Pada titik inilah relevan membicarakan apakah RUU HKPD yang akan mendapat pengesahan sebagai UU ini memang menunjukkan kecenderungan resentralisasi atau mengurangi desentralisasi fiskal sebelumnya. Namun, kecenderungan resentralisasi ini perlu melihat secara utuh sisi pendapatan, sisi pengeluaran, dan sisi pembiayaan.

Nah, dari sisi penerimaan, transfer fiskal sangat mendukung penerimaan APBD. Namun, hal ini seharusnya tidak menyurutkan pemerintah daerah untuk mencari pendapatan yang lebih berkelanjutan dari sumber daya mereka sendiri berupa pendapatan asli daerah (PAD).

Toh kehati-hatian harus dilakukan untuk mencegah pengenaan pajak yang berlebihan oleh pemerintah daerah demi melesat PAD meskipun mungkin menghambat investasi dan bisnis di daerah. Beberapa kajian akademis menyarankan bahwa pemerintah pusat harus memberikan akses kepada pemerintah daerah ke sumber daya pajak yang lebih menguntungkan dan berkelanjutan, misalnya, pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Soal sumber daya pajak daerah dari PPh dan PPN ini dikemukakan oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmay-

di yang ingin tambahan komponen APBD berupa dana bagi hasil (DBH) dengan pembagian 30-40 persen PPN produk perkebunan. "Kalau 30 persen saja, kami akan segera memajukan Sumut," ujar mantan Pangkostrad itu saat rapat dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Rabu, 17 November 2021.

Dari sisi belanja dan pembiayaan, meningkatnya simpanan pemerintah daerah menunjukkan adanya kebuntuan realisasi APBD di daerah,

pembiayaan daerah.

Jika tidak, maka intervensi pusat menjadi niscaya. Karena itulah Menkeu Ani berani menegaskan bahwa RUU HKPD bukanlah soal resentralisasi, melainkan lebih ke arah perbaikan tata kelola (governance) dan pertanggungjawaban atau akuntabilitas untuk segenap pemangku kepentingan: Rakyat dan bangsa ini secara keseluruhan.

"Jadi kami ingin menyampaikan secara tegas bahwa RUU ini tujuannya adalah agar instrumen APBN maupun instrumen APBD dua-duanya memi-



Oleh sebab itu pemerintah mengusulkan melalui RUU HKPD, untuk mengintegrasikan Undang-Undang Keuangan No. 3 Tahun 2004 tentang Peraturan Pajak Daerah dan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Retribusi Daerah. Termasuk memangkas dan mengintegrasikan jenis pajak daerah, dari 16 jenis menjadi 14 jenis pajak tadi. Tambahan pula, retribusi daerah juga akan disederhanakan dari 32 jenis menjadi 18 jenis. Melalui RUU

kualitas belanja APBD dan TKDD. Ini biasanya tercermin dalam daya serap anggaran yang setiap akhir tahun kerap menjadi isu.

Malah pada tahun ini Wakil Presiden Ma'ruf Amin, tentu saja didampingi Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian berkeliling Indonesia antara lain untuk mengecek langsung daya serap anggaran provinsi dengan kondisi lapangan. Lebih dari itu, berkaitan dengan penanganan wabah Covid-19 dan pe-

gah melonjak dengan masuknya varian Delta ke Indonesia. Nah, Wapres juga meminta jajaran pemda segera melakukan perbaikan data penduduk, khususnya terkait data penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Jawa Timur masih rendah saat itu. Jadi, Wapres meminta Khofifah mendukung bupati dan wali kota untuk memperbaiki data masyarakat peneri-

FISCAL DECENTRALIZATION and the CHALLENGE of HARD BUDGET CONSTRAINTS



yang implikasinya menghambat kebijakan fiskal pusat dan menurunkan derajat pelayanan publik. Oleh sebab itu, peningkatan keterampilan sumber daya manusia di lingkup pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan proyek dapat menjadi salah satu solusi lain untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas belanja dan

liki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan bernegara, maka harmonisasi dan sinkronisasi serta sinergi adalah upaya untuk memperbaiki hasil. Bukan mengambil kewenangan daerah," tandas Bu Menteri.

Akhirnya, kita perlu melihat dulu penerapan UU HKPD ini kelak. Apakah sesuai dengan tujuan penyusunannya atau tidak?●

MITIGASI

Gunawan Effendi

la memiliki perbedaan dengan penanggulangan. Karena itulah kita menyebutnya mitigasi, sesuatu yang akan lebih telah kerap terdengar tahun ini, juga tahun depan.

Memang, ada pula kesamaannya. Penanggulangan dan mitigasi sama-sama merupakan upaya. Manakala penanggulangan lebih merupakan upaya saat kejadian, mitigasi lebih ke tindakan sebelum, pada saat, dan sesudahnya.

Baik penanggulangan maupun mitigasi sebenarnya dapat mencakup berbagai bidang. Namun, satu hal, keduanya lekat dengan kerusakan. Baik rusak oleh faktor manusia maupun non-manusia.

Salah satu pengertian mitigasi adalah upaya meringankan dampak kerusakan atau keparahan. Jadi, dapat berlangsung sebelum, ketika, dan setelah kerusakan. Termasuk mencegah keparahan apabila kerusakan berulang kembali.

Di Indonesia, mitigasi sangat relevan dengan dampak kerusakan bencana. Pandemi Covid-19 misalnya. Juga dampak ekonominya. Oleh sebab itu sudah tepat pemerintah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN). Mitigasi tentulah melekat dengan KPC PEN.

Namun, di tengah pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, mitigasi kian relevan dengan cuaca, musim, dan iklim. Cuaca adalah situasi lingkungan harian. Musim, gejala cuaca paling sering dalam jangka waktu bulanan --musim penghujan atau kemarau misalnya. Sedangkan iklim gejala cuaca dalam hitungan lebih panjang dari sebulan.

Di tengah pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, menyeruak wacana perubahan iklim. Gejala perubahan iklim sebenarnya sudah menjadi pembicaraan global sejak Abad XX lalu. Namun, wacananya kian nyaring beriringan dengan dampak dan upaya mitigasi belakangan ini.

Salah satu contoh saja. Saat musim hujan di awal Desember 2021 ini, Denpasar, ibu kota Bali, mengalami banjir. Banjir merupakan gejala langka di gerbang Pulau Dewata itu. Toh terjadi juga di musim penghujan kali ini.

Yang terjadi di Denpasar, bukan hanya karena curah hujan tinggi. Melainkan juga rob, banjir di pesisir karena laut sedang pasang.

Banjir rob secara khusus diartikan sebagai banjir yang diakibatkan oleh air laut yang menggenangi daratan yang lebih rendah. Tetapi sebenarnya tidak terbatas pada banjir yang berakibat oleh air laut melainkan juga curah hujan tinggi di daratan yang menyebabkan air melambat mengalir ke laut. Alhasil, gabungan antara genangan air pasang dan aliran air dari curah hujan tinggi sama-sama tertahan dalam waktu yang relatif lama di daratan pesisir pantai.

Bahwa Denpasar, antara lain kawasan Pantai Legian, mengalami rob mungkin mengecewakan. Bukan hanya bagi warga yang mengalaminya. Juga para wisatawan yang sedang berada di Bali, di tengah upaya mitigasi bisnis pariwisata yang terdampak

oleh pandemi.

Mengingat Bali menjadi destinasi utama wisata di Indonesia, boleh jadi akan lebih banyak lagi pemangku kepentingan yang kecewa oleh banjir Denpasar di awal Desember itu. Denpasar akhirnya masuk menjadi salah satu wilayah banjir rob. Sebelumnya, hasil penelitian Laboratorium Geodesi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan ITB pada 2018 menyebutkan 112 kota dan kabupaten di Indonesia terancam tenggelam karena gejala rob. Tak satupun kota dan kabupaten di Bali.

Namun, begitulah. Gejala perubahan iklim telah terjadi. Wacananya pun lebih kencang. Maka, memang sangat boleh jadi kita akan semakin sering berurusan dengan mitigasi. Pada tahun ini, juga 2022, dan tahun-tahun berikutnya.●



INFO
PASANG
IKLAN
KIKI IBRAHIM
+62 818 931 562



Lautan
informasi
di dunia maya
melalui jaringan
internet
memberikan
banyak
referensi
iNFO
kepada
masyarakat

JALAN MPR III NO. 5B
KELURAHAN CILANDAK
BARAT, KECAMATAN
CILANDAK, JAKARTA
SELATAN (12430)
TELP 021-27812397



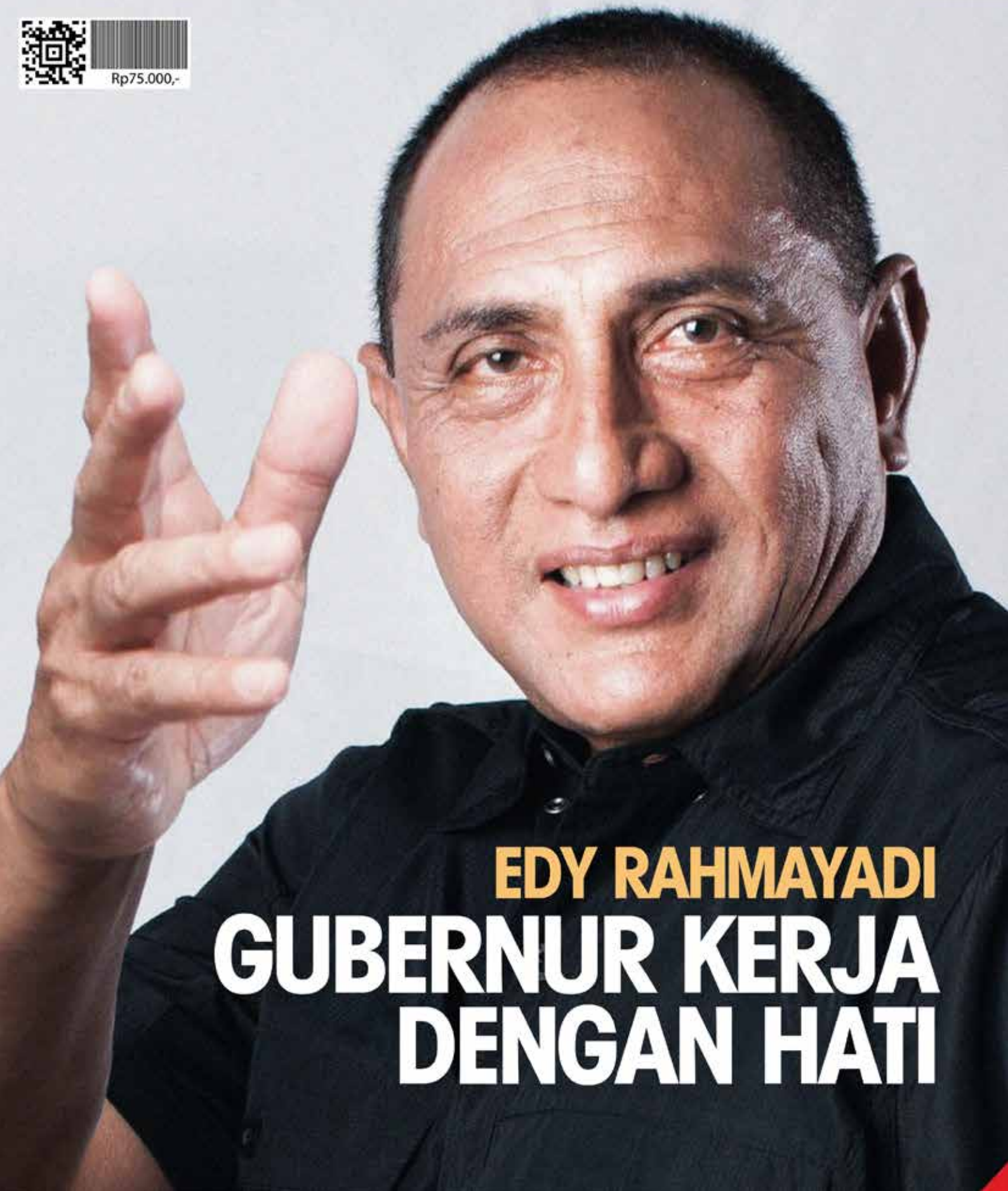
INOVASI UNTUK NEGERI
nfo indonesia

<https://infoindonesia.id>

EDISI #15 DESEMBER 2021



Rp75.000,-



EDY RAHMAYADI
GUBERNUR KERJA
DENGAN HATI